

JURNAL

BUDGET

Isu dan Masalah Keuangan Negara

ISSN 2541-5557

Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial) Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2019

Slamet Widodo

Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah

Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida

Analisis Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Di Pasar ASEAN

Dwi Resti Pratiwi

Optimalisasi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara Sektor Perbankan Sebagai Upaya Meningkatkan PNBP

Martha Carolina

Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia

Marihot Nasution

Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia

Rendy Alvaro dan Adhi Prasetyo

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Investasi Di Indonesia

Robby Alexander Sirait

Analisis Kritis Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan

Dahiri

Menyelisik Shadow Economy Di Indonesia

Rastri Paramita

2020

Vol. 5, No. 2

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI

Jurnal Budget

Vol. 5, No. 2, 2020

ISSN 2541-5557

Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian DPR RI

Halaman ini sengaja dikosongkan

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

JURNAL BUDGET

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro, S.Sos

Redaktur

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M.

Editor

Marihot Nasution, SE., M.Si.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska, SIP

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Ilmiah Jabatan Fungsional Analis APBN yang bernama “*Budget*” kembali terbit dan memasuki volume kelima. Jurnal Budget Volume 5 Edisi 2 merupakan hasil dari proses penulisan dan redaksional yang dimulai dari awal tahun 2020 hingga terbit pada bulan Desember 2020.

Terbitan Jurnal Budget ini merupakan hasil kerja redaksi dan para Analis APBN dari Pusat Kajian Anggaran, sebagai penulis utama, dan tentunya pimpinan Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI beserta jajarannya. Redaksi tetap memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan dan menentukan tata kelola yang terbaik serta ikut berkontribusi dalam Jurnal Budget ini.

Jurnal Budget dalam setiap terbitan berisi materi yang membahas seputar permasalahan dalam keuangan negara yang merupakan lingkup tugas dari Jabatan Fungsional Analis APBN. Sebagai *output* yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI maka diharapkan materi yang disajikan di dalamnya, meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik, namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan khususnya Anggota DPR RI.

Meskipun telah mencapai volume kelima, jurnal kami masih tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, Redaksi mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak atau *stakeholders*, demi perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal sebagaimana harapan kita semua.

Redaksi berharap semoga artikel-artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal ini mampu memberikan manfaat bagi analis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait isu-isu keuangan negara.

Dewan Redaksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jurnal Budget

Vol. 5, No. 2, 2020

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	v
Daftar Isi.....	vii
Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Modal, Belanja Barang, Dan Belanja Bantuan Sosial) Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2019	
Slamet Widodo	1
Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah	
Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida	18
Analisis Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Di Pasar ASEAN	
Dwi Resti Pratiwi.....	44
Optimalisasi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara Sektor Perbankan Sebagai Upaya Meningkatkan PNBP	
Martha Carolina	67
Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia	
Marihot Nasution.....	84
Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia	
Rendy Alvaro dan Adhi Prasetyo	103
Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Investasi Di Indonesia	
Robby Alexander Sirait.....	121
Analisis Kritis Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan	
Dahiri	137
Menyelisik <i>Shadow Economy</i> Di Indonesia	
Rastri Paramita.....	151

Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Modal, Belanja Barang, Dan Belanja Bantuan Sosial) Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2019

Slamet Widodo

Ringkasan

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah pusat mengalokasikan belanja kepada pemerintah daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat; pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Prinsipnya untuk mendukung asas dekonsentrasi atau asas tugas pembantuan, yang dalam pelaksanaan anggaran diwujudkan dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Menurut penggunaannya dana dekonsentrasi lebih ditujukan untuk upaya pembinaan, pengawasan, dan koordinasi, sementara dana tugas pembantuan difokuskan pada pembangunan *output fisik*.

Pengalokasian belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) dalam bentuk belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial, bersama dengan transfer dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk meningkatkan investasi/akumulasi barang modal pada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tergambar melalui peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Beberapa provinsi mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan melebihi alokasi DAK, sementara di provinsi lainnya alokasinya lebih rendah.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial terhadap PDRB di 33 pemerintah provinsi (di luar DKI Jakarta). Data yang digunakan adalah data belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial dan PDRB provinsi periode 2014-2019 yang bersumber dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan *fixed effect model*. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB dan variabel belanja bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap PDRB. Variabel belanja barang dikeluarkan dari model karena tidak memenuhi uji multikolinearitas.

Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah

Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida

Ringkasan

Pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya. Kesiapan daerah menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan yakni kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut tentunya membawa konsekuensi adanya perbedaan kinerja keuangan antar daerah dari sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah, yang digambarkan dalam pemetaan kemampuan keuangan daerah. Pemetaan kemampuan keuangan daerah digunakan sebagai alat ukur kesiapan daerah dalam menjalankan kewenangannya. Pemetaan juga dijadikan dasar strategi pengembangan sektor potensial di daerah dalam mendorong kemandirian.

Pemetaan ini disusun dalam rangka mengevaluasi tentang pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Parameter yang digunakan dalam studi ini adalah perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran yakni *growth*, *share*, dan *elastisitas*; pemetaan dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan metode indeks dan metode kuadran, maupun dengan uji beda. Tahap analisis kemampuan keuangan daerah yakni menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dengan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks *elastisitas*, dan indeks *share*. Kemudian mengklasifikasikan IKK tersebut dengan mengombinasikannya ke dalam metode kuadran.

Hasil analisis diperoleh bahwa indeks *growth* dan indeks *share* setelah adanya otonomi daerah mengalami penurunan. Artinya, pertumbuhan PAD maupun kontribusi PAD dalam APBD lebih rendah dari sebelum dilaksanakannya otonomi daerah. Sementara kontribusi PAD dalam membiayai belanja pembangunan yang tercermin dari nilai indeks *elastisitas*, menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai indeks *elastisitas* setelah penerapan otonomi daerah meningkat menjadi 0,492, meskipun peningkatan tersebut masih relatif kecil yakni sebesar 0,06.

Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan yang ditunjukkan dari jumlah provinsi yang memiliki IKK tinggi turun dari sebelum otonomi daerah. Selain itu,

berdasarkan hasil uji t, diperoleh hasil bahwa penerapan otonomi daerah tidak meningkatkan kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia. Dari peta kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah juga menunjukkan bahwa terjadi perubahan peta kemampuan keuangan daerah secara signifikan. Sebanyak 15 provinsi mengalami penurunan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah. Sedangkan hanya 2 provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah agar mampu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kemandirian daerah.

Analisis Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Di Pasar ASEAN

Dwi Resti Pratiwi

Ringkasan

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Industri ini menyumbang sebesar 5,8 persen terhadap industri manufaktur (BPS, 2020). Dari sisi penyerapan tenaga kerja, industri TPT merupakan sektor industri terbesar kedua yang menyerap tenaga kerja apabila dibandingkan dengan sektor industri manufaktur lainnya (BPS, 2020). Dilihat kinerja perdagangannya, produk TPT juga menunjukkan kinerja yang baik dengan selalu tercatat surplus terutama dari tahun 2015 sampai 2019. Bahkan Indonesia tercatat sebagai 15 besar eksportir produk tekstil di dunia pada tahun 2018, karena Indonesia memasok 1,67 persen komoditas tekstil dunia (UNComtrade, 2020). Besarnya potensi pada industri TPT ini seharusnya menjadi peluang besar bagi Indonesia dalam menguasai pasar produk TPT di kawasan ASEAN. Dalam studi ini bertujuan untuk menganalisis daya saing industri TPT Indonesia dibanding negara-negara ASEAN lainnya dan faktor-faktor yang memengaruhi daya saing industri TPT di Kawasan ASEAN. Metode yang digunakan dalam menganalisis daya saing TPT Indonesia di Kawasan ASEAN ialah dengan *Revealed Comparative Advantage* (RCA). Selain itu, dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi daya saing digunakan metode regresi *ordinary least square* (OLS). Adapun kurun waktu data yang digunakan adalah dari tahun 2000 hingga 2019

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2000 hingga tahun 2005, nilai RCA ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke pasar ASEAN kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor tekstil dan produk tekstil memiliki keunggulan komparatif dan daya saing ke pasar ASEAN. Namun pada tahun 2005-2019 nilai RCA ekspor tekstil Indonesia ke pasar ASEAN justru terus mengalami penurunan dengan nilai kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor tekstil indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif dan daya saing yang kuat ke pasar ASEAN. Berdasarkan hasil olah data menggunakan analisis regresi *ordinary least square* menunjukkan bahwa variabel independen REER, harga ekspor, dan investasi secara statistik signifikan dan berhubungan negatif dengan daya saing ekspor TPT Indonesia di Kawasan ASEAN. Sementara itu harga energi, atau dalam hal ini gas, secara statistik tidak signifikan menjelaskan daya saing industri TPT. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali terhadap regulasi atau kebijakan impor bahan baku yang dianggap memberatkan pelaku industri TPT, mengingat kebutuhan bahan baku industri TPT masih belum dapat sepenuhnya dipenuhi

dari domestik. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberi perhatian terhadap banyaknya impor produk tekstil dengan merevisi terhadap bea masuk produk tekstil. Dengan demikian, pemerintah tetap melindungi sisi hilir dengan tetap memberi insentif pada sisi hulu.

Optimalisasi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara Sektor Perbankan Sebagai Upaya Meningkatkan PNBP

Martha Carolina

Ringkasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND). Hal ini dilakukan di antaranya untuk mengetahui kontribusi kinerja keuangan BUMN di sektor perbankan terhadap laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk dan persentase kepemilikan saham pemerintah, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *dividend payout ratio* (DPR) pada BUMN sektor perbankan seperti *return on assets* (ROA) dan *capital adequacy ratio* (CAR) secara bersama-sama (simultan), untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap DPR pada bank BUMN, dan untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal/CAR terhadap DPR pada bank BUMN, serta untuk mengetahui target dan realisasi PNBP KND atas laba BUMN sektor perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian analisa kinerja keuangan hanya Bank BRI yang telah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan laba dan persentase kepemilikan saham pemerintah yang besar sehingga penerimaan PNBP KND sektor perbankan secara keseluruhan belum optimal. Berdasarkan uji F, variabel ROA dan CAR perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap DPR. Berdasarkan uji t, variabel ROA (X_1) terhadap DPR menunjukkan ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Begitu pula variabel CAR (X_2). Realisasi PNBP KND/Setoran Dividen atas Laba Pemerintah BUMN sektor perbankan selalu melampaui target PNBP KND atas laba pemerintah. Namun, pemerintah masih perlu memformulasi target yang tepat untuk penerimaan PNBP KND karena pemerintah masih menetapkan rasio DPR yang sama untuk BUMN tanpa memerhatikan laba bank BUMN lebih besar atau kecil. Pemerintah juga masih menetapkan rasio DPR yang sama tanpa memerhatikan kinerja keuangan bank BUMN telah mengalami penurunan.

Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia

Marihot Nasution

Ringkasan

Studi ini mengkaji perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dari periode 2000-2019. Pengujian dilakukan dengan pengelompokan menggunakan tipologi Klassen dan pengukuran nilai ketimpangan dengan menggunakan indeks Williamson. Selain itu, hasil penghitungan ketimpangan tersebut diuji korelasinya dengan belanja pemerintah menurut jenisnya, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta transfer ke daerah.

Hasil penelitian diketahui bahwa tipologi Klassen mengategorikan 2 provinsi berada dalam kelompok provinsi yang maju dan berkembang pesat/kuadran 1 yaitu DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Sementara itu, 8 provinsi masuk ke dalam kelompok provinsi yang masuk dalam kategori tertinggal (kuadran 3). Untuk kelompok provinsi yang tergolong berkembang dengan pendapatan per kapita melebihi rata-rata namun pertumbuhannya rendah dan berada di kuadran 4 terdapat 5 provinsi dan provinsi lainnya (19 provinsi) masuk ke dalam kuadran 2 yang merupakan kuadran dengan pertumbuhan tinggi namun PDRB per kapitanya di bawah rata-rata. Sementara itu, nilai ketimpangan yang diukur dengan indeks Williamson selama 2010-2019 berada di kisaran 0,70-0,76 yang mendekati angka 1, artinya Indonesia mengalami ketimpangan wilayah yang tinggi.

Pengujian korelasi variasi indeks Williamson dengan variasi belanja negara menunjukkan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal serta transfer ke daerah berhubungan positif dan signifikan terhadap indeks Williamson. Hal ini membuktikan bahwa belanja negara masih belum terdistribusi secara merata dan belum mampu mengangkat daerah dengan pertumbuhan rendah.

Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia

Rendy Alvaro dan Adhi Prasetyo

Ringkasan

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan sumber pendanaan sebagai salah satu fungsi pemberdayaan daerah. Lebih lanjut, desentralisasi jika dilihat dari sisi administrasi publik tentu akan berbicara mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik melalui perpanjangan tangan pemerintah daerah melalui belanja daerah. Belanja modal merupakan salah satu bentuk belanja yang mampu mewujudkan infrastruktur dan sarana yang semakin banyak. Dengan demikian dapat memberikan pengaruh langsung terhadap pelayanan publik. Akan tetapi, dari berbagai penelitian menyebutkan dari berbagai klasifikasi jenis belanja, belanja pegawai masih mendominasi belanja di pemerintah daerah sedangkan untuk belanja modal masih terbatas diberikan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2017 alokasi belanja modal dalam skala provinsi sebesar 16,8 persen dan sedikit mengalami kenaikan menjadi 17 persen di tahun 2018. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan E-Views 9 untuk menganalisis data panel terkait belanja modal, PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari *cross section* dan *time series* menggunakan sampel seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2010-2018, kecuali Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa PAD, DAK, DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, dari hasil uji juga diketahui pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan baik bagi pemerintah dan legislatif baik di pusat maupun daerah terkait PAD dan Dana Perimbangan agar dapat mendukung keputusan yang terbaik dalam mencapai

tujuan yang diinginkan dalam pembangunan. Dengan era desentralisasi, kontribusi transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan seharusnya mampu digunakan dengan baik untuk kebutuhan daerah dalam belanja modal untuk pembangunan di daerah masing-masing agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Investasi Di Indonesia

Robby Alexander Sirait

Ringkasan

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kemajuan perekonomian di suatu negara adalah kinerja investasi negara tersebut, yang merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) negara bersangkutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir masih dominan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata kontribusi terhadap PDB sebesar 55,80 persen per tahun. Sedangkan investasi, hanya menduduki posisi kedua, dengan kontribusi sebesar 32,17 persen per tahun terhadap PDB dan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,09 persen per tahun. Padahal, peran investasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dalam jangka panjang. Kondisi capaian dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa kinerja investasi belum berperan optimal dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional. Kinerja investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang sifatnya internal perusahaan maupun kondisi eksternal perusahaan, dan baik faktor ekonomi maupun non ekonomi.

Berdasarkan Teori Dunning, salah satu faktor ekonomi yang memengaruhi kinerja investasi adalah biaya tenaga kerja yang salah satunya dapat diproksi dengan upah pekerja. Dalam satu dekade terakhir, upah minimum provinsi mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap investasi di Indonesia, dengan menggunakan data dari 32 (tiga puluh dua) provinsi pada periode 2011-2019 dan metode *Fixed Effect Model (FEM)*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UMP memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap kenaikan harga UMP akan menyebabkan penurunan nilai investasi. Demikian juga sebaliknya. Hasil lain dari penelitian ini adalah tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat sebagai variabel kontrol lainnya memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan berdampak pada peningkatan nilai investasi.

Analisis Kritis Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan

Dahiri

Ringkasan

Kinerja sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan saat ini mengalami penurunan, karena pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami perlambatan dan neraca perdagangan negatif setiap tahunnya. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor produksi dan harga. Faktor produksi merupakan faktor yang masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan faktor harga sangat berkaitan dengan faktor eksternal, sehingga tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus pada pembahasan faktor produksi pada subsektor tanaman pangan.

Hasil penelitian yang dilakukan memberikan beberapa kesimpulan yaitu determinan produksi sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan produktivitas. Permasalahan pada lahan yaitu adanya alih fungsi lahan karena kebutuhan tempat tinggal, dan keperluan untuk fasilitas umum. Sedangkan konversi lahan sawah yang disebabkan adanya alih komoditi dari tanaman pangan ke tanaman nonpangan karena margin harga komoditas nonpangan dianggap lebih menguntungkan bagi petani. Salah satu faktor utama alih komoditi adalah persoalan harga khususnya pada saat panen raya, komoditas padi merupakan pangan pokok utama nasional, tetapi produktivitasnya terus mengalami penurunan, dan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) pada pasca panen masih relatif minim. Adapun upaya yang perlu dilakukan yaitu pemerintah harus menyerap hasil produksi petani dan pemberian bantuan alsintan harus secara lengkap yaitu pra panen dan pasca panen.

Menyelisik *Shadow Economy* Di Indonesia

Rastri Paramita

Ringkasan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi dengan *shadow economy* melalui transmisi kondisi tenaga kerja serta mengetahui pengaruh *shadow economy* terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif untuk melihat *shadow economy* di Indonesia dari perspektif yang berbeda dari penelitian-penelitian yang selama ini ada terkait *shadow economy* Indonesia. Dengan menggunakan alat analisis yaitu faktor-faktor yang meningkatkan scope dari *shadow economy* yang dikemukakan oleh Gaspareniene, Remeikiene, dan Heikkila (2017) menggabungkan beberapa faktor yang dapat meningkatkan scope dari *shadow economy*.

Hasil kajian perkembangan *shadow economy* melalui transmisi tenaga kerja dalam memengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu perkembangan *shadow economy* dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2000-2015 yang cenderung mengalami fluktuasi dan tidak selamanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan *shadow economy* bertanda negatif. Namun, terdapat kecenderungan dalam 16 tahun terakhir persentase *shadow economy* terhadap GDP mengalami penurunan. Selain itu, terdapat perbedaan pola hubungan antara proporsi sektor informal dengan pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah di Indonesia. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain dalam mengatasi *shadow economy*.

Sedangkan keterkaitan *shadow economy* terhadap penerimaan pajak di Indonesia, ditemukan bahwa penyederhanaan birokrasi dalam memulai bisnis di Indonesia berdampak lebih besar terhadap pengurangan pertumbuhan *shadow economy*. Untuk memperlambat pertumbuhan *shadow economy* yang disebabkan oleh birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah taktis dengan melakukan perbaikan dan inovasi layanan perpajakan, dari mulai pendaftaran NPWP secara daring sampai peluncuran *single login* dengan inovasi memungkinkan wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan pajak dalam satu kali *login*, dan kerja sama pertukaran informasi untuk meminimalkan adanya informasi asimetris antara DJP dengan wajib pajak yang disertai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang berkenan *sharing* informasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BELANJA MODAL, BELANJA BARANG, DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB) PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2014-2019

The Effect of Central Government Expenditure (Capital and Goods Expenditure, and Social Assistance Spending) on Gross Regional Domestic Product of Provincial Government, 2014-2019

Slamet Widodo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: slamet.widodo@dpr.go.id

Abstract

In order to carry out concurrent government affairs in regional level, the central government allocates spending to support investment growth in the regions through capital expenditure, goods expenditure and social assistance spending. This capital accumulation is intended to increase the output of local government goods and services which in turn will increase regional economic growth.

The purpose of this study is to analyze the Impact of Central Government Expenditure (Capital, Goods, and Social Assistance Expenditures) towards Gross Regional Domestic Product (PDRB) of provincial government for the period of 2014-2019. Data used was taken from BPS, the Ministry of Finance, and other relevant agencies. Analysis tools using data panel regression with fixed effect model. The results of the analysis shows that only capital expenditure has positive effect on PDRB, and social assistance expenditure has negative effect on PDRB. While goods expenditure variable is excluded from the model, since it not met the multicollinearity test

Keywords: *capital and goods expenditure, social assistance spending, gross regional domestic product of provincial government*

1. Pendahuluan

Sebelum era desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan sangat terpusat dan peran daerah hanya sebagai objek pembangunan dan menerima kebijakan yang dilaksanakan di tingkat pusat. Prioritas daerah seringkali harus disisihkan demi kepentingan nasional. Berbagai program berorientasi daerah dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat. Dengan pemberlakuan otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah mulai membagi/menyerahkan kepada daerah sebagian kewenangan/urusannya di daerah. Urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan pemerintahan absolut yang mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden untuk tujuan menjaga stabilitas nasional. Secara detail, pembagian urusan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014) dan konsekuensi pendanaan diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

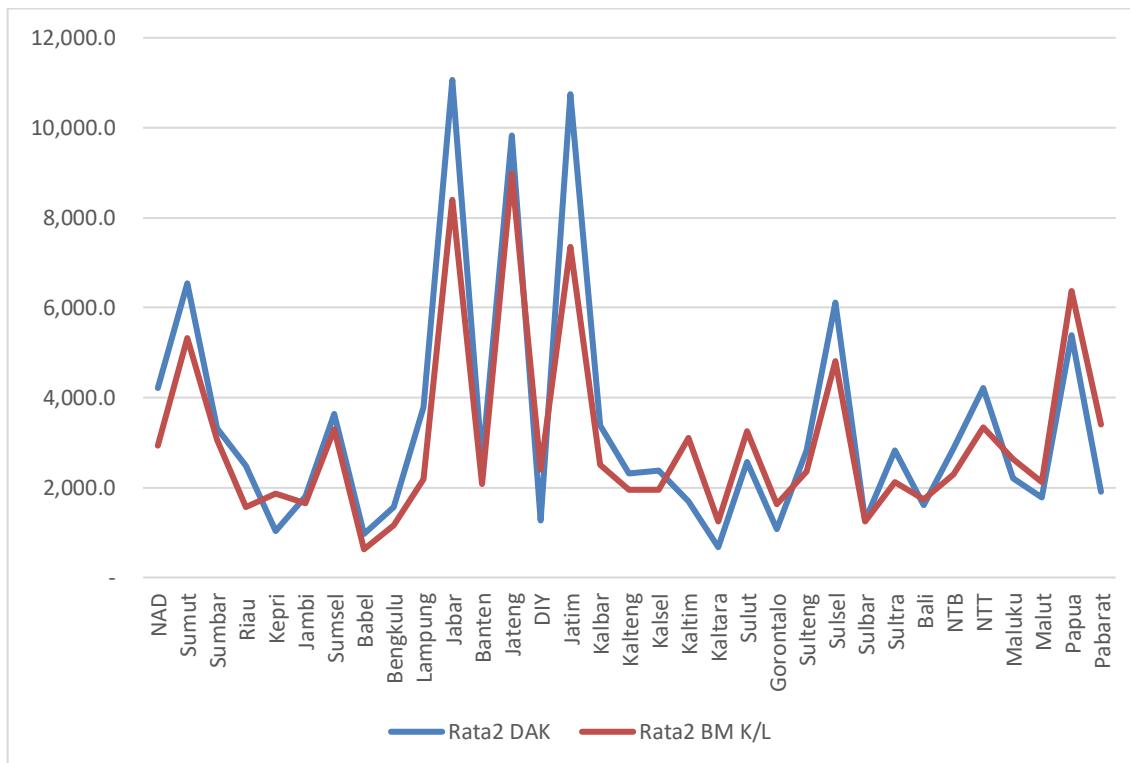
Dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah melalui asas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L). Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sendiri oleh K/L yang bersangkutan, melalui instansi vertikal di daerah, atau diserahkan melalui penugasan kepada daerah.

Dengan meningkatnya kewenangan daerah dalam mengelola sendiri prioritasnya, sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah perlu memastikan agar kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah tetap dalam koridor mencapai prioritas nasional dengan tidak meninggalkan kepentingan daerah yang belum berkembang dan minim sumber daya alam. Dengan demikian, peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dalam kerangka dana tugas pembangunan tetap diperlukan untuk kepentingan daerah.

Pendanaan melalui Tugas Pembantuan (TP) ditujukan untuk kegiatan berorientasi *output* secara fisik. Dalam pos anggaran K/L, pendanaan ini masuk dalam beberapa jenis belanja, yaitu belanja modal (BM), belanja barang (BB) dan belanja bantuan sosial (BBS). Sinergi belanja K/L dengan dana perimbangan yang langsung dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terus meningkat dari tahun ke tahun dan pendanaan melalui TP juga memiliki kecenderungan yang meningkat. Ini menjadi menarik untuk mengetahui efektivitas pendanaan melalui TP ini dalam mendorong PDRB daerah.

Dalam kurun waktu 2014 – 2019, alokasi pendanaan melalui TP (belanja modal) terus meningkat, di sisi lain alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami peningkatan. Rata-rata pendanaan kegiatan fisik melalui DAK lebih besar hampir di semua provinsi, kecuali di 11 provinsi, yaitu Provinsi (Prov.) Kepulauan Riau, Prov. DIY, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Utara, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Gorontalo, Prov. Bali, Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara, Prov. Papua, dan Prov. Papua Barat.

Gambar 1. Tabel Rata-rata DAK & Belanja Modal K/L Periode Tahun 2014-2019 (dalam miliar Rp)



Sumber: BPS, diolah

DAK merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang tujuan dan sasarannya hampir sama yaitu untuk kegiatan fisik yang menciptakan *output* barang modal yang menjadi salah satu pendorong perekonomian daerah. Belanja modal K/L dan DAK merupakan dua pendanaan bagi daerah yang memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Belanja modal K/L merupakan pendanaan yang berasal dari inisiatif K/L, sementara inisiatif pendanaan melalui DAK diusulkan oleh pemerintah daerah. Dari sisi pemanfaatannya, DAK lebih “kaku” karena berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan dari K/L yang bersangkutan yang diselaraskan dengan kepentingan daerah, sementara belanja modal K/L lebih berpegang pada pelaksanaan tugas dan fungsi K/L itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan data DAK, belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial serta pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu 2014-2019, kenaikan DAK diikuti dengan kenaikan PDRB, sementara penurunan alokasi belanja modal di 11 provinsi tidak diiringi dengan penurunan PDRB. Pengamatan terhadap data juga mengungkapkan bahwa penurunan belanja bantuan sosial tidak diikuti dengan penurunan PDRB. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh K/L terhadap PDRB provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati hubungan antara

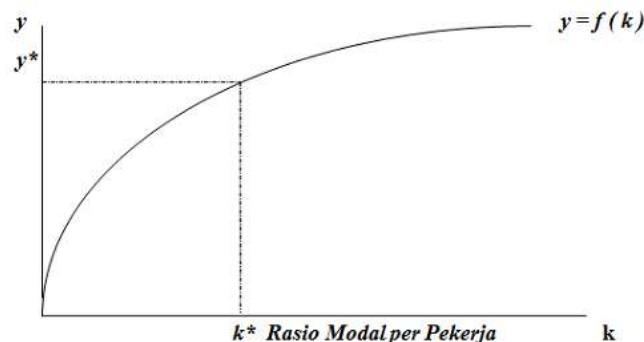
belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh K/L terhadap PDRB provinsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengalokasian anggaran K/L di daerah dalam rangka melaksanakan asas tugas pembantuan.

2. Tinjauan Pustaka

Intervensi pemerintah dalam perekonomian dilakukan karena dua alasan yaitu kegagalan pasar dan redistribusi. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar gagal dalam menghasilkan barang-barang dan jasa secara efisien. Meskipun efisiensi dapat tercapai, mekanisme pasar dapat menciptakan kesenjangan yang sangat tinggi di antara individu dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Kegagalan pasar tersebut disebabkan antara lain adanya barang publik, kompetisi yang tidak sempurna, informasi yang tidak simetris, dan adanya eksternalitas. Dengan demikian, diperlukan peran pemerintah untuk turut menghasilkan barang dan jasa secara efisien, khususnya untuk kepentingan publik dan mengatasi penyebab kegagalan pasar tersebut. Sementara itu, redistribusi pendapatan dapat dilakukan pemerintah melalui pengenaan pajak dan mengalihkannya kepada wilayah lain untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi, atau dengan cara memberikan bantuan sosial dan berbagai subsidi bagi masyarakat miskin.

Pentingnya peranan investasi modal fisik telah diformulasikan sejak lama. Salah satunya adalah model pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan oleh Solow (1987) dalam yang memperkenalkan aspek penggunaan teknologi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, perekonomian yang berhasil meningkatkan investasi secara permanen akan memiliki tingkat *output* yang lebih tinggi, dan untuk mencapai tingkat *output* yang lebih tinggi secara permanen sepenuhnya tergantung pada tingkat kemajuan teknologi dan tidak hanya bersandar pada investasi saja.

Gambar 2. Fungsi Produksi Per Kapita GDP



Sumber: Dornbusch et.al, 2004 dalam Latip (2009)

Gambar di atas menunjukkan fungsi produksi per kapita *Gross Domestic Product* (GDP) dengan variabel independennya rasio modal per pekerja, fungsi produksi per kapita tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = f(k)$$

Pada gambar tersebut pertambahan kapital terus mendorong pertumbuhan *output*, sampai pada tingkat tertentu sehingga pertumbuhan *output* menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya. Pertumbuhan *output* sampai pada level tertentu didapat dari kombinasi modal dan tenaga kerja yang optimal. Meskipun kombinasi modal dan tenaga kerja memegang peranan penting dalam model pertumbuhan ekonomi, model pertumbuhan Solow (1987) menunjukkan bahwa faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja, namun kemajuan teknologi dan pertambahan meningkatnya keterampilan tenaga kerja. Model pertumbuhan Solow juga mengasumsikan bahwa perekonomian bersifat tertutup dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Perekonomian bekerja sesuai dengan mekanisme pasar dalam kondisi *full employment*.

Namun demikian, kegagalan pasar dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi, sekaligus mendorong terciptanya kombinasi modal dan tenaga kerja pada tingkat yang optimal bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Intervensi yang dilaksanakan pemerintah, baik melalui APBN/APBD, tidak terlepas dari tiga fungsi ekonomi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Melalui fungsi alokasi, pemerintah mengalokasikan anggaran pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil (Kementerian Keuangan, 2014).

Pasca otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian urusan/kewenangan, yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pembagian urusan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 terbagi menjadi:

1. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat mencakup bidang politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.
2. Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren inilah yang sampai saat ini masih diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, dengan cara melimpahkan kepada gubernur atau kepada

instansi vertikal di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, atau dengan cara menugaskan daerah berdasarkan asas TP. Urusan pemerintahan konkuren ini terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, perlindungan masyarakat dan sosial, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar antara lain tenaga kerja, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, pemberdayaan perempuan dan anak. Konsekuensi pelimpahan penugasan ini dibarengi dengan pendanaan yang dikenal dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Kedua jenis dana ini berasal dari APBN. Perbedaannya terletak pada tingkat pelimpahannya dan penggunaannya. Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh gubernur atau instansi vertikal pusat di daerah, sementara dana tugas pembantuan dilaksanakan oleh daerah dan desa (pelimpahan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota). Sedangkan dari sisi penggunaannya, dana dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan non fisik, dan dana tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Dalam belanja K/L, dana dekonsentrasi umumnya berupa belanja pegawai karena sebagian besar kegiatannya bersifat koordinasi dan sinkronisasi, sementara dana tugas pembantuan dalam bentuk belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial.

2.1. Teori Intervensi Pemerintah

Dalam tataran implementasinya, intervensi pemerintah pusat dalam perekonomian direalisasikan dalam bentuk belanja negara, khususnya klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial. Dalam kaitannya dengan investasi dan pertumbuhan PDRB, maka kajian hanya berfokus pada belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran, definisi atas masing-masing belanja adalah sebagai berikut:

- a. **Belanja modal** adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan Aset Tetap (AT) dan/atau aset lainnya atau menambah nilai AT dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi AT/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal dipergunakan antara lain untuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal lainnya.
- b. **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) dan belanja perjalanan. Penggunaannya antara lain untuk kegiatan operasional dan non operasional, dan belanja pemeliharaan aset.

- c. **Belanja bantuan sosial** adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penggunaannya antara lain untuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Daerah perlu meningkatkan investasi modal fisik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Investasi modal fisik diperlukan mengingat modal fisik mengalami depresiasi/penyusutan seiring dengan masa penggunaan modal fisik tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan positif jika jumlah investasinya melebihi jumlah modal/kapital yang terdepresiasi. Intervensi pemerintah dalam belanja modal dan belanja barang di daerah diharapkan dapat mengakumulasi belanja modal daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Intervensi pemerintah diharapkan dapat menambah investasi modal fisik di daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan PDRB. Hubungan antara komponen belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial terhadap PDRB dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hubungan antara belanja modal dengan PDRB. Salah satu indikator besarnya investasi tercermin melalui besaran belanja modal yang dialokasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada barang modal atau fasilitas publik dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan *output* barang dan jasa dalam perekonomian. Peningkatan *output* produksi ini menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
- b. Hubungan antara belanja barang dengan PDRB. Salah satu pemanfaatan belanja barang adalah untuk pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas kinerja AT atau aset lainnya. Proses pengalihan aset tetap yang kegiatannya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, perlu melalui proses pengalihan yang cukup lama. Selama aset tersebut belum dialihkan, maka kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan belanja pemeliharaan atas aset tetap tersebut. Meskipun tidak menambah umur ekonomis, namun pengalokasian belanja pemeliharaan aset mutlak diperlukan untuk menjaga agar kapasitas kinerja aset tetap tidak tergerus lebih cepat dari umur ekonomisnya, sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah.
- c. Hubungan antara belanja bantuan sosial dengan PDRB. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (PMK No. 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran). Bantuan perlindungan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan,

penanggulangan bencana. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kegiatannya dapat berupa penyediaan akses perumahan/permukiman, kesempatan kerja, akses layanan kesehatan dan pendidikan, akses modal usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kemampuannya untuk menjaga/mempertahankan daya beli dan menyediakan akses dalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu mendukung perekonomian daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Anasmen (2009) menggunakan variabel belanja modal, investasi swasta dan jumlah penduduk untuk menguji pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat periode 2000-2006. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode regresi berganda dan data panel dengan hipotesis penelitian yaitu besarnya belanja modal pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun (2000-2006). Hasil analisis regresi menunjukkan belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini didukung oleh uji statistik yang menunjukkan belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak disumbang oleh sektor pertanian yang tidak memiliki hubungan signifikan dengan belanja modal.

Hasil penelitian Sita (2016), yang menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan, menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode analisis menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dengan variabel belanja modal sebagai variabel eksogen dengan variabel endogen *intervening* yaitu pertumbuhan ekonomi dan variabel endogen tergantung yaitu kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) belanja modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, 3) belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Widada, et.al (2014), yang menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran di Indonesia menggunakan variabel belanja pemerintah, variabel tenaga kerja, dan variabel PDRB. Teknik analisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah (G) memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB kabupaten/kota hasil pemekaran. Dari hasil analisis terhadap laporan realisasi APBD kabupaten/kota hasil pemekaran untuk tahun anggaran 2008-2010, ditemukan bahwa realisasi total belanja 45 pemerintah daerah kabupaten/kota hasil pemekaran selalu menunjukkan adanya peningkatan tiap tahunnya. Namun jika dicermati lebih jauh, peningkatan realisasi total belanja tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan realisasi belanja modal.

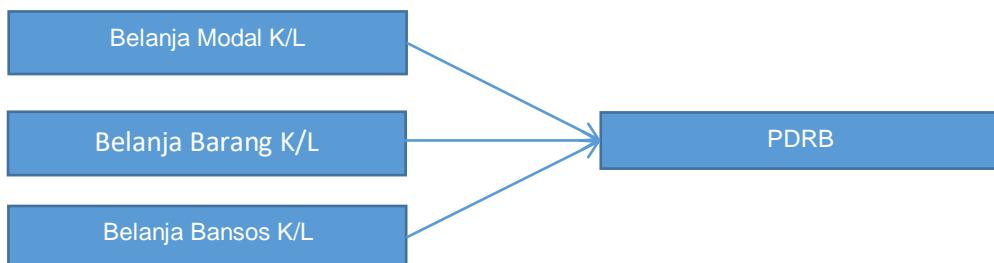
3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah *data panel* berbentuk *time series* dari tahun 2014-2019, dan data *cross section* yang terdiri atas 33 provinsi di Indonesia. Data PDRB diperoleh dari publikasi BPS tentang PDRB provinsi menurut lapangan usaha 2015-2019, dan data belanja pemerintah (K/L) diperoleh dari laman Peta Data APBN yang dipublikasikan secara *online* oleh Kementerian Keuangan.

3.2. Model Penelitian

Besarnya ruang fiskal dan kapasitas fiskal daerah memberi keleluasaan daerah dalam mengalokasikan anggarannya ke sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah.



Skema hubungan antara variabel dana perimbangan dengan variabel-variabel yang memengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$PDRB = \alpha + \beta_1 BM_{it} + \beta_2 BB_{it} + \beta_3 BBS_{it} + \varepsilon_i$$

Di mana:

- PDRB : Produk Regional Domestik Bruto
 BM : belanja modal kementerian/lembaga (K/L)
 BB : belanja barang kementerian/lembaga (K/L)
 BBS : belanja bantuan sosial kementerian/lembaga (K/L)
 $\beta_1 - \beta_3$: koefisiensi
 i : *cross section*
 t : *time series*
 ε_i : *error term*

3.3. Hipotesis Penelitian

Dari model tersebut di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : variabel belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB

H_1 : variabel belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pada tahapan tersebut, maka dilakukan proses pemilihan model terbaik melalui tahapan, yaitu:

4.1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu *Chow-test*, *Hausman Test* dan *Lagrange Multiplier Test*.

4.1.1. Pemilihan Model *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)*

Proses pemilihan model dilakukan melalui uji Chow untuk menentukan apakah *common effect model (CEM/PLS)* yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model (FEM)*.

Hipotesis:

H_0 = Jika *Chi square* > 0,05 , maka yang diterima adalah CEM.

H_1 = Jika *Chi square* < 0,05, maka tolak H_0 dan menerima FEM.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

<i>Redundant Fixed Effects Tests</i>			
<i>Test cross-section fixed effects</i>			
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section F	383.759138	(32,96)	0.0000
Cross-section Chi-square	641.413057	32	0.0000

Sumber: Hasil olahan data

Hasil pengujian menunjukkan baik *F-test* maupun *Chi-square* signifikan (*p-value* 0,000 atau lebih kecil dari 0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti *fixed effect*.

4.1.2. Pemilihan Model *Random Effect Model (REM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)*

Proses pemilihan model dilakukan melalui uji Hausman untuk menentukan apakah *random effect model (REM)* yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model (FEM)*.

Hipotesis:

H_0 = Jika *Chi square* > 0,05, maka terima H_0 yaitu REM lebih tepat.

H_1 = Jika *Chi square* < 0,05, maka tolak H_0 , yaitu FEM lebih tepat.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

<i>Correlated Random Effects - Hausman Test</i>			
<i>Test cross-section random effects</i>			

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	227.153925	3	0.0000

Sumber: Hasil olahan data

Hasil pengujian menunjukkan signifikan (*p-value* 0,0000 kurang dari 0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian model mengikuti *fixed effect*.

4.1.3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* harus dilakukan jika pada proses pemilihan model melalui uji *Chow* dan uji *Hausman* menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu:

- Uji *Chow* menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *common effect* daripada *fixed effect*. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah *common effect* lebih baik daripada *random effect*, maka diperlukan *Lagrange Multiplier Test*.
- Uji *Hausman* menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *random effect* daripada *fixed effect*. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah *random effect* lebih baik daripada *common effect*, maka diperlukan uji *Lagrange Multiplier*.

Dikarenakan uji *Chow* maupun uji *Hausman* menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *fixed effect*, maka tidak diperlukan uji LM.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Pertama

	BM	BB	BBS
BM	1	0.8259780916311264	0.4184276108382397
BB	0.8259780916311264	1	0.4435651180226061
BBS	0.4184276108382397	0.4435651180226061	1

Sumber: Hasil olahan data

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antar variabel independen BB di bawah 0,80 yang berarti ada multikolinearitas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas, adalah dengan mengeluarkan variabel independen yang bermasalah, dalam hal ini adalah variabel BB. Sehingga model penelitian hanya menggunakan 2 variabel saja yaitu BM dan BBS. Selanjutnya diuji kembali apakah masih terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji kedua di Tabel 4, model sudah terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Kedua

	BM	BBS
BM	1	0.4184276108382397
BBS	0.4184276108382397	1

Sumber: Hasil olahan data

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksejalan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Proses melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Uji Glejser meregresikan variabel-variabel bebas terhadap residual absolut. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sementara absolut adalah nilai mutlaknya. Uji Glejser ini hanya berlaku pada *fixed effect*. Jadi, ketika hasil analisis dan pemilihan model regresi yang dipilih adalah *fixed effect model* (FEM), maka uji Glejser perlu digunakan. Hal itu untuk melihat apakah terjadi pelanggaran asumsi klasik heteroskedastisitas pada model regresi atau tidak.

Tabel 5. Hasil Uji Glejser

<i>F-statistic</i>	1.292745	<i>Prob. F (2,3)</i>	0.3936	
<i>Obs*R-squared</i>	2.777364	<i>Prob. Chi-Square (2)</i>	0.2494	
<i>Scaled explained SS</i>	2.053069	<i>Prob. Chi-Square (2)</i>	0.3582	
<i>Dependent Variable: ARESID</i>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-72519.49	92344.28	-0.785317	0.4896
BM	26.27061	29.36734	0.894552	0.4369
BBS	-3.962830	12.93249	-0.306424	0.7793

Sumber: Hasil olahan data

Indikator untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, adalah apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas pada setiap variabel independen $> 0,05$ maka terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

Karena nilai probabilitas untuk variabel BM dan BBS lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

4.3. Interpretasi Hasil

Setelah terpilihnya model *fixed effect* dengan serangkaian uji asumsi klasik, maka dilakukan uji *Goodness of Fit*. Uji *Goodness of Fit* pada penelitian ini terdiri dari uji F statistik, uji t statistik dan uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 6. Hasil Uji Goodness of Fit

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/19/20 Time: 13:53
 Sample: 2014 2019
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	215169.2	9956.172	21.61164	0.0000
BM	15.35824	3.057493	5.023149	0.0000
BBS	-45.12754	3.386714	-13.32487	0.0000
<i>Effects Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
R-squared	0.996279	Mean dependent var	250146.2	
Adjusted R-squared	0.995503	S.D. dependent var	341870.0	
S.E. of regression	22926.32	Akaike info criterion	23.07698	
Sum squared resid	8.57E+10	Schwarz criterion	23.65824	
Log likelihood	-2249.621	Hannan-Quinn criter.	23.31225	
F-statistic	1283.576	Durbin-Watson stat	1.441452	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olahan data.

4.3.1. Uji *F*-statistic

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji *F*-stat

F-Statistik	p-value	Kesimpulan
1283,576	0,000000	Signifikan
Daerah kritis H_0 ditolak jika $p\text{-value} < 0,05$ (α)		

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value}$ $0,0000 < 0,05$ (α), maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu PDRB.

4.3.2. Uji *t*-statistic

Uji *t*-statistic dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis dalam pengujian *t*-statistic adalah:

H_0 : variabel belanja modal dan belanja bantuan sosial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB

H_1 : variabel belanja modal dan belanja bantuan sosial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB

Jika probabilitas nilai $t_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima atau menolak H_1 , sebaliknya jika probabilitas nilai $t_{hitung} < 0,05$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 5 persen.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	215169.2	9956.172	21.61164	0.0000
BM	15.35824	3.057493	5.023149	0.0000
BBS	-45.12754	3.386714	-13.32487	0.0000

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel independen BM dan BBS secara signifikan berpengaruh terhadap variabel PDRB. Dengan nilai p -value berturut-turut sebesar 0,0000; dan 0,0000, yang lebih kecil dibandingkan 0,05/α.

4.3.3. Uji Koefisien Determinasi R^2 dengan Variabel yang Signifikan

Uji koefisien determinasi R^2 dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 9. Uji R^2 dengan Variabel yang Signifikan

Koefisiensi determinasi	
<i>R-squared</i>	0.996279
<i>Adjusted R-squared</i>	0.995503

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 99,6 persen dari PDRB dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial, sedangkan sisanya sebesar 0,4 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.4. Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil uji *goodness of fit* (Tabel 6) di atas, maka hasil estimasi dengan menggunakan model *fixed effect* akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PDRB = 15,3582419098BM - 45,1275410717BBS + 215169,245577 + \varepsilon$$

Berdasarkan pada Tabel 6 juga dapat dijelaskan hubungan antar variabel sebagai berikut:

a. Pengaruh BM terhadap PDRB

Hasil dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan BM, akan meningkatkan PDRB. Kenaikan sebesar Rp1 miliar akan meningkatkan PDRB sebesar Rp15,35 miliar. Belanja modal yang

dialokasikan pemerintah pusat dalam rangka menjalankan asas tugas pembantuan merupakan pelengkap dari akumulasi belanja modal pemerintah daerah, selain dana yang bersumber dari APBN melalui mekanisme dana perimbangan. Untuk membiayai kegiatan fisik di daerah, pemerintah mengalokasikan DAK Fisik yang penggunaannya berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

Penggunaan DAK ditujukan untuk menghasilkan *output* fisik tertentu yang sesuai dan berpedoman pada petunjuk teknis dari K/L terkait. Artinya, menutup kemungkinan penggunaan di luar ketentuan yang ada. Meskipun dalam penggunaannya tidak dapat tumpang tindih antara DAK dan dana TP, namun penggunaan dana TP dapat menambah kualitas *output* fisik. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas *output*-nya melalui pendanaan dana TP.

b. Pengaruh BBS terhadap PDRB

Hasil dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan BBS, akan mengurangi PDRB. Kenaikan sebesar Rp1 miliar akan mengurangi PDRB sebesar Rp45,1 miliar. Hasil ini tentunya berlawanan dengan tujuan kebijakan pemberian bantuan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin/tidak mampu.

Berdasarkan karakteristiknya, belanja bantuan sosial ditujukan bagi kelompok masyarakat tertentu (miskin) atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat memengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya atau kejadian atau peristiwa yang berdampak pada meningkatnya rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan (KPPN Metro, 2018).

Beberapa hal yang dapat menjelaskan hasil dari persamaan regresi ini antara lain: pertama, belanja bantuan sosial tidak dialokasikan untuk rumah tangga miskin/tidak mampu yang seharusnya menjadi sasaran program. Hal ini diakui oleh Menteri Keuangan mengenai belum efektifnya pemerintah daerah dalam melakukan pemuktahiran data rumah tangga miskin. Padahal hal ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial. Pemerintah bahkan telah menyiapkan sistem *reward and punishment* bagi upaya pemerintah untuk menyediakan data dinamis mengenai rumah tangga miskin. Di era otonomi dan desentralisasi ini, tugas pemuktahiran data tidak hanya dimiliki pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah (Republika, 2020). Kedua, penggunaan variabel independen BBS dalam model ini memang tidak memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen yaitu PDRB. Pengaruh variabel BBS lebih tepat dikaitkan langsung dengan indikator tingkat kemiskinan suatu daerah, karena pada dasarnya BBS memang ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin/tidak mampu. Oleh karenanya diperlukan permodelan lain untuk

menggambarkan hubungan BBS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu untuk menggambarkan efektivitas pengalokasianya di daerah.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Kebijakan belanja K/L dalam rangka melaksanakan asas tugas pembantuan di daerah khususnya melalui alokasi belanja modal dan belanja barang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi modal (investasi) di daerah. Peningkatan alokasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan PDRB daerah.

Berdasarkan hasil permodelan pengaruh belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial terhadap PDRB, menunjukkan variabel belanja barang tidak memenuhi uji multikolinearitas, sehingga hasil permodelan setelah uji asumsi klasik adalah PDRB sebagai variabel dependen, dan variabel independennya adalah belanja modal dan belanja bantuan sosial. Hasil regresi atas model tersebut menunjukkan bahwa kenaikan belanja modal, akan meningkatkan PDRB. Kenaikan sebesar Rp1 miliar akan meningkatkan PDRB sebesar Rp15,35 miliar. Untuk variabel belanja bantuan sosial, kenaikan BBS, akan mengurangi PDRB. Kenaikan sebesar Rp1 miliar akan mengurangi PDRB sebesar Rp45,1 miliar.

5.2. Saran

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan asas tugas pembantuan, pemerintah perlu meningkatkan belanja modal di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah pusat juga perlu mendorong agar pemerintah daerah dapat secara reguler melakukan pemuktakhiran data rumah tangga miskin agar bantuan sosial yang diberikan dapat tersalurkan pada rumah tangga miskin/tidak mampu.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna karena hanya terbatas pada variabel yang diamati saja yaitu variabel independen yaitu belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial dan variabel dependen yaitu PDRB di tingkat provinsi. Penyesuaian terhadap variabel dependen, seperti alokasi belanja modal di tingkat provinsi atau rincian atas variabel independen belanja modal dan belanja barang yang dialokasikan langsung untuk meningkatkan kegiatan ekonomi (seperti pembangunan jembatan, jalan, pasar) diharapkan dapat memberikan hasil pengamatan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Anasmen. 2009. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat: 2000-2006 Tesis.. Universitas Indonesia, Depok
- Badan Pusat Statistik. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015-2019
- _____. 2019. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Pengeluaran 2014-2018
- Ekananda, Makyus (2016). Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. 2014. Dasar-Dasar Penyusunan APBN. Edisi II. Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu RI
- _____. Peta Data APBN.
- _____. PMK Nomor 102 tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran
- KPPN Metro. 2018. Belanja Bantuan Sosial (57). Informasi web dalam <http://kppnmetro.org/belanja-bantuan-sosial-57/> diakses tanggal 22/10/2020
- Kuncoro, M. 2011. Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi Edisi IV. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. ISBN: 978-602-1286-64-7
- Latip, Dedi. 2009. Analisa Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Propinsi Tahun 2000-2006. Tesis. Universitas Indonesia
- Republika. 2020. Sri Mulyani Dorong Pemda Update Data Kemiskinan dalam <https://republika.co.id/berita/qdk3qr370/sri-mulyani-dorong-pemda-update-data-kemiskinan> diakses tanggal 23/10/2020
- Sita, Prima Rosita Arini. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Kalimantan. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.26486/jramb.v2i2.284>
- Solow, Robert M. 1987. Growth Theory and After. Prize Lecture. NobelPrize.org <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1987/solow/lecture/> diakses tanggal 22/10/2020
- Widada, R., Hakim, D. B., & Mulatsih, S. 2019. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Di Indonesia. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 6(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25095

ANALISIS PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PROVINSI SEBELUM DAN SETELAH OTONOMI DAERAH

The Analysis of Provincial Financial Capacity Mapping Before and After Autonomy Regional

Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

e-mail: ratna.christianingrum@dpr.go.id dan ade.aida@dpr.go.id

Abstract

This analysis aims to study the implementation of regional autonomy in terms of the regional financial capacity before the existence of regional autonomy and to compare the regional financial capabilities after the existence of regional autonomy. The parameters used are the calculation and analysis of PAD performance using the index method, the quadrant method, and the difference test.

The results of the analysis show that after regional autonomy the financial capacity of the region has decreased, as indicated by the number of provinces that have high IKK has decreased from before regional autonomy. In addition, based on the test results, it is found that the implementation of decentralization does not improve the financial capacity of provinces in Indonesia. The map of the financial capacity of the provinces in Indonesia before and after regional autonomy also shows that changes in the regional capacity map are significant. A total of 15 provinces have a decline in the classification of their regional financial capacity. Meanwhile, only 2 provinces have an increase in the classification of regional financial capacity. For this reason, the government encourages local governments to be able to innovate in finding potential sources of regional income.

Keywords: *regional financial capabilities, autonomy regional, index and quadrant method, difference test*

1. Pendahuluan

Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menandakan dimulainya era otonomi daerah. Dalam perkembangannya, peraturan perundungan yang menjadi dasar penerapan otonomi daerah mengalami

pembaharuan. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah, menggantikan undang-undang sebelumnya.

Otonomi daerah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Penerapan otonomi daerah ini membawa implikasi adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dalam berbagai bidang. Penerapan otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah membagi kewenangan dan fungsi antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah mengatur pembagian sumber daya keuangan antara pusat dan daerah. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah juga disertai dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat (Mahi, 2001).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, tujuan dari otonomi daerah adalah otonomi yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggungjawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat di daerah yang akan memberi peluang untuk koordinasi lokal.

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek *multiplier* dari desentralisasi (Khusnaini, 2016). Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa sebelum era otonomi daerah, harapan pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak sendiri sangat sulit untuk dilakukan. Ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat merupakan wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah.

Penerapan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan wewenang tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah. Sumber-sumber keuangan daerah digali melalui PAD. Dengan adanya penerimaan daerah melalui PAD, diharapkan pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan di daerah.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang lebih baik, maka diperlukan usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sendiri. Peningkatan kemampuan keuangan ini berupa peningkatan penerimaan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber yang sudah ada maupun menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang

ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Davey, 1988:95).

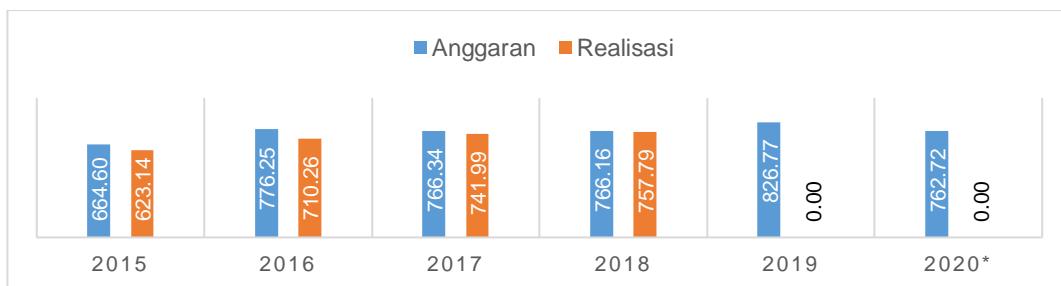
Kondisi saat ini berbanding terbalik dan masih jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah. Menurut Menteri Keuangan, ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1 persen. Sementara itu, kontribusi PAD hanya sekitar 12,87 persen (Nugraha, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa saat ini kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat (dana perimbangan).

Peningkatan PAD sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mampu untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Rendahnya penerimaan PAD dapat menjadi indikasi besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pemberian pembangunan.

Kriteria yang biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan PAD. Untuk itu, PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pemberian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat (Kusumah, 2001:264).

Melihat kondisi keuangan daerah di seluruh Indonesia pada era otonomi sangat berbeda dengan kondisi keuangan daerah sebelum berlakunya otonomi daerah. Bentuk dana perimbangan, khususnya dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk pemberian kegiatan otonomi daerah telah mengalir dan meningkat dari tahun ke tahun dalam jumlah yang relatif besar. Gambar 1 menunjukkan bahwa besaran TKDD cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2019. Peningkatan nilai TKDD dapat mengindikasikan besarnya kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri menjalankan kewenangannya di semua bidang kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan keagamaan (Nugraha, 2019).

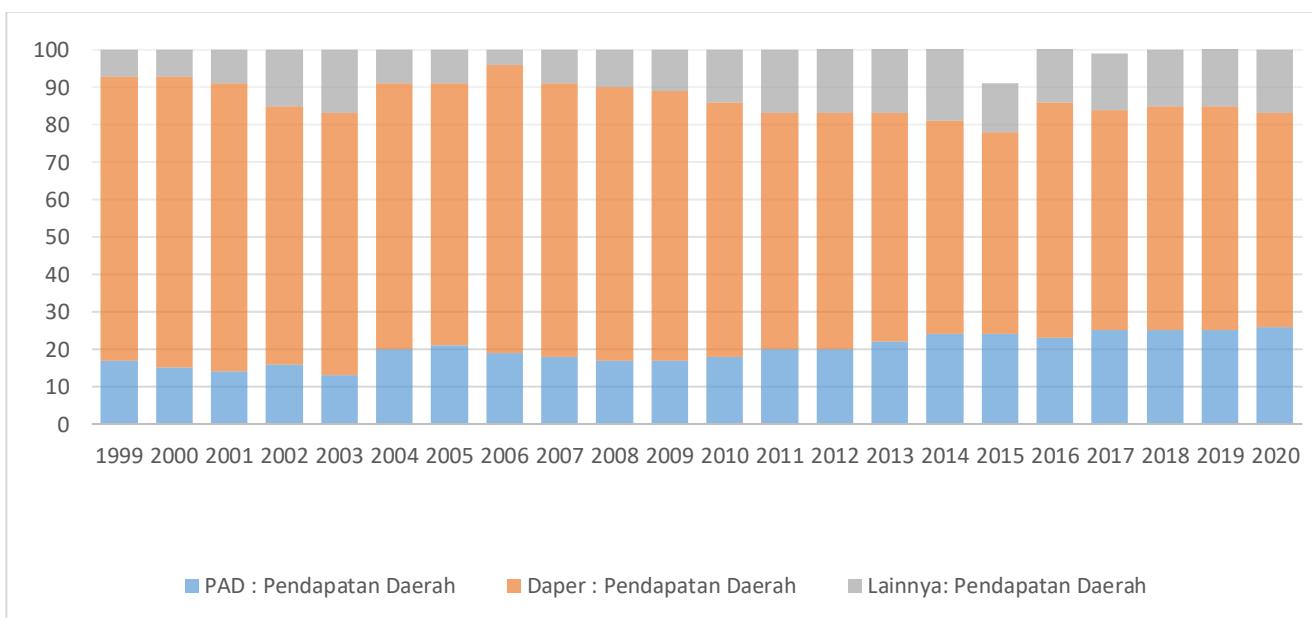
Gambar 1. Perkembangan TKDD Tahun Anggaran 2015-2020 (triliun rupiah)



Sumber: LKPP, UU APBN, PMK No. 35/PMK.07/2020

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK), bahwa rata-rata komposisi APBD tahun 1999-2019 adalah berasal dari PAD sebesar 25,66 persen, Dana Perimbangan sebesar 58,54 persen, dan Pendapatan lain-lain sebesar 15,81 persen (Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah selama hampir 22 tahun terakhir berada dalam tingkat yang masih rendah. Ketergantungan daerah terhadap pusat masih cukup besar yang ditandai dengan lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari transfer pusat (dana perimbangan) baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Gambar 2. Komposisi APBD Daerah (persen)



Ket: *) Data Anggaran

Sumber: DJPK, 2020

Otonomi daerah sudah dilaksanakan selama dua dekade, sehingga perlu dilakukan evaluasi tentang pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi tentang pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari kemampuan keuangan daerah sebelum penerapan otonomi daerah dan membandingkannya dengan kemampuan keuangan daerah setelah adanya otonomi daerah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Hruza (2015) menjelaskan bahwa otonomi merupakan suatu keadaan tidak bergantung kepada siapa pun atau secara populis dapat dimaknai sebagai kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur sistem administrasi birokrasi, keuangan serta kebijakan publiknya dalam batasan-batasan yang

telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sementara sebagaimana termuat dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Otda) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tujuan pemberian otonomi sesuai penjelasan terhadap Pasal 1 huruf h, yakni peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, tujuan lain dari diselenggarakan otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lebih ditekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Mardiasmo, 2004).

Otonomi daerah merupakan suatu perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan merupakan penerapan konsep teori *“areal division of power”* yang membagi kekuasaan secara vertikal, yaitu daerah di bawahnya. Konsep desentralisasi atau otonomi daerah merupakan konsekuensi dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep tersebut merupakan sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akomodatif terhadap inisiatif dan tanggung jawab masyarakat daerah (Prabowo, 2013). Untuk melaksanakan otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Keempat elemen tersebut adalah desentralisasi politik, derajat desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik (Wulandari, 2001). Dari keempat elemen tersebut, derajat desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam membangun daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah (Kamaroelah, 2017). Kemudian menurut Halim (2009) dalam Sijabat dkk, 2013, dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah *self supporting* di dalam bidang keuangan. Untuk mewujudkan hal itu, maka implementasi kebijakan desentralisasi harus disertai dengan penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Artinya daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya.

2.2. Keuangan Daerah

Dalam agenda penyelenggaraan pemerintahan di daerah faktor keuangan menjadi hal yang sangat penting. Keuangan daerah menempati posisi utama dalam kemajuan suatu daerah serta bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan di daerah tersebut. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada posisi tingkat keotonomian suatu daerah karena dengan kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak, mengurus rumah tangganya sendiri (Enceng dan Yuli, 2014).

Keuangan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah pada intinya mencangkup dua hal, yaitu hak daerah dan kewajiban daerah. Segala hal yang secara hukum merupakan milik daerah dan dapat dijadikan sebagai milik pemerintah merupakan hak daerah. Sementara sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan adalah kewajiban daerah.

Sebagaimana tercantum dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah meliputi: a) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) penerimaan daerah; d) pengeluaran daerah; e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut Halim (2001) meliputi: pertama, keuangan daerah yang dikelola langsung, yang terdiri atas APBD serta barang-barang inventaris milik daerah; kedua, kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah merupakan bagian sumber daya yang dominan dalam menyokong kemampuan otonomi daerah. Tentunya hampir setiap kegiatan pemerintah daerah membutuhkan bantuan keuangan atau biaya. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan satu variabel yang penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah pada umumnya. Untuk itu, dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain: *transparent* (transparansi), *efficient* (efisien), *effective* (efektif), *accountable* (akuntabel), dan *participative* (partisipatif)

2.3. Kinerja Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah dalam mengetahui tingkat target capaian keuangan daerah tersebut. Untuk itu, kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran tersebut tentunya digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan hasil yang direncanakan.

Kinerja (*performance*) sendiri diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Tunggal, 1994). Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas yang perolehan hasil penilaian lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Selain itu, hasil pengukuran kinerja juga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan program selanjutnya ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya terdapat 2 hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja. Kinerja anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan anggaran kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali daerah selaku manajer eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:19)

Dalam pasal 21 Permendagri No. 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kemudian PP No. 8 Tahun 26 pasal 1 ayat 3, mendefinisikan laporan kinerja sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Sehingga ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD yang ditetapkan, tercermin dari bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

2.4. Indeks Kemampuan Keuangan

Untuk melihat kemampuan keuangan daerah, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan melihat indeks kemampuan keuangan. Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas, dan indeks *share*. Adapun rumus indeks kemampuan keuangan adalah sebagai berikut (Halim, 2004:24):

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Di mana:

X_G = Indeks pertumbuhan atau *growth* (PAD)

X_E = Indeks elastisitas (Belanja Modal terhadap PAD)

X_S = indeks *share* (PAD terhadap APBD)

Semakin tinggi nilai indeks IKK, maka semakin besar tingkat kemampuan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kemungkinan daerah untuk mandiri secara keuangan.

Kemudian, rumus indeks pertumbuhan atau *growth* (G) adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 24):

$$G = \frac{(PAD_i - PAD_{i-1})}{PAD_{i-1}}$$

$$X_G = \frac{G_t - G_{minimum}}{G_{maksimum} - G_{minimum}}$$

Semakin tinggi nilai indeks *growth* mengindikasikan terjadi peningkatan PAD, sementara semakin rendah nilai indeks *growth*, maka terjadi penurunan PAD di daerah tersebut.

Sedangkan rumus indeks elastisitas (E) adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 24):

$$E = \frac{Belanja\ Modal}{PAD}$$

$$X_E = \frac{E_t - E_{minimum}}{E_{maksimum} - E_{minimum}}$$

Semakin tinggi nilai indeks elastisitas dapat diartikan semakin tingginya kontribusi PAD dalam membiayai belanja pembangunan, begitupun sebaliknya.

Sedangkan rumus indeks *share* (S) adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 24):

$$S = \frac{PAD}{APBD}$$

$$X_S = \frac{S_t - S_{minimum}}{S_{maksimum} - S_{minimum}}$$

Semakin tinggi nilai *share* menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD dalam APBD, sementara semakin rendah nilai *share* maka kontribusi PAD dalam APBD juga semakin rendah. Kemudian berikut kriteria dari tingkat kemampuan keuangan daerah:

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,43	Sedang
0,44 – 1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas, 2003

2.5. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Pemetaan kemampuan keuangan daerah digunakan sebagai alat ukur kesiapan daerah dalam menjalankan kewenangannya. Pemetaan juga dijadikan dasar strategi pengembangan sektor potensial di daerah dalam mendorong kemandirian. Untuk menampilkan peta kemampuan keuangan daerah, salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode kuadran (Bappenas, 2003). Dalam metode kuadran, masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *growth* dan *share*. Pemilihan indikator *share* dan *growth* yang dikombinasikan dalam metode kuadran, sering digunakan oleh pemerintah untuk melakukan analisis perbandingan kinerja publik khususnya terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal (Bappenas, 2003). Penggunaan metode kuadran ini, sering disebut sebagai salah satu upaya terbaik untuk menampilkan peta kemampuan keuangan daerah melalui aspek nilai besaran *share* atau kontribusi pendapatan daerah terhadap total belanja APBD serta nilai *growth* untuk melihat pertumbuhan komponen pendapatan daerah dalam APBD (Haryanto, 2017). Kondisi di masing-masing kuadran dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

Kuadran	Kondisi
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> disertai dengan nilai <i>growth</i> yang tinggi
II	Kondisi ini belum ideal, namun daerah memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah, namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD memiliki peluang mengecil karena pertumbuhan PAD yang kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah
IV	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber: Bappenas, 2003 (diolah)

2.6. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah

Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk desentralisasi fiskal di

mana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi (Setiaji dan Adi, 2007). Kesiapan daerah menjadi faktor penting yang cukup menentukan keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan yakni kemampuan keuangan daerah (Adi, 2012). Hal tersebut tentunya membawa konsekuensi adanya perbedaan kemampuan keuangan daerah. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Efendi dan Wuryanti, 2011).

Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar-kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro, 2007).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiaji dan Adi (2007) terkait dengan kemampuan keuangan daerah, yang melihat kesiapan daerah dengan membuat peta kemampuan keuangan daerah (di kabupaten dan kota) menggunakan metode kuadran (matriks). Indikator yang digunakan dalam pengukuran tersebut yakni pertumbuhan (*growth*), PAD, dan peran/kontribusi (*share*) PAD membiayai belanja daerah. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa adanya perubahan kemampuan keuangan secara umum yang ditunjukkan dalam peta kemampuan keuangan kabupaten dan kota mengalami pergeseran yang cukup mencolok, yakni dalam era otonomi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Namun demikian, pergeseran ini lebih banyak disebabkan perubahan *growth* PAD yang sangat signifikan. *Share* PAD terhadap belanja justru tidak mengalami peningkatan, realitas yang terjadi justru hal yang sebaliknya, *share* PAD terhadap belanja lebih rendah dibanding setelah otonomi.

Sementara berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bappenas (2003) terkait kemampuan keuangan pemerintahan provinsi ditinjau dari kinerja PAD pada periode tahun 2000-2002, dengan menggunakan ukuran elastisitas, *share*, *growth*, pemetaan dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran dan metode indeks. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) indikator kinerja PAD, secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibanding propinsi-propinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI); 2) provinsi yang mempunyai sumber daya alam melimpah tidak serta merta memiliki kinerja PAD yang baik; 3) berbagai upaya telah dilakukan daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mendorong potensi ekonomi lokal, melalui peningkatan PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimilikinya; 4) adanya peningkatan PAD di seluruh provinsi dalam era otonomi daerah.

Kemudian berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Susanto (2014) terkait kemampuan keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diuji dengan instrumen analisis kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan dan analisis kerja PAD, yang merupakan pengukuran saham dan pertumbuhan, sehingga diklasifikasikan hasilnya dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran. Penelitian ini menarik beberapa kesimpulan yaitu: 1) secara umum, kontribusi PAD (*share*) terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 2003-2007 rendah, meskipun pertumbuhan PAD yang tinggi; 2) didasarkan pada pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), Provinsi NTB berada di indeks skala 0,541. Selain itu, klasifikasi berdasarkan tingkat kriteria kemampuan keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah di Propinsi NTB pada 2003-2007 adalah propinsi dengan kemampuan finansial yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2017) yang memfokuskan analisis pada perbandingan daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan non sumber daya alam (non-SDA), melalui metode kuadran dengan pendekatan analisis *share* dan *growth* dari masing-masing daerah. Dari hasil analisis *share*, disimpulkan bahwa daerah penghasil SDA memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan daerah non-SDA. Sebaliknya dari analisis *growth*, daerah non-SDA memiliki nilai lebih besar dibandingkan daerah penghasil SDA. Dari analisis metode kuadran, hanya Kabupaten Badung yang masuk di kuadran I. Seluruh daerah non-SDA masuk di kuadran II, sementara keseluruhan daerah penghasil SDA masuk di kuadran III minus Kabupaten Indragiri Hilir. Di dalam kuadran IV, dari seluruh lokus penelitian hanya ada Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah wajib memfokuskan kebijakan Transfer ke Daerah kepada daerah-daerah yang berada kuadran IV sehingga ke depannya mereka dapat melakukan berbagai perbaikan menuju kondisi yang lebih baik.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang diperoleh dari seluruh provinsi di Indonesia. Data yang digunakan sebelum penerapan otonomi daerah merupakan data seluruh provinsi di Indonesia pada Tahun Anggaran 1995/1996 hingga 1999/2000. Sedangkan data yang digunakan setalah penerapan otonomi daerah merupakan data seluruh provinsi di Indonesia pada tahun anggaran 2015 hingga 2019. Untuk melakukan perbandingan bagi provinsi baru atau provinsi yang belum ada sebelum era otonomi daerah, maka kondisi keuangan daerah sebelum otonomi daerah diestimasi dari provinsi induk. Misalnya Provinsi Kalimantan Utara, maka kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara sebelum adanya otonomi daerah diestimasi dengan menggunakan kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Proses estimasi ini menggunakan asumsi bahwa kondisi keuangan sebelum adanya otonomi daerah dari provinsi

baru adalah sama dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dari provinsi induk.

Tabel 3. Provinsi Baru, Provinsi Induk, dan Dasar Hukum Pembentukan Provinsi

No	Provinsi Pemekaran	Provinsi Induk	Dasar Hukum
1	Maluku Utara	Maluku	UU No. 46 Tahun 1999
2	Banten	Jawa Barat	UU No. 23 Tahun 2000
3	Bangka Belitung	Sumatera Selatan	UU No. 27 Tahun 2000
4	Gorontalo	Sulawesi utara	UU No. 38 Tahun 2000
5	Kepulauan Riau	Riau	UU No. 25 Tahun 2002
6	Papua Barat	Papua	UU No. 45 Tahun 1999 dan PP No. 24 Tahun 2007
7	Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan	UU No. 26 Tahun 2004
8	Kalimantan Utara	Kalimantan Timur	UU No. 20 Tahun 2012

Sumber: diolah dari berbagai sumber

3.2. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan statistik deskriptif dan uji beda.

3.2.1. Statistik Deskriptif

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menggambarkan kemampuan keuangan daerah, adalah dengan melihat indeks kemampuan keuangan. Tahap analisis kemampuan keuangan daerah yakni menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan kemudian mengklasifikasikan dengan metode IKK. Adapun metode IKK merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas, dan indeks *share*. Untuk menyusun indeks dari ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Pemilihan indikator *share* dan *growth* yang dikombinasikan dalam metode kuadran digunakan untuk melakukan analisis perbandingan kinerja publik khususnya terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penggunaan metode kuadran ini, sering disebut sebagai salah satu upaya terbaik untuk menampilkan peta kemampuan keuangan daerah melalui aspek nilai besaran *share* atau kontribusi pendapatan daerah terhadap total belanja APBD serta nilai *growth* untuk melihat pertumbuhan komponen pendapatan daerah dalam APBD (Haryanto, 2017).

3.2.2. Uji Beda

Uji beda dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kondisi keuangan daerah sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah. Adapun langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan uji normalitas data. Uji normalitas ini diperlukan untuk menentukan metode apa yang akan digunakan untuk melakukan uji beda. Apabila dari uji normalitas diperoleh bahwa data sebelum dan sesudah otonomi daerah berdistribusi normal, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode *independent sample t-test*. Namun apabila salah satu dari kelompok data atau kedua kelompok data tidak mengikuti distribusi normal, maka data akan dianalisis dengan menggunakan *nonparametric test*.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov Smirnov. Uji ini tepat digunakan untuk analisis dengan data yang cukup banyak. Apabila jumlah data di masing-masing kelompok jumlahnya tidak lebih dari 20 sampel, maka uji Shapiro Wilks lebih tepat untuk digunakan (Park, 2008).

b) *Independent Sample T-Test*

Uji homogenitas varian diperlukan untuk menentukan metode analisis yang akan digunakan. Apabila hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa varian dari data sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah adalah sama maka metode analisis yang akan digunakan adalah uji t dengan asumsi variannya sama. Sedangkan apabila hasil uji menunjukkan bahwa varian dari kedua kelompok, maka metode analisis yang digunakan adalah uji t dengan asumsi varian tidak seragam (Gravetter & Wallnau, 2013).

c) *Nonparametric Test*

Data akan dianalisis dengan metode uji Mann Whitney (MacFarland & Yates, 2017).

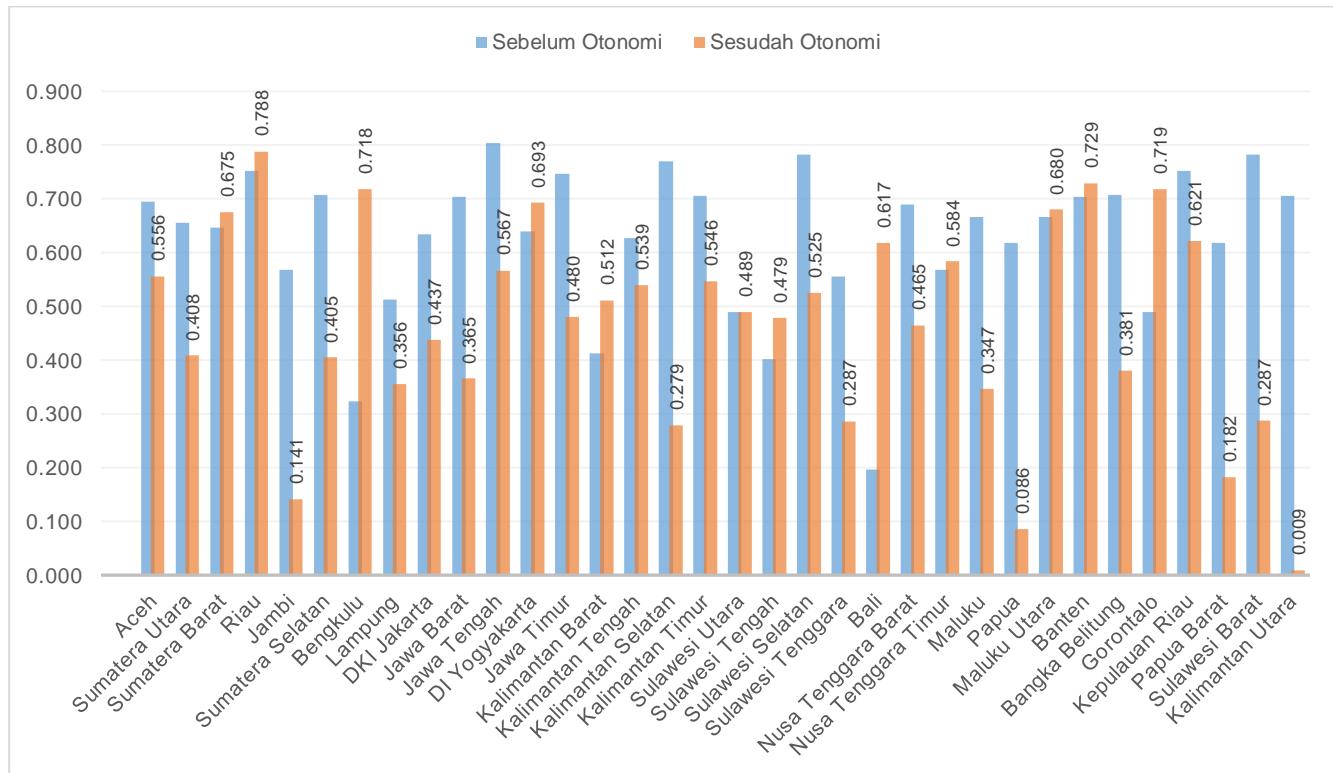
4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Indeks Kemampuan Keuangan

4.1.1. Indeks *Growth*

Indeks *growth* merupakan salah satu indikator IKK. Semakin tinggi nilai indeks *growth* mengindikasikan terjadi peningkatan PAD. Hal ini memungkinkan daerah untuk bisa mandiri secara keuangan. Apabila semakin rendah nilai indeks *growth*, maka terjadi penurunan PAD di daerah tersebut.

Gambar 3. Indeks Growth Provinsi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah



Sumber: Data diolah

Gambar 3 menunjukkan nilai indeks *growth* provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan otonomi daerah. Sebelum penerapan otonomi daerah, rata-rata indeks *growth* provinsi-provinsi di Indonesia sebesar 0,626 dengan standar deviasi sebesar 0,139. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang memiliki nilai indeks *growth* yang paling kecil, yaitu sebesar 0,323 dengan standar deviasi sebesar 0,175. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan PAD yang terendah sebelum adanya otonomi daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki ketergantungan fiskal tertinggi di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Namun setelah adanya otonomi daerah, Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan pertumbuhan PAD-nya secara signifikan. Rata-rata indeks *growth* Provinsi Bengkulu setelah adanya otonomi daerah sebesar 0,718 dengan standar deviasi sebesar 0,155. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah, Provinsi Bengkulu dapat menggali potensi daerah dengan lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan PAD Provinsi Bengkulu.

Sebelum otonomi daerah, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki rata-rata nilai indeks *growth* tertinggi di Indonesia. Nilai indeks *growth* Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,803 dengan standar deviasi sebesar 0,169. Hal ini dapat diartikan bahwa sebelum adanya otonomi daerah, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki kemampuan untuk menggali PAD.

Namun setelah adanya otonomi daerah, nilai indeks *growth* Provinsi Jawa Tengah justru mengalami penurunan. Nilai rata-rata indeks *growth* setelah otonomi daerah hanya sebesar 0,567 dengan standar deviasi sebesar 0,396. Hal ini dapat diartikan bahwa setelah otonomi daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan kemampuan dalam menggali potensi di daerahnya. Yang pada akhirnya, terjadi penurunan PAD yang diterima.

Setelah otonomi daerah, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan nilai indeks *growth* yang terendah di Indonesia. Nilai rata-rata indeks *growth* Kalimantan Utara hanya sebesar 0,009 dengan standar deviasi sebesar 0,004. Hal ini terjadi karena Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia. Selama ini, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara masih terfokus dalam membangun sistem pemerintahan daerah dan kelengkapannya, sehingga belum menggali potensi-potensi di daerahnya.

Nilai indeks *growth* tertinggi setelah adanya otonomi daerah dimiliki oleh Provinsi Riau. Rata-rata nilai indeks *growth* Provinsi Riau sebesar 0,788 dengan standar deviasi sebesar 0,301. Nilai rata-rata indeks *growth* Provinsi Riau sebelum dan sesudah otonomi daerah relatif sama. Pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki kemampuan untuk menggali potensi daerah jauh sebelum penerapan otonomi daerah. Hal ini terlihat dari tingginya nilai indeks *growth* sebelum ataupun sesudah otonomi daerah. Sehingga bagi provinsi Riau, penerapan otonomi daerah tidak memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal daerah.

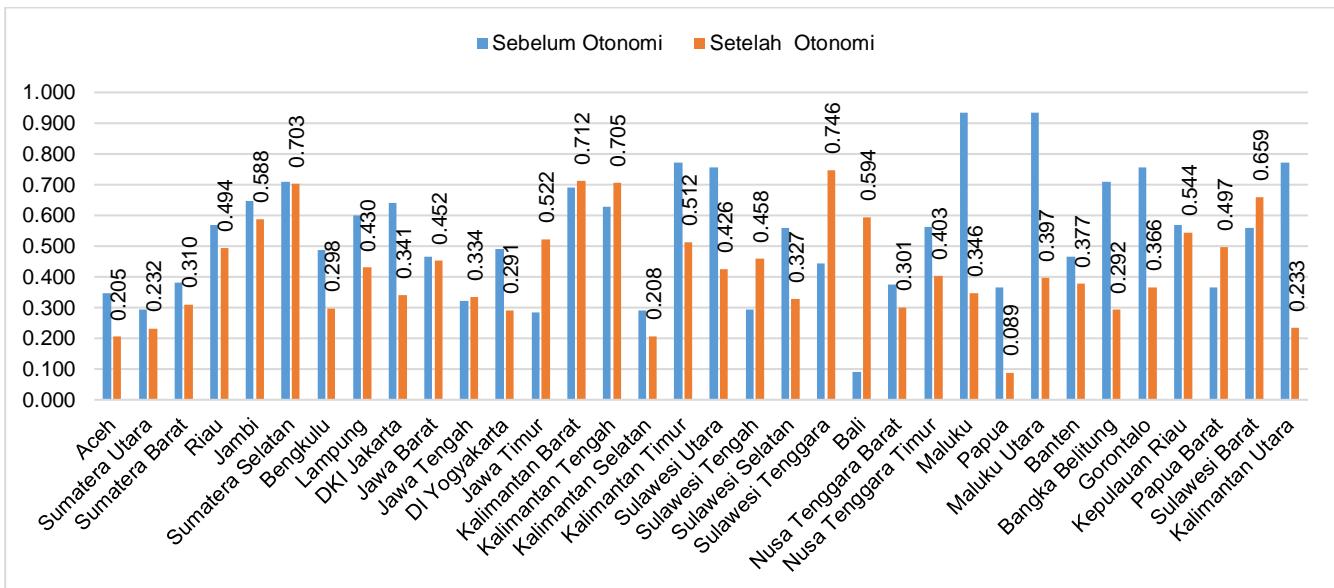
4.1.2. Indeks *Share*

Indeks *share* merupakan salah satu indikator dalam IKK. Semakin tinggi nilai *share* menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD dalam APBD. Semakin tinggi nilai indeks *share*, maka semakin tinggi kemungkinan daerah untuk mandiri secara keuangan. Demikian juga semakin rendah nilai indeks *share*, maka akan semakin rendah peluang daerah untuk mandiri secara keuangan.

Gambar 4 menunjukkan nilai indeks *share* dari provinsi-provinsi di Indonesia setelah adanya otonomi daerah mengalami penurunan. Sebanyak 25 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki indeks *share* yang lebih rendah dari sebelum diterapkannya otonomi daerah. Sebelum era otonomi daerah, Provinsi Maluku memiliki rata-rata nilai indeks *share* yang tertinggi di Indonesia. Nilai rata-rata indeks *share* Provinsi Maluku mencapai 0,934 dengan standar deviasi sebesar 0,072. Hal ini dapat mengindikasikan tingginya kontribusi PAD dalam APBD Provinsi Maluku. Hal ini dapat diartikan bahwa Provinsi Maluku memiliki kemandirian secara keuangan. Namun setelah adanya otonomi daerah, nilai indeks *share* Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan secara signifikan. Nilai rata-rata indeks *share* Provinsi Maluku setelah otonomi daerah sebesar 0,346 dengan standar deviasi sebesar 0,33. Sedangkan rata-rata nilai indeks *share* Provinsi Maluku Utara mencapai 0,397 dengan standar deviasi sebesar 0,137. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD dalam APBD Provinsi Maluku dan

Maluku Utara mengalami menurun secara signifikan dibandingkan dengan sebelum adanya otonomi daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya otonomi daerah, justru membuat pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Gambar 4. Indeks Share Provinsi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah



Sumber: Data diolah

Sebelum adanya otonomi daerah, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan rata-rata nilai indeks *share* terendah di Indonesia. Nilai indeks *share* Provinsi Bali hanya sebesar 0,09 dengan standar deviasi sebesar 0,066. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan kontribusi PAD dalam APBD Provinsi Bali sangat rendah. Namun dengan adanya otonomi daerah, kontribusi PAD terhadap APBD Provinsi Bali mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini terlihat dari naiknya nilai rata-rata indeks *share*. Setelah otonomi daerah, rata-rata nilai indeks *share* Provinsi Bali meningkat menjadi 0,594 dengan standar deviasi sebesar 0,503. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya otonomi daerah membuat pemerintah Provinsi Bali lebih handal dalam mengelola potensi daerah. Pemerintah Provinsi Bali lebih mengandalkan penerimaan PAD sebagai sumber pembiayaan APBD.

Setelah penerapan otonomi daerah, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan rata-rata nilai indeks *share* tertinggi di Indonesia. Rata-rata nilai indeks *share* Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 0,746 dengan standar deviasi sebesar 0,277. Hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD Provinsi Sulawesi Tenggara cukup tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mandiri secara keuangan. Nilai rata-rata indeks *share* Provinsi Sulawesi Tenggara setelah otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai indeks *share*

nya sebelum adanya otonomi daerah. Namun secara statistik rata-rata nilai indeks *share* Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berbeda secara signifikan.

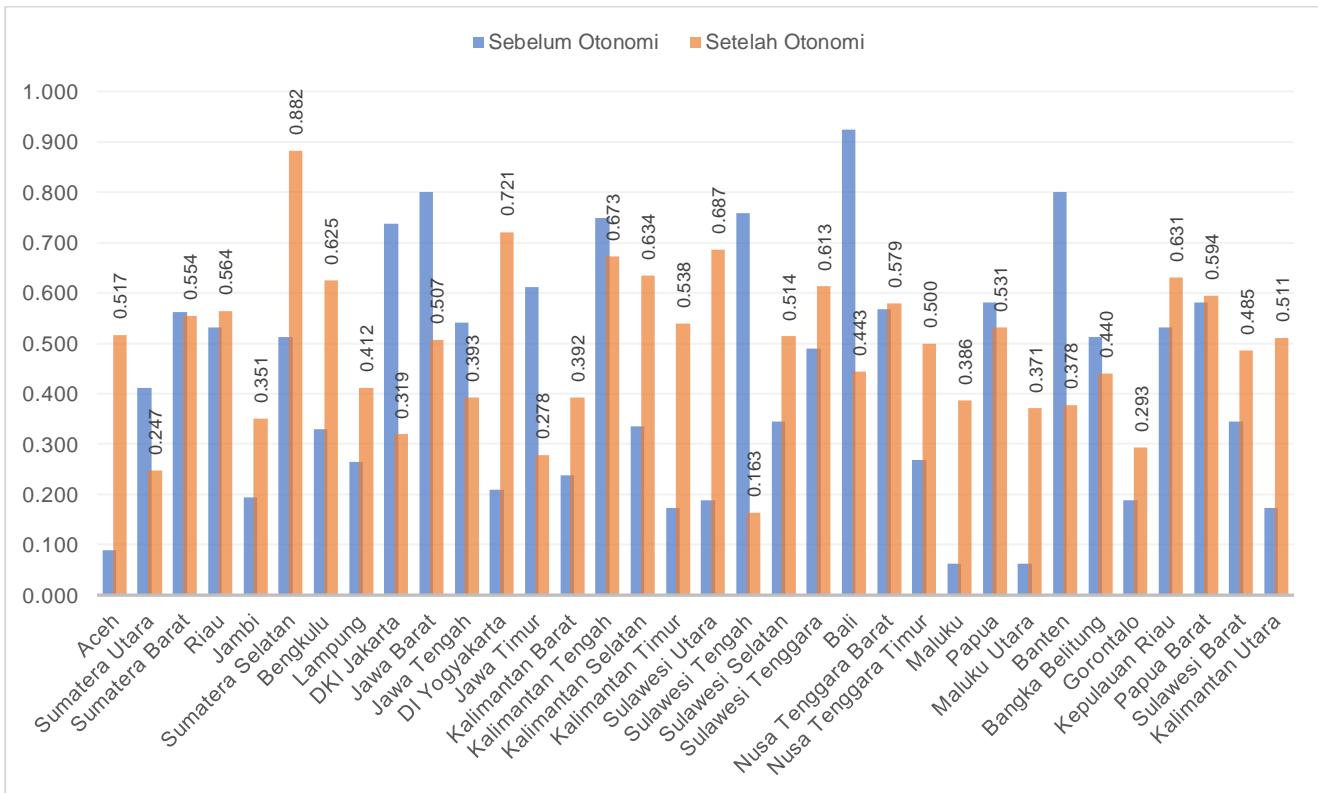
Setelah otonomi daerah, rata-rata nilai indeks *share* Provinsi Papua merupakan yang terendah di Indonesia. Hal ini berarti bahwa PAD di Provinsi Papua memiliki kontribusi yang kecil terhadap APBD. Apabila dibandingkan dengan periode sebelum otonomi daerah, rata-rata nilai indeks *share* Provinsi Papua setelah otonomi daerah jauh lebih rendah. Secara statistik pun rata-rata nilai indeks *share* di kedua periode berbeda secara signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya otonomi daerah justru membuat Provinsi Papua memiliki ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Hal ini sangat mungkin terjadi karena Provinsi Papua mendapatkan Dana Otonomi Khusus dari APBN. Hal ini menyebabkan banyak belanja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus. Selain itu banyaknya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Papua membuat Pemerintah Daerah Papua menjadi enggan untuk menggali potensi-potensi daerah.

4.1.3. Indeks Elastisitas

Indeks elastisitas merupakan salah satu indikator IKK. Apabila semakin tinggi nilai indeks elastisitas dapat diartikan semakin tingginya kontribusi PAD dalam membiayai belanja pembangunan.

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa secara rata-rata nilai indeks elastisitas setelah penerapan otonomi daerah meningkat menjadi 0,492, ini artinya kontribusi PAD dalam membiayai belanja pembangunan lebih besar dari sebelum adanya otonomi daerah. Sebelum penerapan otonomi daerah, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan rata-rata nilai indeks elastisitas tertinggi di Indonesia. Nilai rata-rata indeks elastisitas Provinsi Bali sebesar 0,924 dengan standar deviasi sebesar 0,059. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah Provinsi Bali banyak menggunakan PAD untuk membiayai pembangunan. Namun setelah adanya otonomi daerah rata-rata indeks elastisitas di Provinsi Bali justru mengalami peningkatan secara signifikan. Rata-rata indeks elastisitas setelah otonomi daerah turun menjadi 0,443 dengan standar deviasi sebesar 0,246. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pada era otonomi daerah penggunaan PAD oleh pemerintah Provinsi Bali untuk membiayai belanja pembangunan mengalami penurunan.

Gambar 5. Indeks Elastisitas Provinsi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah



Sumber: Data diolah

Sebelum adanya otonomi daerah, Provinsi Maluku memiliki rata-rata nilai indeks elastisitas terendah di Indonesia. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kontribusi PAD dalam membiayai belanja pembangunan sangat rendah. Namun setelah adanya otonomi daerah, rata-rata indeks elastisitas Provinsi Maluku dan Maluku Utara mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa adanya otonomi daerah, menyebabkan pemerintah daerah lebih berani untuk menggunakan PAD untuk membiayai belanja pembangunan.

Setelah otonomi daerah, rata-rata nilai indeks elastisitas Provinsi Sumatera Selatan merupakan nilai tertinggi di Indonesia. Nilai ini meningkat signifikan dibandingkan dengan nilai indeks elastisitas sebelum otonomi daerah. Peningkatan ini dapat mengindikasikan peningkatan peran PAD dalam membiayai pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan nilai indeks elastisitas terendah ditempati oleh Provinsi Sumatera Utara. Walaupun secara nilai, indeks elastisitas setelah penerapan otonomi daerah mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum otonomi daerah. Namun penurunan ini tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat diartikan bahwa desentralisasi tidak memberikan pengaruh pada pola penggunaan PAD di Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, kontribusi PAD dalam membiayai belanja cukup kecil.

4.1.4. IKK

Tabel 4 di bawah ini menunjukkan nilai IKK provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dapat dilihat bahwa 91,18 persen provinsi di Indonesia memiliki IKK yang tinggi. Sedangkan 8,82 persen provinsi di Indonesia memiliki klasifikasi IKK sedang. Sebelum otonomi daerah tidak ada provinsi di Indonesia yang memiliki klasifikasi IKK yang rendah.

Tabel 4. Indeks Kemampuan Keuangan Provinsi-Provinsi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

No	Nama Provinsi	Sebelum Otonomi Daerah		Sesudah Otonomi Daerah	
		IKK	Keterangan	IKK	Keterangan
1	Prov. Aceh	0.377	SEDANG	0.426	SEDANG
2	Prov. Sumatera Utara	0.454	TINGGI	0.296	RENDAH
3	Prov. Sumatera Barat	0.530	TINGGI	0.513	TINGGI
4	Prov. Riau	0.617	TINGGI	0.615	TINGGI
5	Prov. Jambi	0.469	TINGGI	0.360	SEDANG
6	Prov. Sumatera Selatan	0.643	TINGGI	0.663	TINGGI
7	Prov. Bengkulu	0.380	SEDANG	0.547	TINGGI
8	Prov. Lampung	0.458	TINGGI	0.399	SEDANG
9	Prov. DKI Jakarta	0.671	TINGGI	0.366	SEDANG
10	Prov. Jawa Barat	0.657	TINGGI	0.441	TINGGI
11	Prov. Jawa Tengah	0.556	TINGGI	0.431	TINGGI
12	Prov. DI Yogyakarta	0.446	TINGGI	0.568	TINGGI
13	Prov. Jawa Timur	0.547	TINGGI	0.427	SEDANG
14	Prov. Kalimantan Barat	0.447	TINGGI	0.539	TINGGI
15	Prov. Kalimantan Tengah	0.668	TINGGI	0.639	TINGGI
16	Prov. Kalimantan Selatan	0.466	TINGGI	0.374	SEDANG
17	Prov. Kalimantan Timur	0.550	TINGGI	0.532	TINGGI
18	Prov. Sulawesi Utara	0.477	TINGGI	0.534	TINGGI
19	Prov. Sulawesi Tengah	0.484	TINGGI	0.367	SEDANG
20	Prov. Sulawesi Selatan	0.562	TINGGI	0.455	TINGGI
21	Prov. Sulawesi Tenggara	0.496	TINGGI	0.548	TINGGI
22	Prov. Bali	0.403	SEDANG	0.552	TINGGI
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	0.544	TINGGI	0.448	TINGGI
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	0.466	TINGGI	0.495	TINGGI
25	Prov. Maluku	0.554	TINGGI	0.360	SEDANG
26	Prov. Papua	0.522	TINGGI	0.235	RENDAH
27	Prov. Maluku Utara	0.554	TINGGI	0.483	TINGGI
28	Prov. Banten	0.657	TINGGI	0.495	TINGGI
29	Prov. Bangka Belitung	0.643	TINGGI	0.371	SEDANG
30	Prov. Gorontalo	0.477	TINGGI	0.459	TINGGI
31	Prov. Kepulauan Riau	0.617	TINGGI	0.599	TINGGI
32	Prov. Papua Barat	0.522	TINGGI	0.425	SEDANG
33	Prov. Sulawesi Barat	0.562	TINGGI	0.477	TINGGI
34	Prov. Kalimantan Utara	0.550	TINGGI	0.251	RENDAH

Sumber: Data diolah

Namun setelah otonomi daerah, jumlah provinsi yang memiliki klasifikasi IKK yang tinggi mengalami penurunan. Setelah otonomi daerah hanya 21 provinsi di Indonesia yang memiliki klasifikasi IKK tinggi. Nilai ini setara dengan 61,76 persen provinsi di Indonesia memiliki klasifikasi IKK tinggi. Sedangkan jumlah provinsi yang memiliki klasifikasi IKK sedang mengalami peningkatan setelah otonomi daerah, menjadi 10 provinsi (29,41 persen). Sedangkan sisanya atau sebanyak 3 provinsi di Indonesia memiliki klasifikasi IKK rendah.

Apabila dilakukan uji beda, diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,226 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai IKK sebelum otonomi daerah dengan setelah otonomi daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan otonomi daerah memberikan pengaruh terhadap kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia. Namun, penerapan otonomi daerah tidak meningkatkan kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia. Justru penerapan otonomi daerah meningkatkan kesenjangan kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia. Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah akan memiliki kemampuan keuangan yang baik. Namun bagi pemerintah daerah yang kurang mampu menggali dan mengembangkan potensi daerah akan bergantung kepada dana perimbangan. Setiaji dan Adi (2007) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa selama 4 tahun pasca pelaksanaan desentralisasi, daerah-daerah mempunyai ketergantungan yang lebih besar terhadap pemerintah pusat, sehingga daerah-daerah tidak mengalami peningkatan kemandirian. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Susilo dan Priyo (2007) yang menunjukkan adanya penurunan kemandirian daerah di era otonomi. Padahal dalam era otonomi yakni desentralisasi daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil, yang ditandai dengan meningkatnya PAD sebagaimana argumentasi Sidik (2002) maupun Bappenas (2003). Hasil penelitian Halim dan Abdullah (2004) secara implisit menjelaskan mengapa terjadi penurunan kemandirian. Hasil penelitian ini menunjukkan belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat (DAU). Konsekuensinya, daerah-daerah akan meningkatkan jumlah belanjanya secara signifikan, sebagai upaya untuk memperoleh transfer yang lebih besar (Gamkhar dan Oates, 1996).

4.1.5. Peta Kemampuan Keuangan

Tabel 5 menunjukkan peta kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa terjadi perubahan peta kemampuan keuangan daerah secara signifikan. Namun, perubahan yang terjadi merupakan kondisi yang kurang diinginkan. Sebanyak 15 provinsi yang mengalami penurunan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah, bahkan sebelum otonomi daerah 4 dari 15 provinsi tersebut memiliki kondisi kemampuan keuangan berada dalam kondisi paling ideal yaitu PAD memiliki kontribusi besar terhadap APBD. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa kemandirian daerah setelah desentralisasi tidak meningkat bahkan dapat dikatakan menurun. Dikatakan

menurun karena masih tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa ketergantungan daerah terhadap TKDD juga masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan APBD terhadap TKDD sebesar 80,1 persen. Sementara itu, kontribusi PAD hanya sekitar 12,87 persen (Nugraha, 2019).

Tabel 5. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

No	Nama Provinsi	Sebelum Otonomi Daerah	Setelah Otonomi Daerah
1	Prov. Aceh	kuadran IV	kuadran IV
2	Prov. Sumatera Utara	kuadran I	kuadran III
3	Prov. Sumatera Barat	kuadran III	kuadran III
4	Prov. Riau	kuadran I	kuadran III
5	Prov. Jambi	kuadran II	kuadran IV
6	Prov. Sumatera Selatan	kuadran III	kuadran III
7	Prov. Bengkulu	kuadran II	kuadran IV
8	Prov. Lampung	kuadran III	kuadran III
9	Prov. DKI Jakarta	kuadran III	kuadran III
10	Prov. Jawa Barat	kuadran III	kuadran III
11	Prov. Jawa Tengah	kuadran III	kuadran III
12	Prov. DI Yogyakarta	kuadran III	kuadran III
13	Prov. Jawa Timur	kuadran III	kuadran III
14	Prov. Kalimantan Barat	kuadran II	kuadran III
15	Prov. Kalimantan Tengah	kuadran II	kuadran IV
16	Prov. Kalimantan Selatan	kuadran II	kuadran III
17	Prov. Kalimantan Timur	kuadran IV	kuadran III
18	Prov. Sulawesi Utara	kuadran IV	kuadran IV
19	Prov. Sulawesi Tengah	kuadran II	kuadran IV
20	Prov. Sulawesi Selatan	kuadran III	kuadran III
21	Prov. Sulawesi Tenggara	kuadran II	kuadran IV
22	Prov. Bali	kuadran I	kuadran III
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	kuadran II	kuadran IV
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	kuadran IV	kuadran IV
25	Prov. Maluku	kuadran IV	kuadran IV
26	Prov. Papua	kuadran II	kuadran IV
27	Prov. Maluku Utara	kuadran IV	kuadran IV
28	Prov. Banten	kuadran III	kuadran III
29	Prov. Bangka Belitung	kuadran III	kuadran IV
30	Prov. Gorontalo	kuadran IV	kuadran IV
31	Prov. Kepulauan Riau	kuadran I	kuadran IV
32	Prov. Papua Barat	kuadran II	kuadran IV
33	Prov. Sulawesi Barat	kuadran III	kuadran IV
34	Prov. Kalimantan Utara	kuadran IV	kuadran II

Sumber: Data diolah

Di sisi lain dari 34 provinsi di Indonesia hanya 2 provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sebelum otonomi daerah Kalimantan Timur menempati kuadran IV, yang merupakan kondisi tidak

ideal. Hal ini dapat diartikan bahwa PAD Provinsi Kalimantan Timur belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal. Namun, setelah otonomi daerah, Provinsi Kalimantan Timur menempati kuadran III. Kondisi ini memang belum ideal, namun dibandingkan dengan periode sebelum otonomi daerah sudah mengalami perbaikan. Setelah otonomi daerah, PAD Provinsi Kalimantan Timur sudah memberikan sumbangan yang tinggi terhadap APBD. Kontribusi PAD yang cukup besar tercatat pada pemerintah provinsi Kalimantan Timur, yang disebabkan salah satu sumber PAD adalah dari pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pemerintah provinsi (Kementerian Keuangan, 2019). Namun tingginya sumbangan PAD belum diikuti dengan pertumbuhan PAD-nya. Di masa yang akan datang, sangat dimungkinkan akan terjadi penurunan peran PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Pada Provinsi Kalimantan Utara, terjadi peningkatan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah. Setelah otonomi daerah, Provinsi Kalimantan Utara menempati kuadran II. Kondisi ini memang belum ideal, karena kemampuan daerah dalam menggali potensi daerah belum diikuti dengan tingginya sumbangan PAD terhadap APBD, sementara ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat besar ditunjukkan dengan tren alokasi dana transfer masih tinggi yakni >70 persen. Namun untuk di masa yang akan datang, sangat dimungkinkan bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan peran PAD dalam APBD.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyebabkan adanya perbedaan kinerja keuangan antar daerah dari sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah.

Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum kontribusi PAD dalam APBD (indeks *share*) setelah adanya otonomi daerah mengalami penurunan. Dua puluh lima (25) dari 34 provinsi di Indonesia memiliki indeks *share* yang lebih rendah dari sebelum diterapkannya otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah Provinsi Maluku memiliki rata-rata nilai indeks *share* yang tertinggi di Indonesia, dan Provinsi Bali merupakan provinsi dengan rata-rata nilai indeks *share* terendah di Indonesia. Namun setelah adanya otonomi, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan rata-rata nilai indeks *share* tertinggi di Indonesia, dan Provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki rata-rata nilai indeks *share* terendah di Indonesia.

Sementara rata-rata indeks *growth* provinsi-provinsi di Indonesia sebelum penerapan otonomi daerah yakni sebesar 0,626, dan setelah otonomi rata-rata

indeks *growth* provinsi-provinsi di Indonesia hanya mencapai 0,469. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan PAD pasca adanya otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki rata-rata nilai indeks *growth* tertinggi di Indonesia. Setelah adanya otonomi daerah, nilai indeks *growth* tertinggi dimiliki oleh Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan nilai indeks *growth* yang terendah di Indonesia.

Kemudian dilihat dari kontribusi PAD dalam membiayai belanja pembangunan yang tercermin dari nilai indeks elastisitas, menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai indeks elastisitas setelah penerapan otonomi daerah meningkat 0,06 menjadi 0,492. Sebelum penerapan otonomi daerah, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan rata-rata nilai indeks elastisitas tertinggi di Indonesia, dan Provinsi Maluku memiliki rata-rata nilai indeks elastisitas terendah di Indonesia. Setelah otonomi daerah, rata-rata nilai indeks elastisitas Provinsi Sumatera Selatan merupakan nilai tertinggi di Indonesia, sedangkan nilai indeks elastisitas terendah ditempati oleh Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pengukuran IKK, bahwa setelah otonomi daerah jumlah provinsi yang memiliki klasifikasi IKK yang tinggi mengalami penurunan. Selain itu berdasarkan hasil uji t, diperoleh hasil bahwa penerapan otonomi daerah tidak meningkatkan kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia. Dari peta kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah juga menunjukkan bahwa terjadi perubahan peta kemampuan keuangan daerah secara signifikan. Sebanyak 15 provinsi mengalami penurunan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah. Sedangkan hanya 2 provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemandirian daerah setelah otonomi daerah tidak meningkat bahkan dapat dikatakan menurun. Dikatakan menurun karena masih tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat.

5.2. Saran

Terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk itu pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah untuk mampu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah yang potensial, misalnya dengan intensifikasi pemungutan objek-objek pajak, ekstensifikasi PAD ataupun melalui *creative financing* dan juga mengelola potensi daerah melalui penguatan BUMD sebagai upaya peningkatan kemandirian fiskal di daerah tersebut.

Mengingat masih terbatasnya analisa ini, yakni belum mampu menggambarkan secara rinci elemen atau sektor PAD yang memberikan kontribusi PAD bagi daerah, sehingga ke depan pada penelitian berikutnya diharapkan dapat menggambarkan secara rinci sumber PAD mana saja yang berkontribusi terhadap PAD daerah.

Daftar Pustaka

- Adi, Priyo H, 2012. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). KRITIS Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI No. I: 1-19
- BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Davey K. J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Terjemahan Amanullah. Jakarta: UI Press.
- DJPb. 2019. Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur
- Efendi, David dan Wuryanti, Sri,. 2011. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Di Kabupaten Nganjuk. *Working paper*. Universitas Muhammadiyah Semarang
- Enceng, and Yuli, Tirtariandi El Anshori. (2014). Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. In: Seminar Nasional UT 2014, 23 Oktober 2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC).
- Gamkhar, Shama; & Oates, Wallace. 1996. Asymmetries in the Response to Increases and Decreases in Governmental Grants: Some Empirical Evidence. National Tax Journal, Hal: 510-512
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2013). Statistics for the Behavioral Sciences. New York: Wadsworth Cengage Learning.
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukri. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja PEMDA: Studi Kasus Kabupaten dan kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No. 2 Tahun XIII/25.
- _____. (2001). Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Yogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Haryanto, Joko Tri . 2017. Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil Sda Dan Non-Sda Di Era Disentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 8(2):103-116. DOI: 10.22212/jekp.v8i2.821
- Hruza, Filip. (2015). Public Sector Organization Financial Ratios Recent Development As A Matter Of Financial Innovation. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 12, Issue 2.
- Kamaroellah, R. Agoes. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Nuansa: Jurnal

- Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 14, No. 1 (2017). <http://dx.doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Kementerian Keuangan. 2019. Kajian Fiskal Regional Tahun 2018: Provinsi Kalimantan Timur
- Khusnaini, M. 2016. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. BPFE UNIBRAW Malang, 21.
- Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar
- Kusumah, D. Brata, 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia.
- MacFarland, T. W., & Yates, J. M. (2017). Introduction to Nonparametric Statistics for the Biological Sciences Using R. Switzerland: Springer Nature.
- Mahi, R. (2001). Fiscal Decentralization: Its Impact on Cities Growth. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.21002/jepi.v2i1.616>
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Retrieved from www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>
- Park, Hun Myoung. 2008. Univariate Analysis and Normality Test Using SAS, Stata, and SPSS. Bloomington The Trustees of Indiana University
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah
- Prabowo, Tripitono A. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013. Media Trend Vol. 8 No. 1 Maret 2013, hal. 26
- Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari,. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar
- Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Working paper. https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf
- Sijabat, Mentari Yosephen,; Saleh, Choirul,; & Wachid, Abdul. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2 , Hal . 236-242

Susanto, Hery. 2014. tinggi Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 10, Nomor 1, Maret 2014,15-26

Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo, Hari Adi. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Provins Jawa Tengah). Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Surabaya

Tunggal, Amin Widjaja. 1994. Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer. Jakarta: Rineka Cipta, ISBN: 9795186167

Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 November. <https://doi.org/10.22146/jkap.8441>

Yani, Ahmad. (2004). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

ANALISIS DAYA SAING INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) INDONESIA DI PASAR ASEAN

Analysis Of Indonesia Textile Industry Competitiveness In ASEAN Market

Dwi Resti Pratiwi

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: dwi.pratiwi@dpr.go.id

Abstract

Indonesia is among the top 15 textile & apparel producing countries in the world and therefore it is also one of the biggest textile producers in ASEAN Market. This study examined the competitiveness of Indonesia TPT in ASEAN market by using RCA methods and analysed the determinant factors of its competitiveness by using ordinary least square (OLS) regression method. The study period was in 2000-2019. Based on the calculation of the level of competitiveness by using RCA, showed that the Indonesia's TPT industry have strong competitive ($RCA > 1$) in the ASEAN market during 2000-2005. In the following years, however, its competitiveness has decreased at below 1 point. So that, Indonesia TPT did not have strong competitiveness during 2006-2019. Factors that affect of TPT Industry competitiveness of Indonesia are export price, REER and investment. The government needs to be more serious to identify and solve the factors that inhibiting the competitiveness of the textile industry.

Keywords: textile industry, competitiveness, ASEAN

1. Pendahuluan

Perdagangan global terjadi karena selain untuk memperoleh keuntungan, tiap negara memiliki sumber daya yang berbeda sehingga meningkatkan hubungan saling ketergantungan ekonomi sekaligus persaingan antar negara. Semakin cepatnya aliran barang dan jasa antar negara dan berkembangnya sistem inovasi teknologi informasi, perdagangan, reformasi politik, transnasionalisasi sistem keuangan dan investasi menandai terjadinya liberalisasi perdagangan dunia (Isventina et. al, 2015). Indonesia turut mengikuti arus perdagangan bebas internasional dengan menandatangani *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan deklarasi *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) tentang sistem perdagangan bebas dan investasi yang berlaku penuh pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 bagi negara berkembang. Di lingkup regional, globalisasi telah membuat proses integrasi ekonomi antar

negara seperti Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) turut berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Komunitas ASEAN sejak tahun 2015 yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Hal ini membuat sekat-sekat batas negara semakin pudar. Dalam konteks ekonomi, *Asean Economic Community* (AEC) atau yang dikenal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki empat karakteristik utama yaitu: pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, pembangunan ekonomi yang setara dan integrasi ke dalam perekonomian global.

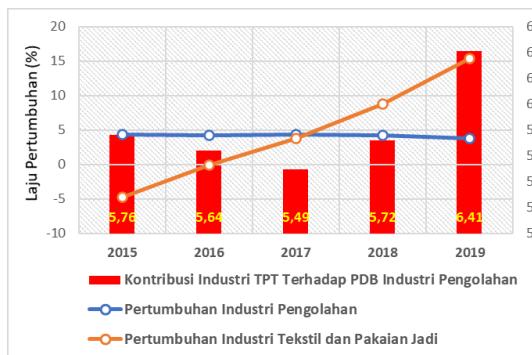
Keberadaan MEA ini membuat persaingan di antara negara-negara ASEAN akan semakin ketat dalam memperebutkan peluang dalam pasar ASEAN. Indonesia yang merupakan bagian dari MEA, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa akan berpotensi dibanjiri produk-produk dari negara ASEAN lainnya, jika Indonesia tidak mampu bersaing dan hanya menjadi penonton dalam aktivitas MEA ini. Sebaliknya bila industri nasional mampu bersaing dalam pasar ASEAN, maka akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan pasar tunggal ASEAN adalah daya saing Indonesia yang relatif lebih rendah dibanding dengan beberapa negara-negara di ASEAN. Berdasarkan *The Global Competitiveness Report* tahun 2015-2016, daya saing Indonesia berada di urutan 37 dari 140 negara namun di tahun 2019, posisi tersebut menurun menjadi 50. Posisi ini berada di bawah Singapura yang berada di urutan pertama, Malaysia di posisi 27 dan Thailand di urutan 40.

Dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN maka transformasi ekonomi perlu dilakukan melalui peningkatan daya saing industri di pasar global. Industri menjadi sentral dalam transformasi karena industri merupakan lokomotif pertumbuhan menuju negara maju. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat menciptakan nilai tambah dalam perekonomian sehingga akhirnya dapat menjadi sumber devisa secara fundamental. Bagi Indonesia, industri manufaktur berperan besar dan telah menjadi penyokong ekonomi Indonesia selama ini. Kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan yang terbesar dibanding sektor lainnya. Nilai rata-rata kontribusi PDB selama tahun 2015-2019 yaitu 20,3 persen dengan laju pertumbuhan *y-on-y* rata-rata 4,2 persen (BPS, 2020). Namun, kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sektor ini berkontribusi sebesar 19,2 persen terhadap PDB dan di tahun 2019 menurun hingga 18,8 persen (*ibid*). Tidak hanya itu, laju pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia turut mengalami perlambatan hingga di bawah laju pertumbuhan PDB nasional. Pada tahun 2019 pertumbuhan sektor industri melemah hingga 4,3 persen di bawah rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di level 5,02 persen (BPS, 2020). Menurunnya kinerja industri manufaktur di tengah persaingan global yang semakin ketat saat ini, akan memberikan sinyalemen negatif terhadap perekonomian nasional, mengingat sektor manufaktur memiliki karakteristik penciptaan nilai tambah yang tinggi di setiap rantai kegiatannya.

Pada dasarnya pemerintah sudah mencanangkan penguatan sektor industri manufaktur menjadi prioritas pembangunan. Sebagaimana arah pembangunan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, pembangunan industri saat ini diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi dengan dukungan SDM berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menghadapi revolusi industri 4.0, pemerintah telah meluncurkan *Making Indonesia 4.0* pada tahun 2018 sejalan dengan tujuan peningkatan produktivitas dan efisiensi di industri manufaktur. Pemerintah berambisi menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat dunia pada tahun 2030. Lima sektor strategis yang menjadi target implementasi revolusi industri *Making Indonesia 4.0* yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri kimia, industri otomotif, dan industri elektronika.

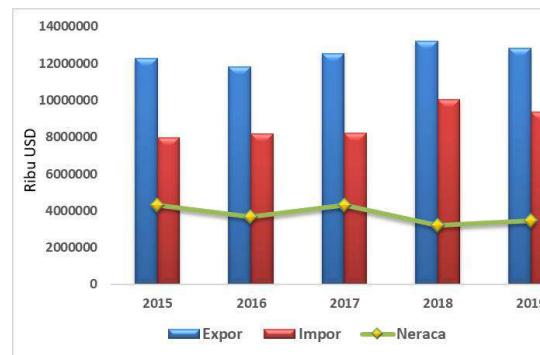
Dari kelima industri strategis tersebut, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tumbuh begitu pesat mulai tahun 2018 dan melaju jauh di atas rata-rata pertumbuhan industri manufaktur. Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan industri TPT tahun 2015 terkontraksi hingga 4,79 persen namun di tahun 2018 begitu cepat melaju hingga di tahun 2019 mampu tumbuh di angka 15,35 persen. Bila dilihat kontribusinya, industri TPT menyumbang sebesar 5,8 persen terhadap industri manufaktur. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, industri TPT merupakan sektor industri terbesar kedua yang menyerap tenaga kerja apabila dibandingkan dengan sektor industri manufaktur lainnya. Selama tahun 2015 sampai 2019, proporsi tenaga kerja yang diserap oleh industri TPT bernilai rata-rata 21,9 persen (BPS, 2020). Bahkan di tingkat global, produk industri TPT Indonesia cukup diminati dengan tingginya ekspor pada produk ini. Bahkan Indonesia tercatat sebagai 15 besar eksportir produk tekstil dan produk teknologi dunia pada tahun 2018, dikarenakan Indonesia memasok 1,67 persen komoditas teknologi dunia (UNComtrade, 2020).

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Industri TPT dan Kontribusinya Terhadap Industri Manufaktur Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2. Ekspor dan Impor Industri TPT Tahun 2015-2019 (ribu USD)



Sumber: WITS World Bank, 2020

Dilihat kinerja perdagangannya, produk TPT juga menunjukkan kinerja yang baik dengan selalu tercatat surplus terutama dari tahun 2015 sampai 2019 (Gambar 2). Meskipun selalu surplus, sejak tahun 2017 nilai impor produk TPT cenderung mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan neraca surplus yang kian menurun sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Kenaikan impor TPT yang terus meningkat di tengah perdagangan bebas di tingkat ASEAN, akan semakin mengancam nilai daya saing produk TPT Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia sebagai negara yang besar dengan sumber daya yang melimpah seharusnya mampu menguasai pasar di lingkup ASEAN. Namun, kenyataannya Indonesia belum mampu untuk mencapai hal tersebut. Penelitian Isventina, et.al (2015) mengemukakan nilai rata-rata *Revealed Comparative Advantage* (RCA) tahun 2001-2013 yang menunjukkan daya saing industri prioritas tekstil Indonesia di pasar ASEAN berada di angka 1,7. Angka tersebut menunjukkan bahwa produk tekstil Indonesia memiliki daya saing namun angka ini masih berada di bawah Kamboja dan Vietnam dengan nilai masing-masing 1,91 dan 2,55. Sejak diterapkannya MEA pada tahun 2015, seharusnya Indonesia memanfaatkan peluang ini agar produk TPT dalam negeri bisa menguasai pasar ASEAN. Oleh karena itu, maksud penulisan penelitian ini ialah menganalisis daya saing industri TPT Indonesia pada periode 2000-2019 dibanding negara-negara ASEAN lainnya dan faktor-faktor yang memengaruhi daya saing industri TPT di Kawasan ASEAN.

2. Tinjauan Pustaka

Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu industri untuk menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan, hasil kerja yang lebih baik dibandingkan dengan industri lainnya, sehingga faktor yang harus diperhatikan dalam persaingan adalah keunggulan (Heckscher-Ohlin, 1990 dalam Wardhani dan Agustina, 2015). Menurut Heckscher-Ohlin, faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja dan modal terlalu umum untuk dapat menunjukkan keunggulan daya saing dalam strategi industri-industri yang berbeda. Faktor-faktor dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori besar seperti SDM, fisik, ilmu pengetahuan, modal dan infrastruktur. Pemakaian campuran dari faktor-faktor tersebut berbeda antar industri. Hal senada juga disampaikan oleh Porter (1990) bahwa faktor *endowment* atau sumber daya yang melimpah seperti lahan, tenaga kerja dan modal belum dapat menilai keunggulan suatu negara. Selanjutnya Porter (2000), menemukan terdapat empat hal dalam membangun keunggulan dari suatu negara yang digambarkan sebagai suatu skema berbentuk *diamond*, yaitu

- 1) Kondisi faktor, yaitu posisi negara dalam faktor produksi, seperti tenaga kerja terampil atau infrastruktur, perlu untuk bersaing dalam suatu industri tertentu
- 2) Kondisi permintaan, yaitu sifat dari permintaan pasar asal untuk barang dan jasa industri.

- 3) Industri terkait dan industri pendukung. Keberadaan atau ketiadaan industri pemasok dan industri terkait lainnya di negara tersebut yang secara internasional bersifat kompetitif;
- 4) Strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Kondisi dalam negara yang mengatur bagaimana perusahaan diciptakan, diatur, dan dikelola, sebagaimana juga sifat dari persaingan domestik.

Namun, teori Porter yang terlalu fokus pada industri dalam menganalisis daya saing turut menuai berbagai kritikan. Di antaranya Foss (1996) yang menegaskan bahwa satu masalah konstan dalam teori *diamond* Porter adalah kurang memadainya teori tentang perusahaan. Foss mengibaratkan teori Porter secara metaforis sebagai hanya salah satu bilah gunting dalam menilai keunggulan kompetitif. Porter secara komprehensif mengidentifikasi dan membahas hanya faktor penentu industri dari keunggulan kompetitif. Sementara itu, analisis perusahaan sebagai pencipta strategis/evolusioner dari keunggulan kompetitif nasional dilewati dalam teori Porter.

Platts, et.al (1996) menilai keunggulan suatu komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan serta permintaan konsumen terhadap produk cukup signifikan mendorong perusahaan untuk lebih kompetitif. Selanjutnya, Thurow (2009) menekankan bahwa dalam era globalisasi ekonomi, keunggulan kompetitif menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Hal ini terjadi dalam konteks daya saing komoditas yang memiliki keunggulan komparatif, dari segi kelimpahan faktor, tetapi belum kompetitif. Menurutnya bahwa suatu konsep keunggulan komparatif akan bergeser memperhitungkan teknologi sebagai unsur dinamis, hal ini disebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu menghasilkan peralatan canggih untuk menggeser sebagian besar tenaga kerja manusia. Kondisi ini mengakibatkan rasio modal dan tenaga kerja bukan lagi menjadi variabel-variabel utama, walaupun tenaga kerja tetap dibutuhkan namun perannya menjadi berkurang dalam proses produksi karena tergeser oleh teknologi. Adapun menurut Tambunan (2002:46) kondisi utama yang harus dipenuhi agar pengembangan industri dapat bersaing di pasar regional maupun internasional adalah: 1) menciptakan lingkungan internal yang kondusif, yang meliputi kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, budaya bisnis, kekuatan modal dan jaringan bisnis dengan pihak luar; 2) menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif, yang meliputi sistem perburuan dan kondisi pasar buruh, kondisi infrastruktur dan tingkat pendidikan masyarakat.

Di tengah persaingan global saat ini, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan posisi daya saingnya di kancah internasional. Berbagai faktor daya saing tersebut perlu diidentifikasi agar pemerintah segera memperbaiki faktor yang menghambat daya saing industri Indonesia. Terdapat beberapa penelitian, yang telah mengidentifikasi faktor yang memperlemah posisi daya saing industri Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Kuncoro (2006) bahwa kematangan teknologi, penelitian dan pengembangan belum mendapat perhatian serius. Hal ini tak terlepas dari iklim berusaha yang belum kondusif seperti masih adanya penyelundupan barang, kebijakan pajak yang berbeda-beda dan kebijakan

tenaga kerja. Senada dengan hal tersebut, Maidir (2006) mengungkapkan bahwa rigiditas peraturan ketenagakerjaan, limitasi kapabilitas teknologi dan pemasaran serta kendala pada industri pendukung merupakan beberapa faktor yang memengaruhi daya saing industri Indonesia. Lemahnya daya saing industri Indonesia juga diungkapkan oleh Wengel dan Rodriguez (2006) bahwa biaya untuk memulai atau menutup usaha di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti China, Vietnam, Malaysia dan Thailand. Demikian juga *cost of time* yang timbul karena berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, Isventina et.al (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa Indonesia memiliki kinerja atau daya saing (komparatif) di sektor industri prioritasnya. Alasannya adalah karena sebagian besar industri prioritasnya yang menjadi andalan Indonesia untuk diunggulkan di pasar ASEAN memiliki performa yang baik. Lebih lanjut dalam penelitiannya menunjukkan bahwa harga ekspor merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap daya saing sektor industri prioritas Indonesia. Faktor yang berpengaruh lainnya adalah nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan produktivitas tenaga kerja.

Salah satu industri prioritas Indonesia adalah industri TPT. Sektor ini menjadi salah satu sektor industri unggulan yang tertuang dalam RIPIN begitu juga dalam *Roadmap Making Indonesia 4.0*. Ragimun (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa daya saing TPT Indonesia di pasar ekspor AS relatif kuat untuk beberapa jenis produk TPT. Dibanding pesaing Indonesia yaitu Vietnam, pengembangan produk TPT ke pasar ekspor AS banyak dikuasai oleh jenis produk TPT Indonesia, sedangkan Vietnam hanya mempunyai beberapa jenis produk TPT saja. Selain itu, hasil determinasi daya saing ekspor TPT asal Indonesia ke pasar tujuan ekspor AS dan Tiongkok sangat dipengaruhi oleh FDI sektor manufaktur negara asal. Namun pengembangan industri TPT ini masih terkendala oleh berbagai hal yang dapat mengurangi daya saing industri TPT Indonesia di kancan ASEAN. Menurut Ragimun (2010) paling tidak terdapat 10 masalah utama yang menghambat daya saing TPT di Indonesia, yaitu rendahnya teknologi, ketergantungan impor bahan baku, minimnya industri pendukung, rendahnya sumber daya manusia, keterbatasan modal kerja, pasokan listrik, agresif dan dinamisnya produk TPT, lemahnya kinerja ekspor, persoalan transportasi, serta persoalan perpajakan. Selain permasalahan tersebut yang menjadi faktor penyebabnya terhambatnya daya saing industri, terdapat permasalahan lainnya yang juga harus segera diatasi. Hal tersebut adalah tingginya jumlah mesin-mesin pada industri TPT yang diperkirakan 80 persen telah berusia lebih dari 20 tahun (Kementerian Perindustrian, 2015a). Dengan kondisi seperti itu maka industri TPT Indonesia menjadi lebih boros, tidak ramah lingkungan, dan dari sisi waktu *delivery* sulit memenuhi kebutuhan ekspor pasar global (Rosalina, 2013). Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius dalam memperbaiki faktor-faktor yang memengaruhi daya saing industri TPT Indonesia di kancan ASEAN maupun global.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Daya saing industri prioritas Indonesia di pasar ASEAN secara komparatif dianalisis dengan menggunakan RCA. Nilai RCA ini kemudian digunakan sebagai variabel terikat dalam persamaan model regresi guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi daya saing ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil Indonesia di pasar ASEAN. Pada akhirnya, akan dirumuskan strategi atau kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor industri TPT Indonesia di pasar ASEAN.

3.1. Analisis Daya Saing Industri TPT di Pasar ASEAN

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui daya saing industri TPT Indonesia dan negara ASEAN lainnya di pasar ASEAN. Dari analisis ini dapat diidentifikasi negara-negara intra ASEAN yang paling menguasai pasar TPT untuk pasar ASEAN dan bagaimana posisi daya saing Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya. Metode yang digunakan adalah RCA atau keunggulan komparatif yang terungkap. RCA pertama kali diperkenalkan oleh Balassa (1965), yang menganggap bahwa keunggulan komparatif suatu negara direfleksikan atau terungkap dalam eksportnya. Metode RCA ini dipilih dalam penelitian ini karena didasarkan pada suatu konsep bahwa perdagangan antar wilayah sebenarnya menunjukkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu wilayah. Sehingga hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menilai keunggulan komparatif produk tekstil di suatu negara dengan negara yang lain pada wilayah yang sama yaitu ASEAN. Variabel yang diukur adalah kinerja ekspor suatu produk terhadap total ekspor suatu wilayah yang kemudian dibandingkan dengan pangsa nilai produk dalam perdagangan dunia.

Dalam menilai daya saing tekstil dan produk tekstil Indonesia dan negara ASEAN lainnya di pasar ASEAN, data yang digunakan menggunakan periode 2000-2019. Adapun data nilai ekspor diperoleh dari UN Comtrade Database dan *World Integrated Trade Solution (WITS)*, dengan kode SITC 65 (*Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., and related products*) dan SITC 84 (*Articles of apparel and clothing accessories*). Adapun rumus dalam menghitung RCA tersebut adalah:

$$RCA = \frac{\frac{X_{ij}}{X_j}}{\frac{X_{iw}}{X_w}}$$

Di mana:

X_{ij} = Nilai ekspor komoditi i (TPT) oleh negara j ke ASEAN

X_j = Nilai ekspor total negara j ke ASEAN

X_{iw} = Nilai ekspor total dunia komoditas i (TPT) ke ASEAN

X_w = Nilai ekspor total dunia ke ASEAN

Interpretasi indeks RCA didasarkan pada klasifikasi yang telah dijelaskan oleh Hinlopen & van Marrewijk (2008). Pertama, kelas A yang memiliki rentang nilai dari 0 - 1. Mencakup semua produk dari negara yang daya saingnya tidak diketahui. Kedua, kelas b, nilainya berkisar pada interval 1 - 2. Memiliki daya saing yang lemah. Ketiga, kelas c, selisih nilai RCA pada interval 2 - 4. Memiliki daya saing sedang. Keempat, kelas d, Nilai RCA > 4, artinya memiliki daya saing yang kuat. Dengan kata lain semakin tinggi nilainya maka negara tersebut memiliki daya saing TPT yang kuat di pasar ASEAN dan di atas rata-rata dunia.

3.2. Analisis Determinan Daya Saing Ekspor Komoditas TPT Indonesia di Kawasan ASEAN

Dalam melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi daya saing industri TPT Indonesia pada pasar ASEAN, penelitian ini menggunakan analisis regresi *ordinary least square* (OLS). Adapun variabel dependen atau dalam hal ini daya saing menggunakan variabel RCA. Beberapa penelitian yang menggunakan variabel RCA sebagai *proxy* daya saing di antaranya Isventina et. al (2015), Ragimun (2018), dan lain-lain. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan berbagai teori terkait faktor yang memengaruhi daya saing suatu produk di suatu negara. Dengan keterbatasan data yang ada, maka tidak semua variabel dimasukkan ke dalam analisis ini, yaitu:

1) Harga Ekspor

Harga ekspor TPT diperoleh dari hasil pembagian antara nilai ekspor sektor industri prioritas tersebut ke ASEAN secara keseluruhan dengan volume ekspor sektor industri TPT ke ASEAN pada periode yang sama. Variabel ini menunjukkan harga sektor industri TPT Indonesia yang diterima oleh konsumen pada harga dunia di tingkat tertentu. Selain itu, harga ekspor juga merefleksikan biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen karena harga yang dikeluarkan oleh produsen merupakan harga pembelian *input* perusahaan eksportir untuk menghasilkan produk-produk yang diekspor, sehingga juga menentukan harga eksportnya (Isventina et al). Senada yang disampaikan oleh Sugiyanto (2004) bahwa biaya produksi berpengaruh terhadap harga ekspor karena harga yang dikeluarkan oleh produsen merupakan harga pembelian *input* perusahaan eksportir untuk menghasilkan produk-produk yang diekspor, sehingga juga menentukan harga eksportnya. Harga ekspor yang rendah karena rendahnya harga *input* akan mendorong peningkatan daya saing karena pada dasarnya esensi dari daya saing itu sendiri adalah biaya yang relatif rendah. Dengan kata lain, esensi peningkatan daya saing adalah penurunan biaya. Data harga ekspor merupakan perbandingan nilai ekspor TPT dibanding volume ekspor TPT Indonesia ke ASEAN periode 2000-2019. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari *World Integrated Trade Solution* (WITS).

2) Harga Energi

Harga energi merupakan salah satu komponen biaya produksi yang memengaruhi harga ekspor. Industri TPT mempunyai masalah terkait biaya energi yang mahal, yang merupakan permasalahan lain yang mengganggu daya saing produk tekstil di Indonesia. Menurut Kementerian Perindustrian (2020), dalam struktur biaya industri hulu tekstil sebesar 25 persen berasal dari harga gas. Dengan begitu, harga gas yang sekitar USD9 hingga USD12 *Million British Thermal Unit* (MMBTU) saat ini menyebabkan daya saing menjadi lemah. Bagi sektor industri hulu, akibat tingginya harga gas industri, utilisasi produksi cenderung rendah di kisaran 45 persen, sehingga sebagian besar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hulu menurunkan kapasitas produksinya. Pada penelitian ini, data harga energi yang digunakan merupakan harga gas dengan satuan USD per MMBTU. Data yang digunakan bersumber dari *Handbook of Energy and Economics Statistic of Indonesia 2005-2019*

3) Nilai Tukar Mata Uang

Dalam penelitian ini menggunakan data *Real Effective Exchange Rate* (REER). Angka REER adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui daya saing suatu negara dari sisi harga dalam pertukaran mitra dagang (UGM, 2016). *Real Effective Exchange Rates* (REER) menjelaskan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap beberapa mata uang negara-negara lainnya yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi pada tahun tertentu atau indeks harga konsumen negara tertentu. Hubungan antara nilai tukar riil dengan net ekspor berdasarkan model Mundell Fleming adalah negatif (Zuhroh & Kaluge, 2007). Namun, bila nilai kurs dinyatakan dalam *direct term* (rupiah per dolar AS), ide Fleming tersebut dapat digambarkan dalam suatu kurva IS yang ber-slope positif. Dengan kata lain, nilai REER yang tinggi menjelaskan terjadi penurunan nilai tukar rupiah atau depresiasi. REER yang rendah dalam konteks *direct term* dapat diartikan barang-barang domestik relatif mahal terhadap barang luar negeri, yang mengakibatkan daya saing rendah. Daya saing rendah ditunjukkan dengan ekspor menurun dan sebaliknya impor meningkat. Hal ini berarti rendahnya REER (menguatnya mata uang domestik relatif terhadap mitra dagang) maka harga barang-barang domestik lebih mahal daripada harga barang luar negeri dan akan berimplikasi pada menurunnya nilai ekspor sehingga menekan neraca perdagangan. Keadaan sebaliknya adalah ketika nilai tukar riil tinggi (depresiasi), maka harga barang dalam negeri akan lebih murah dibandingkan dengan harga barang luar negeri. Hal itu akan menyebabkan meningkatnya nilai volume ekspor dan berimplikasi pada membaiknya nilai neraca perdagangan. Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa hubungan REER dengan daya saing ekspor TPT adalah negatif. Data REER yang digunakan periode 2000-2019 bersumber dari fred.stlouisfed.org

4) Investasi

Investasi memiliki peran penting terhadap perekonomian dan juga pada peningkatan ekspor. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian di antaranya Leichenko dan Erickson (1997) yang melakukan studi pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI) dan investasi domestik terhadap ekspor untuk berbagai produk manufaktur di negara bagian AS selama 1980 hingga 1991. Penelitian tersebut mengeksplorasi kinerja ekspor untuk tiap jenis barang-barang manufaktur secara terpisah. Hasilnya berbeda-beda dalam hal pembagian sektoral. FDI memiliki peran yang signifikan dan positif dalam meningkatkan ekspor logam, mesin industri dan elektronik serta manufaktur lainnya dan tidak berdampak pada ekspor produk makanan atau bahan kimia. Investasi dalam negeri tampak signifikan dan positif hanya untuk meningkatkan ekspor produk makanan dan barang manufaktur lainnya. Selain itu, dampak FDI terhadap ekspor lebih kuat untuk barang padat karya daripada padat modal. Sementara itu, Wang et al. (2007) mengonfirmasi bahwa ekspor secara positif dipengaruhi oleh FDI yang ditarik pada tahun sebelumnya, namun tidak menemukan bukti dampak investasi domestik terhadap ekspor. Data investasi yang digunakan berasal dari BKPM yang terdiri atas data PMA hanya dari tahun 2002, 2005 dan 2009 sementara PMDN dari periode 2000-2019.

Untuk menganalisis pengaruh harga energi, harga ekspor TPT, nilai mata uang dan investasi terhadap daya saing industri TPT nasional di pasar ASEAN menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan pendekatan model *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini dipilih, karena paling sesuai dalam menilai apakah terdapat hubungan antar estimator (daya saing) terhadap variabel yang diestimasi (variabel independen). Adapun persamaan yang digunakan yaitu:

$$DS = \beta_0 + \beta_1 EXPPRICE + \beta_2 ERGPRICE + \beta_3 REER + \beta_4 INVEST + \varepsilon$$

Di mana:

DS	= Daya Saing Ekspor Komoditas TPT (RCA)
EXPPRICE	= Harga Ekspor TPT Indonesia (USD/kg)
ERGPRICE	= Harga Gas (USD/MMBTU)
REER	= <i>Real Effective Exchange Rates (Index 2010=100)</i>
INVEST	= Penanaman Modal Dalam Negeri dan FDI (Juta Rupiah)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Daya Saing Industri TPT Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya di Pasar ASEAN

Industri TPT Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat dalam peningkatan daya saing, terutama dalam era perdagangan bebas saat ini

seperti hadirnya MEA. Persaingan ini semakin meningkat dikarenakan sudah tidak diberlakukannya pasar kuota yang menyebabkan industri TPT Indonesia mendapat ancaman serius dari negara lain (Ragimun 2018). Pada Tabel 1 terlihat bahwa untuk di pasar ASEAN, industri TPT Indonesia sempat menduduki daya saing yang sangat tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya pada periode 2000-2005. Pada saat itu, nilai RCA industri, TPT Indonesia berada di angka lebih dari 1 begitu juga dengan Brunei Darussalam dan Kamboja. Namun setelah tahun 2005 nilai RCA Industri TPT Indonesia terus mengalami penurunan. Industri TPT memiliki nilai RCA rata-rata kurang dari satu ($RCA < 1$) yang artinya produk-produk industri tersebut tidak memiliki daya saing secara komparatif di pasar ASEAN. Hal ini dikarenakan ekspor produk-produk industri TPT dari negara ASEAN lainnya ke pasar ASEAN memiliki nilai yang jauh lebih besar. Bisa dilihat pada Tabel 1 untuk tahun 2005 dan selanjutnya RCA industri TPT Vietnam dan Kamboja meningkat cukup tajam lebih dari 1. Hal ini menandakan industri TPT dari kedua negara tersebut berdaya saing tinggi dan menguasai pasar ASEAN. Dapat dikatakan juga produk-produk yang dihasilkan oleh industri TPT Indonesia kurang memiliki kontribusi yang besar terhadap total ekspor ASEAN.

Tabel 1. Hasil Perhitungan RCA Industri TPT Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya untuk Pasar ASEAN Tahun 2000-2019

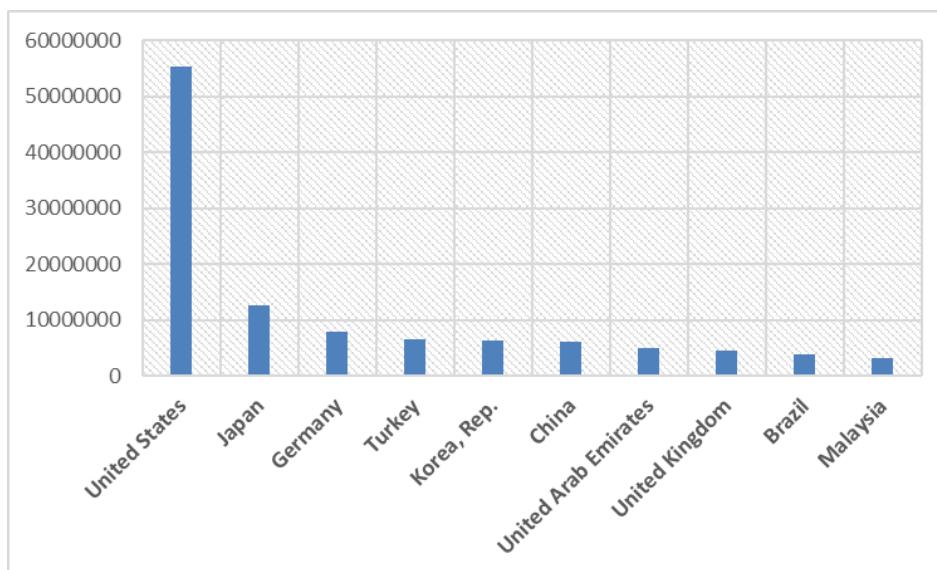
Negara	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brunei Darussalam	NA	4.10	2.42	1.95	2.17	NA	0.54	0.32	0.26	0.12	0.07	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02
Myanmar	NA	0.06	0.05	0.08	0.09	0.21	0.27	0.63	0.31	0.45	1.59									
Kamboja	1.21	1.57	1.46	1.47	1.84	1.52	1.55	1.40	0.73	0.33	0.35	0.44	1.79	2.97	4.95	2.65	2.46	2.25	3.08	NA
Indonesia	1.61	1.38	1.28	1.30	1.18	1.16	0.99	0.82	0.74	0.62	0.56	0.48	0.43	0.41	0.43	0.48	0.47	0.38	0.38	0.81
Laos	NA	0.46	0.14	0.04	0.08	0.08	0.03	0.02	0.03	0.04	0.11									
Malaysia	0.37	0.39	0.32	0.33	0.30	0.31	0.34	0.33	0.39	0.37	0.34	0.37	0.30	0.26	0.25	0.10	0.10	0.10	0.10	0.27
Filipina	0.22	0.22	0.20	0.21	0.17	0.23	0.14	0.12	0.13	0.10	0.05	0.10	0.12	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.11
Singapura	0.38	0.34	0.31	0.38	0.35	0.33	0.32	0.29	0.29	0.25	0.21	0.19	0.21	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.32
Vietnam	0.85	0.98	1.13	0.95	0.92	0.79	1.10	1.08	1.07	1.20	1.40	1.22	0.91	0.93	0.95	1.12	1.35	1.42	1.64	4.18
Thailand	0.75	0.81	0.72	0.72	0.69	0.76	0.72	0.63	0.65	0.72	0.70	0.60	0.52	0.50	0.48	0.46	0.49	0.51	0.50	1.23

Sumber : Diolah, 2020

Adanya penurunan daya saing Industri TPT Indonesia dapat diakibatkan sebagai dampak dari adanya liberalisasi perdagangan. Sejak tahun 2005 mulai diberlakukannya kebijakan penghapusan kuota impor tekstil. Selain penghapusan kuota bentuk liberalisasi lainnya adalah penghapusan kebijakan tarif dan non tarif khususnya di antara negara ASEAN sebagai akibat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Fuadi, 2018). Selain itu, penurunan kinerja ekspor TPT Indonesia ke beberapa negara ASEAN disebabkan oleh beberapa hal di antaranya, keadaan perekonomian negara-negara ASEAN tidak stabil dan banyaknya produsen TPT dari negara ASEAN lainnya selain Indonesia. Pasar utama industri TPT Indonesia sendiri adalah Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa (di antaranya Jerman) dan pasar ASEAN dapat dijadikan sebagai pengganti pasar tradisional tersebut (Gambar

3). Hampir 35 persen produk TPT Indonesia khususnya pakaian jadi dieksport ke Amerika Serikat diikuti dengan Jepang sebesar 7 persen.

Gambar 3. Ekspor TPT Indonesia ke 10 Pasar Tradisional Utama Tahun 2005-2018 (dalam ribu USD)



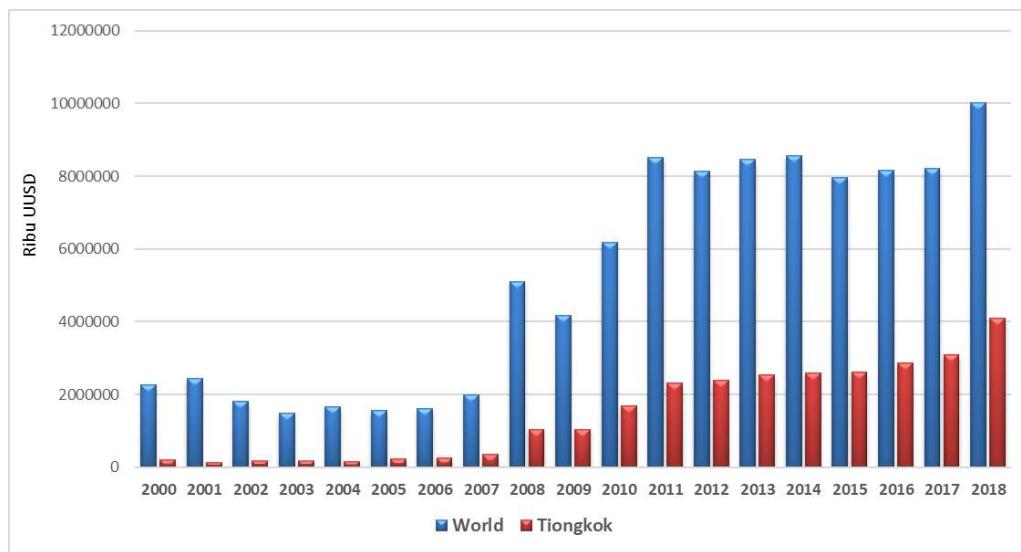
Sumber: WITS 2020

Menurut laporan *World Economic Forum* 2019, daya saing global Indonesia bahkan turut 5 peringkat dibanding tahun 2018 yaitu dari posisi 45 menjadi 50 di tahun 2019. Diketahui adanya lima masalah utama dalam menjalankan bisnis di Indonesia yaitu adopsi teknologi, kesehatan, pengembangan *skill*, pasar tenaga kerja serta aspek perdagangan dan jasa. Turunnya daya saing Indonesia bukan hanya menunjukkan Indonesia kalah cepat dibanding negara lain tetapi juga menggambarkan Indonesia hanya unggul dalam aspek ukuran pasar domestik. Khusus untuk daya saing industri TPT itu sendiri, Kurniadi, et.al (2017) menemukan bahwa permasalahan dalam meningkatkan daya saing TPT Indonesia terdiri dari; (1) permasalahan internal di antaranya bahan baku dan bahan penolong, teknologi, sumber daya manusia dan modal kerja, serta energi; (2) permasalahan eksternal antara lain transportasi, pelabuhan, perpajakan, ekonomi makro baik domestik maupun global.

Tingginya ketergantungan impor bahan baku tekstil menjadi persoalan besar yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing ekspor TPT. Keterbatasan bahan baku ini juga dapat mencerminkan keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia untuk memproduksi dan mengolah bahan baku tekstil. Indonesia telah mengimpor kapas sebagai bahan baku/kain katun sekitar 99,2 persen dari semua kebutuhan kapas nasional per tahun (Kementerian Perindustrian, 2012). Hal senada juga diungkapkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bahwa sekitar 99 persen kapas yang digunakan di industri tekstil dalam negeri masih harus diperoleh dari impor (Industry, 2019). Pada Gambar 4 menunjukkan peningkatan yang tajam terhadap impor kapas sejak tahun 2008. China merupakan negara pemasok kapas terbesar ke Indonesia. Peningkatan impor

yang drastis ini sejalan dengan penurunan daya saing komoditas TPT Indonesia di Kawasan ASEAN.

Gambar 4. Ekspor TPT Indonesia ke Global dan Tiongkok (USD Ribu)



Sumber: UNComtrade, 2020

Terkait impor TPT di Indonesia, regulasi yang dikeluarkan pemerintah sangat berpengaruh terhadap masuknya produk impor yang membanjiri pasar tekstil dalam negeri. Sebelumnya ketentuan terkait impor TPT diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil. Namun regulasi tersebut banyak dikeluhkan oleh pelaku industri TPT, karena melalui aturan tersebut tidak hanya produsen yang bisa melakukan impor bahan baku tekstil tetapi juga *trader* atau pedagang. Di waktu berikutnya, regulasi tersebut direvisi melalui Permendag No. 77 Tahun 2019. Meskipun demikian, regulasi baru tersebut masih memuat beberapa celah yang dianggap dapat memungkinkan adanya importir nakal. Dalam regulasi tersebut, impor masih diperbolehkan tidak hanya oleh produsen saja namun juga importir umum. Terkait dengan Persetujuan Impor (PI) juga masih berdasarkan atas kontrak pemesanan dengan Industri Kecil Dan Menengah (IKM). Meskipun sudah ada ketentuan tentang kewajiban penyampaian laporan pendistribusian TPT yang telah diimpor, namun belum ada pengawasan terhadap transparansi penggunaan impor oleh IKM. Di samping itu, adanya regulasi baru tersebut juga masih memungkinkan adanya importir pemilik API-P bodong. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya persyaratan yang lebih ketat dalam penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berlaku sebagai API-P untuk memperoleh izin impor misalnya dengan menjadikan rekening listrik sebagai indikator perusahaan yang aktif berproduksi (Octavia dan Pratiwi, 2020).

4.2. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Daya Saing Komoditas TPT Indonesia di Pasar ASEAN

Pada penelitian ini menguji empat variabel independen yang memengaruhi daya saing ekspor komoditas TPT Indonesia di pasar ASEAN. Keempat variabel tersebut yaitu harga ekspor, harga energi, investasi dan nilai mata uang riil, dimana dalam menjelaskan hubungan keempat variabel tersebut terhadap daya saing TPT digunakan model regresi linear berganda. Untuk menguji apakah model tersebut layak atau tidak digunakan maka dilakukan uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam uji ini diketahui *probability* (0,889) > 0,05 (taraf nyata 5 persen) yang artinya asumsi residual menyebar normal terpenuhi. Selanjutnya asumsi lainnya yang harus dipenuhi adalah model terbebas dari masalah multikolinearitas yaitu tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan melihat matriks korelasi antara variabel-variabel independen, dimana *rule of thumb* yang digunakan adalah 0,8. Jika nilai korelasi lebih besar dari 0,8, maka dapat dikatakan terdapat masalah multikolinearitas pada persamaan regresi. Berdasarkan matriks korelasi antara variabel-variabel independen yang dapat dilihat pada Tabel 2, diketahui tidak terdapat korelasi yang kuat antara variabel independen.

Tabel 2. Matriks Korelasi Antar Variabel Bebas

	ERGPRICE	REER	INVEST	EXPRICE
ERGPRICE	1	0,50519	-0,09995	0,72332
REER	0,50519	1	0,21812	0,74934
INVEST	-0,09995	0,21812	1	0,23830
EXPRICE	0,72332	0,74934	0,23830	1

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil regresi sebagaimana terlihat pada Tabel 3, terlihat bahwa variabel bebas yang signifikan memengaruhi daya saing industri TPT adalah harga ekspor, nilai tukar riil dan investasi sementara harga energi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil ini dibuktikan dengan nilai probabilitas pada masing-masing variabel bebas tersebut lebih kecil daripada taraf nyata 5 persen. Sementara itu, harga energi dalam hal ini gas lebih dari 5 persen yang mengindikasi variabel ini tidak signifikan. Hasil uji kecocokan model (*goodness of fit*) dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Dengan nilai *R-squared* (R^2) sebesar 0,839108 model ini mampu memprediksi 83 persen variasi dari variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, akan dijelaskan lebih detail mengenai hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Daya Saing Ekspor Komoditas TPT Indonesia di Pasar ASEAN

Variabel Independen	Koefisien	Probabilitas
EXPPRICE (Harga Ekspor)	-0.310268	0.0345
REER (Nilai Tukar Riil)	-0.016944	0.0274
INVEST (Investasi)	-6.44E-08	0.0195
ERGPRICE	0.006520	0.8189
<i>R-Squared</i>	0.839108	
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.796203	
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0.000008	

Sumber: Data diolah

1) Harga Ekspor

Dari hasil regresi ini menunjukkan hubungan yang negatif antara harga ekspor dan daya saing industri. Dimana setiap penurunan harga ekspor USD1/kg dengan asumsi variabel yang lain tetap maka akan meningkatkan nilai RCA atau daya saing ekspor sebesar 0,3 poin. Hasil ini sesuai dengan beberapa teori yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya di antaranya model Mundell Flemming yang menunjukkan bahwa hubungan antara nilai tukar riil dengan *nett export* adalah negatif. Semakin rendah harga ekspor suatu komoditas maka semakin tinggi daya saing komoditas tersebut. Hal ini dikarenakan harga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen, semakin tingginya harga yang ditetapkan maka akan mengakibatkan penurunan terhadap jumlah permintaan (Lipsey, et.al; 1997). Adapun komponen pembentuk harga ekspor adalah harga domestik di tingkat produsen yang disebut juga harga relatif (Isventina, et al; 2015). Harga relatif merupakan biaya produksi yang dikeluarkan oleh industri dalam menghasilkan suatu produk. Rendahnya biaya produksi menandakan bahwa harga pembelian *input* oleh perusahaan eksportir juga rendah sehingga harga eksportnya pun akan rendah. Begitupun sebaliknya, harga produksi yang tinggi akan meningkatkan harga ekspor yang mengakibatkan penurunan daya saing ekspor produk tersebut. Terkait hal tersebut, daya saing industri TPT Indonesia cenderung mengalami penurunan yang dapat disebabkan masih tingginya biaya produksi. Adapun pembentuk biaya produksi di antaranya meliputi bahan baku, upah dan teknologi. Untuk bahan baku, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Indonesia saat ini masih memerlukan impor khususnya di sektor hulu (kapas dan polyester) karena belum mampu untuk memproduksi secara mandiri dengan kualitas yang baik. Terkait komponen upah, saat ini upah tenaga kerja di Indonesia termasuk di industri TPT masih belum mampu bersaing dengan negara lain khususnya di Vietnam. Berdasarkan data dari *Foreign Investment Agency (FIA)* & *Ministry of Planning and Investment (MPI)* Myanmar, upah pekerja sektor manufaktur di Indonesia merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (CNBC Indonesia, 2019). Sedangkan upah tenaga kerja merupakan komponen terbesar kedua dalam struktur

pembentuk biaya industri TPT setelah komponen bahan baku (Asmara, et al, 2014). Kondisi upah tenaga kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan pabrik TPT merelokasi atau bahkan menutup pabriknya ke negara lain. Terkait persoalan teknologi dan mesin yang masih tertinggal menjadi salah satu pengembangan daya saing industri TPT. Hal ini dikarenakan industri tekstil memiliki karakteristik padat modal, salah satunya karena banyaknya penggunaan mesin untuk produksinya. Sebagian besar mesin yang digunakan dalam industri tekstil sudah tua, dan 80 persen sudah berusia di atas 20 tahun (Prasetyani, et.al; 2020). Biaya perawatan mesin tersebut juga tinggi, sehingga daya saing mesin produksi tekstil relatif rendah.

2) *Real Effective Exchange Rates (REER)*

Variabel lainnya yang menunjukkan hasil yang signifikan terhadap daya saing ialah nilai tukar efektif riil atau *REER*. Hasil regresi ini sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan negatif antara REER dan daya saing. Dimana nilai REER yang tinggi atau terjadi depresiasi, akan mengakibatkan peningkatan permintaan ekspor terhadap barang tersebut, begitu juga sebaliknya nilai REER yang turun akan menurunkan permintaan suatu barang akibat tingginya harga ekspor, sehingga hal ini mengakibatkan melemahnya daya saing. Hal ini dikarenakan Jika harga relatif dari barang luar negeri meningkat (REER naik), maka masyarakat luar negeri akan mengalihkan pengeluaran mereka untuk membeli barang domestik, sehingga akan memberikan efek positif terhadap ekspor. Dengan peningkatan nilai tukar riil (terdepresiasi), maka harga produk di pasar global akan lebih murah, sehingga dapat meningkatkan ekspor.

Hasil regresi hubungan REER dan daya saing TPT menunjukkan bahwa kenaikan indeks REER sebesar 1 basis poin akan menurunkan nilai RCA atau daya saing TPT Indonesia sebesar 0,016 basis poin. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian di antaranya, Lukmana (2016) yang melakukan analisis daya saing dan faktor-faktor yang memengaruhi ekspor tekstil ke Pasar Korea Selatan. Dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa setiap kenaikan 1 persen kurs dolar Amerika Serikat (atau rupiah terdepresiasi) maka ekspor tekstil naik 0,7062 persen. Begitu juga penelitian Muttoharoh, et.al (2018) yang menunjukkan kenaikan 1 persen nilai kurs akan menurunkan volume ekspor kopi arabika sebesar 0,216 persen. Begitu juga dengan Popovici (2017) yang menemukan bahwa 1 persen penurunan REER akan meningkatkan ekspor dan daya saing industri di 8 negara terbaru EU sebesar 0,3 persen.

3) Investasi

Dari hasil regresi ini menunjukkan bahwa variabel investasi secara statistik memiliki nilai signifikan namun berhubungan negatif dengan daya saing ekspor TPT. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan beberapa teori dan hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya. Data investasi realisasi sektor tekstil yang diperoleh dari NSWI BKPM sebagian besar merupakan penanaman modal dalam negeri, sementara itu penanaman modal asing

hanya tercatat di tahun 2002 sebesar USD823 ribu dan di tahun 2009 USD421,9 ribu. Dari data bisa menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri belum berorientasi ekspor dan masih didominasi untuk pasar domestik. Selain itu, beberapa penelitian memang menyebutkan bahwa tidak ditemukan bukti dampak investasi domestik terhadap ekspor (Wang, et.al; 2007), namun dalam penelitian ini hubungan yang negatif ini bisa menandakan bahwa adanya penanaman investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, merupakan upaya peningkatan daya saing industri di masa depan yang dilakukan pada saat sekarang (Isventina, 2015). Dengan demikian dampak positif dari adanya investasi ini terhadap peningkatan daya saing baru dirasakan beberapa tahun mendatang.

4) Harga Energi (Harga Gas)

Harga gas dalam negeri cenderung mahal dibandingkan negara lain, oleh karena itu Kementerian Perindustrian berupaya menekan harga gas industri mengingat sejumlah besar industri manufaktur dalam negeri membutuh gas baik sebagai energi maupun bahan baku. Dengan harga gas yang dapat ditekan dihadapkan dapat menurunkan biaya produksi dan mendukung peningkatan daya saing. Harga gas untuk industri tekstil sangat memengaruhi terhadap biaya produksi yaitu mencapai 25 persen (Kementerian Perindustrian, 2020). Namun dari hasil regresi penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga energi dalam hal ini gas secara statistik tidak signifikan dalam menentukan daya saing sektor industri TPT Indonesia. Hal ini bisa dikarenakan bahwa 95 persen bahan baku tekstil Indonesia terutama kapas berasal dari impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri hulu teknis Indonesia kurang berkembang dimana industri hulu tersebut sangat membutuhkan gas sebagai bahan baku. Dengan demikian, untuk saat ini dapat dikatakan harga gas belum begitu besar memengaruhi industri teknis dan produk teknis secara menyeluruh. Oleh karenanya untuk mengurangi impor bahan baku, pemerintah perlu mendorong dan mendukung kemajuan industri hulu teknis dalam negeri dengan berbagai kebijakan, salah satunya dengan mengurangi harga gas. Pada dasarnya di bulan April 2020, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi penurunan tarif gas industri (Permen ESDM No. 8 Tahun 2020), meskipun regulasi tersebut dianggap terlalu lama disahkannya mengingat sebelumnya sudah ada regulasi yang mengatur harga tentang penetapan harga gas bumi untuk industri, yaitu Perpres No. 40 Tahun 2016. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah harus segera mengimplementasikannya guna mendorong industri di Indonesia terutama industri hulu yang sangat membutuhkan gas sebagai bahan baku.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil analisis indeks RCA menunjukkan bahwa pada tahun 2000 hingga tahun 2005 nilai RCA ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke pasar ASEAN kurang dari 1, hal ini menunjukkan bahwa ekspor tekstil dan produk tekstil memiliki keunggulan komparatif dan daya saing ke pasar ASEAN. Namun pada tahun 1999 sampai tahun 2005-2019 nilai RCA ekspor tekstil Indonesia ke pasar ASEAN justru terus mengalami penurunan dengan nilai kurang dari 1, hal ini menunjukkan bahwa ekspor tekstil Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif dan daya saing yang kuat ke pasar ASEAN
- b. Negara di ASEAN yang memiliki daya saing ekspor komoditas TPT untuk di pasar ASEAN adalah Kamboja dari tahun 2000-2007 yang memiliki nilai RCA di atas 1. Namun setelahnya, Vietnam memiliki keunggulan kompetitif yang kuat untuk komoditas TPT di pasar ASEAN. Bahkan di tahun 2019, beberapa negara seperti Myanmar dan Thailand memiliki nilai RCA yang melaju tinggi lebih dari 1, sementara Indonesia berada di bawah 1. Hal ini menandakan semakin banyak negara di ASEAN yang memiliki keunggulan komparatif untuk produk ASEAN lebih kuat dari Indonesia seperti Vietnam, Thailand dan Myanmar.
- c. Terhambatnya daya saing Indonesia bisa disebabkan berbagai faktor, di antaranya rendahnya teknologi, ketergantungan impor bahan baku, minimnya industri pendukung, rendahnya sumber daya manusia, keterbatasan modal kerja, pasokan listrik, agresif dan dinamisnya produk TPT, lemahnya kinerja ekspor, persoalan transportasi, serta persoalan perpajakan (Ragimun, 2010).
- d. Berdasarkan hasil olah data menggunakan analisis regresi *ordinary least square* menunjukkan bahwa secara statistik, variabel independen (REER, harga ekspor, investasi dan harga energi) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap daya saing ekspor tekstil sebesar 83,9 persen. Sementara itu, 16,1 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.
- e. Variabel independen REER, harga ekspor, dan investasi secara statistik signifikan dan berhubungan negatif dengan daya saing ekspor TPT Indonesia di Kawasan ASEAN. Sementara itu harga energi atau dalam hal ini gas secara statistik tidak berpengaruh signifikan menjelaskan daya saing industri TPT.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini yang berjudul "Analisis Daya Saing Industri Tekstil dan Produk

Tekstil Indonesia di Kawasan ASEAN", diketahui bahwa daya saing industri TPT Indonesia di Kawasan ASEAN justru mengalami penurunan bahkan lebih rendah dari beberapa negara lainnya seperti Vietnam, Thailand dan Myanmar. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait untuk kembali meningkatkan daya saing Indonesia. Adapun beberapa saran atau rekomendasi yang disampaikan adalah:

- a. Dari hasil penelitian dan berbagai literatur diketahui bahwa salah satu permasalahan terbesar terhambatnya daya saing TPT Indonesia ialah ketergantungan industri ini terhadap bahan baku impor yang mengakibatkan harga ekspor menjadi kurang kompetitif. Terkait hal tersebut pemerintah perlu mengevaluasi kembali terhadap regulasi atau kebijakan impor bahan baku yang dianggap memberatkan pelaku industri TPT, mengingat kebutuhan bahan baku industri TPT masih belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari domestik. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberi perhatian terhadap banyaknya impor produk tekstil dengan merevisi terhadap bea masuk produk tekstil. Dengan demikian, pemerintah tetap melindungi sisi hilir dengan tetap memberi insentif pada sisi hulu.
- b. Selain kebijakan membatasi aliran bahan baku impor yang masuk, pemerintah juga perlu mendorong perkembangan industri hulu dalam negeri agar dapat bersaing dengan negara lain.
- c. Kurang berkembangnya industri hulu bisa disebabkan berbagai macam faktor baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), teknologi dan harga bahan baku seperti gas. Terkait SDM, perlu ditingkatkan SDM terampil dengan mengembangkan kurikulum pada SMK terkait agar *link and match* dengan kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak baik universitas maupun asosiasi dalam menyediakan pelatihan dan pengembangan seperti pengembangan kewirausahaan, pelatihan dalam membuat variasi desain hasil produk tekstil, dan lain-lain kepada industri produk tekstil skala kecil, seperti konveksi.
- d. Dari sisi teknologi, pemerintah diharapkan untuk terus memantau dan membantu perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan kembali program peremajaan mesin dan teknologi industri dalam hal restrukturisasi mesin pada industri TPT.
- e. Terkait energi, pemerintah harus memastikan harga khusus energi gas pada industri TPT terlaksana dan juga memberikan pasokan energi yang memadai untuk industri TPT agar produktivitas tekstil dapat meningkat dan memberikan daya saing yang kuat pada ekspor tekstil Indonesia.

Daftar Pustaka

ASEAN Secretariat. ASEAN Key Figures 2019. Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2019

- Asmara, A., Purnamadewi, Y. L., & Meiri, A. (2015). Struktur Biaya Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 11(2), 110-118. <https://doi.org/10.17358/jma.11.2.110-118>
- Badan Pusat Statistik. 2020. PDB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Menurut Lapangan Usaha. Diakses dari www.bps.go.id
- Balassa B. 1965. *The Theory of Economic Integration*. Homewood: Richard D. Irwin, Inc
- Bank Indonesia. 2015. Analisis Daya Saing dan Strategi Industri Nasional di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Perdagangan Bebas. Working Paper: WP/3/2015
- CNBC Indonesia. 2019. Sayonara! Era Upah Murah Berakhir, RI Disalip Vietnam Cs. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190911142240-4-98658/sayonara-era-upah-murah-berakhir-ri-disalip-vietnam-cs>. Pada tanggal 15 Juli 2020
- Foss, N. J. (1996). Research in strategy, economics, and Michael Porter. *Journal of Management Studies*, 33(1), 1-24. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1996.tb00796.x>
- Fred Stlouisfed. 2020. REER. fred.stlouisfed.org
- Fuadi, Faiq. 2018. Analisis Penawaran Eksport Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia Ke ASEAN (Studi Kasus Negara Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina Dan Kamboja). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. JDEP Vol. 1 No.2 (2018): Agustus 2018
- Hinloopen, J., & Van Marrewijk, C. (2008). Empirical relevance of the Hillman condition for revealed comparative advantage: 10 stylized facts. *Applied Economics*, 40(18), 2313-2328. <https://doi.org/10.1080/00036840600949488>.
- Industry. 2019. 99 Persen Kapas Bahan Baku Tekstil Masih Impor. Diakses dari <https://www.industry.co.id/read/48664-wow-99-persen-kapas-bahan-baku-tekstil-masih-impor>
- Isventina, I., Nuryartono, N., & Hutagaol, M. P. (2018). Analisis Daya Saing Sektor Industri Prioritas Indonesia Dalam Menghadapi Pasar ASEAN. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 71-93. <https://doi.org/10.29244/jekp.v4i1.19924>
- ITC. 2020. TradeMap. Bilateral trade between Indonesia and Association of South-East Asian Nations (ASEAN) IHS Code 50-63. Diakses melalui https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpmp=1%7c360%7c%7c%7c24%7c63%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1

- Kementerian Perindustrian. 2012. "Indonesia Kurang Bahan Baku Tekstil". Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/3983/Indonesia-Kurang-Bahan-Baku-Tekstil>
- _____. 2015a. "Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT Serta Industri Alas Kaki Tahun Anggaran 2015". Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/11295/Program-Restrukturisasi-MesinPeralatan-Industri-TPT-Serta-Industri-Alas-Kaki-Tahun-Anggaran-2015>
- _____. 2015b. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian
- _____. 2020. "Menperin: Penurunan Harga Gas Industri Topang Daya Saing Manufaktur". Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/21572/Menperin:-Penurunan-Harga-Gas-Industri-Topang-Daya-Saing-Manufaktur>
- Kementerian ESDM. Handbook of Energy and Economics Statistic of Indonesia 2005-2019
- Kotabe, M and K. Helsen. 2001. Global Marketing Management 5th edition
- Krugman, P., 1996. Domestic Distortions and the Deindustrialization Hypothesis, *NBER Working Paper Series*, WP 5473.
- Kuncoro, A., 2006. Firm Structure, Conduct and Competitiveness in Indonesian Manufacturing: Before and After the 1998 Economic Crisis, *Economics and Finance in Indonesia*, 54 (2): 139-173.
- Kurniadi, D. S., Syarief, R., & Suryani, A. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Produk Tekstil di PT Priangan Sentosa Tasikmalaya, Jawa Barat. MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah, 12(1), 63-74. <https://doi.org/10.29244/mikm.12.1.63-74>.
- Leichenko, R. M., Erickson, R. A. (1997). Foreign direct investment and state export performance, *Journal of Regional Science*, 37(2), 307-329.
- Lipsey R, Courant P, Purvis D, Steiner P. 1997. Pengantar Makroekonomi. Maulana A, Penerjemahan. Jakarta: Bina Aksara *Pengantar Makroekonomi*.
- Lukmana, Hendra. 2016. Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor Tekstil Indonesia ke Pasar Korea Selatan Tahun 1992-2016. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/61197/10/NASKAH%20PUBLIKASI-277.pdf>
- Maidir, I., 2006. "Daya Saing Tekstil dan Produk Tekstil Pasca Penghapusan Kuota", *Analisis CS/S*, 35(3): 271-288.
- Muttoharoh, Viza; Nurjanah Rahma; & Mustika, Candra. (2018). Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor Kopi Arabika Indonesia di Pasar

- Internasional. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No. 3, September – Desember 2018. ISSN: 2303-1255
- Octavia, Emilia dan Pratiwi, Dwi Resti. 2020. Perkembangan Dan Hambatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT). Buku Tinjauan Kritis atas Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan. Pusat Kajian Anggaran
- Platts, K., Gregory, M., & Richards, H. (1996). Performance measurement system design: should process based approaches be adopted?. *International journal of production economics*, 46, 423-431
- Porter, M. (1990). *The Competitive Advantage of Nations* (First Free Press Edition 1990). New York: Free Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-11336-1>
- _____. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. *Economic Development Quarterly*, 14(1), 15-34. <https://doi.org/10.1177/089124240001400105>
- Popovici, Oana Cristina, 2017. *The Role of Foreign and Domestic Investment in Promoting Exports and Imports. A Dynamic Panel Approach*. Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy. Diakses dari <https://ideas.repec.org/p/smo/wpaper/16.html>
- Prasetyani, D., Abidin, A. Z., Purusa, N. A., & Sandra, F. A. (2020). The Prospects and The Competitiveness of Textile Commodities and Indonesian Textile Product in the Global Market. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*, 19 (1), 1 – 18. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.12886>.
- Ragimun. 2018. “Daya Saing Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia dan Vietnam ke Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok”. Kementerian Keuangan RI. Jakarta. Diakses dari <http://jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/view/194>. Tanggal Akses 19 September 2020
- _____. 2010. “Analisis Kinerja Industri TPT Indonesia”. Badan Kebijakan Fiskal. *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol 14 No 4 Desember 2010
- Rosalina, A. (2013). Analisis Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Provinsi Jawa Barat tahun 1981-2010. Skripsi. Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor
- Sugiyanto. 2004. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 1(1): 14-27.
- Tambunan, T. (2002). Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, Teori dan temuan Empiris, LP3ES, Jakarta
- Thurow, Lester C. 2009. Building Wealth: The New Rules of Individuals, Companies, And Nations in A Knowledge Based Economy. Diakses dari <https://www.scribd.com/read/163631366/Building-Wealth-The-New-Rules-for-Individuals-Companies-and-Nations-in-a-Knowledge-Based-Economy>

- UGM, 2016. Nilai Tukar. Diakses dari macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/nilai-tukar/
- UNComtrade. 2020. UnComtrade Database. <https://comtrade.un.org/data/>
- Wang, C., Buckley, P. J., Clegg, J., Kafouros, M. (2007). The Impact of Inward Foreign Direct Investment on The Nature and Intensity of Chinese Manufacturing Exports, Transnational Corporations, 16(2), 123-140.
- Wardhani, R., & Agustina, Y. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Daya Saing Pada Sentra Industri Makanan Khas Bangka Di Kota Pangkalpinang. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 10(2), 64-96. doi:10.19184/jauj.v10i2.1252
- Wengel, I. dan Rodriguez, E. R. 2006. "Productivity and Firm Dynamics: Creative Destruction in Indonesian Manufacturing, 1994-2000," *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 42(3): 341-55
- WITS. 2020. UnComtrade for WITS. <http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/QuickQuery/ComtradeByProduct/ComtradeByProduct.aspx?Page=COMTRADEByProduct>
- World Economic Forum. 2019. The Global Competitiveness Index 2019
- Zheng P., Siler P., Giorgioni G. (2004). FDI and the Export Performance of Chinese Indigenous Firm: A Regional Approach, The Journal of Chinese Economic and Business Studies, 2(1), 55-71.
- Zuhroh, I., & Kaluge, D. 2007. Dampak Pertumbuhan Nilai Tukar Riil Terhadap Pertumbuhan Neraca Perdagangan Indonesia (Suatu Aplikasi Model Vector Autoregressive, VAR). Journal of Indonesian Applied Economics, 1(1). doi:<http://dx.doi.org/10.21776/ub.jiae.2007.001.01.3>

OPTIMALISASI PENERIMAAN LABA BUMN SEKTOR PERBANKAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PNBP

Optimization of Income in the Banking Sector SOE Income as an Effort to Increase PNBP

Martha Carolina

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: martha.carolina@dpr.go.id

Abstract

This study aims to analyze the reasons for the inadequate income of state-owned enterprises (BUMN) in the banking sector and the government's efforts to strengthen these enterprises to increase Non-Tax State Revenues (PNBP). This research is a descriptive quantitative research. The study results show that state-owned enterprises in the banking sector need to improve financial performance to increase PNBP of Separated State Assets (KND). The results showed that this study had passed the classic assumption test. The F test shows that the independent variables simultaneously affect the dependent variable with a significant value of 0.000. The study shows that return on assets/ROA (X_1) affects DPR (Y), ROA has a positive effect on DPR. While the variable capital adequacy ratio/CAR (X_2) affects the DPR (Y). CAR has a positive effect on DPR. Realization of PNBP KND in 2017/2018, 2018/2019, and 2019/2020 always exceeded the target of Non-Tax State Revenues of Separated State Assets (PNBP KND).

Keywords: dividend yields ratio, Non-Tax State Revenues (PNBP), BUMN profits, dividends for the government, State Owned Enterprise (SOE)

1. Pendahuluan

Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia disusun dengan konsep anggaran defisit. Defisit APBN tahun 2020 sebesar -1.039,22 triliun meningkat 234,87 persen dibandingkan defisit tahun 2015 sebesar -310,33 triliun (Tabel 1). Defisit negara disebabkan oleh kebijakan belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara akibat perwujudan komitmen pemerintah untuk mencapai target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Terlebih lagi, pada tahun 2020 pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus yang menyebabkan belanja negara semakin meningkat melebihi pendapatan negara. Rasio belanja

negara tahun 2015-2020 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,6-16,7 persen. Sedangkan rasio pendapatan negara tahun 2015-2019 sebesar 10-14 persen terhadap PDB. Peningkatan belanja negara seharusnya diimbangi dengan pendapatan negara agar defisit APBN tidak semakin melebar.

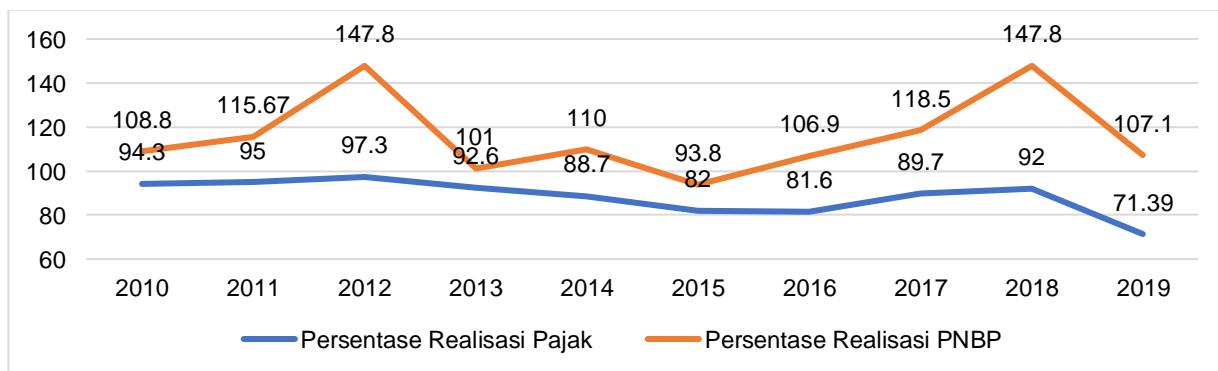
Tabel 1. Perkembangan Defisit APBN tahun 2015-2019 (dalam triliun Rp)

	Perpres 72/2020	LKPP 2019	LKPP 2018	LKPP 2017	LKPP 2016	LKPP 2015
Pendapatan Negara & Hibah	1.699,94	1.943,67	1.928,1	1.654,7	1.546,9	1.496
Belanja Negara	2.739,16	2.213,11	2.220,65	2.007,35	1.864,27	1.806,33
Surplus (Defisit) Anggaran	-1.039,22	-269,44	-292,55	-352,65	-317,37	-310,33

Sumber: Kemenkeu, diolah

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yaitu dengan menetapkan target penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN. Target penerimaan pajak dalam satu dekade masih di bawah target APBN. Hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan pajak dari sektor migas yang disebabkan oleh melemahnya harga minyak dunia pada semester pertama tahun 2019, banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai salah satu instrumen stimulus perekonomian, dan pertumbuhan restitusi pajak yang cukup tinggi. Di sisi lain, perkembangan kinerja realisasi PNBP memiliki kinerja yang positif melebih target, kecuali untuk tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dari target. Realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh kinerja PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KND), PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan peran PNBP sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan program-program pemerintah.

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Tahun 2010-2019 (dalam persen)

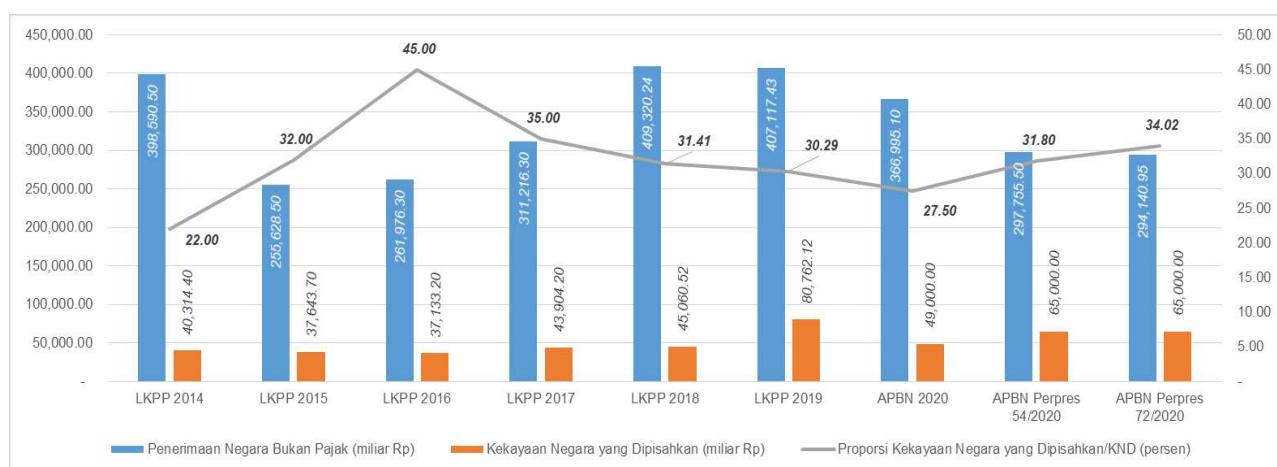


Sumber: Kemenkeu, diolah

Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19, realisasi PNBP Semester 1 mencapai Rp184,5 triliun atau 62,7 persen dari targetnya dalam Perubahan APBN Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2020 atau tumbuh sebesar negatif 11,8 persen. Salah satu yang menyebabkan menurunnya realisasi PNBP pada semester 1 2020 yaitu berasal dari turunnya PNBP pengelolaan Kekayaan

Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar 32,7 persen pada realisasi semester 1 tahun 2020 yang dipengaruhi oleh di antaranya kinerja penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih rendah karena adanya penundaan RUPS BUMN khususnya Non Himbara dan penerimaan sisa Surplus BI yang terealisasi pada semester 1 tahun 2020 sebesar Rp21,5 triliun lebih rendah dibanding tahun 2019 sebesar Rp30,1 triliun. Di sisi lain, terjadi penurunan realisasi semester 1 tahun 2020 terhadap PNBP sumber daya alam (SDA) yang disebabkan oleh turunnya harga minyak mentah, *lifting*, dan harga komoditas sebagai penopang utama penerimaan SDA yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

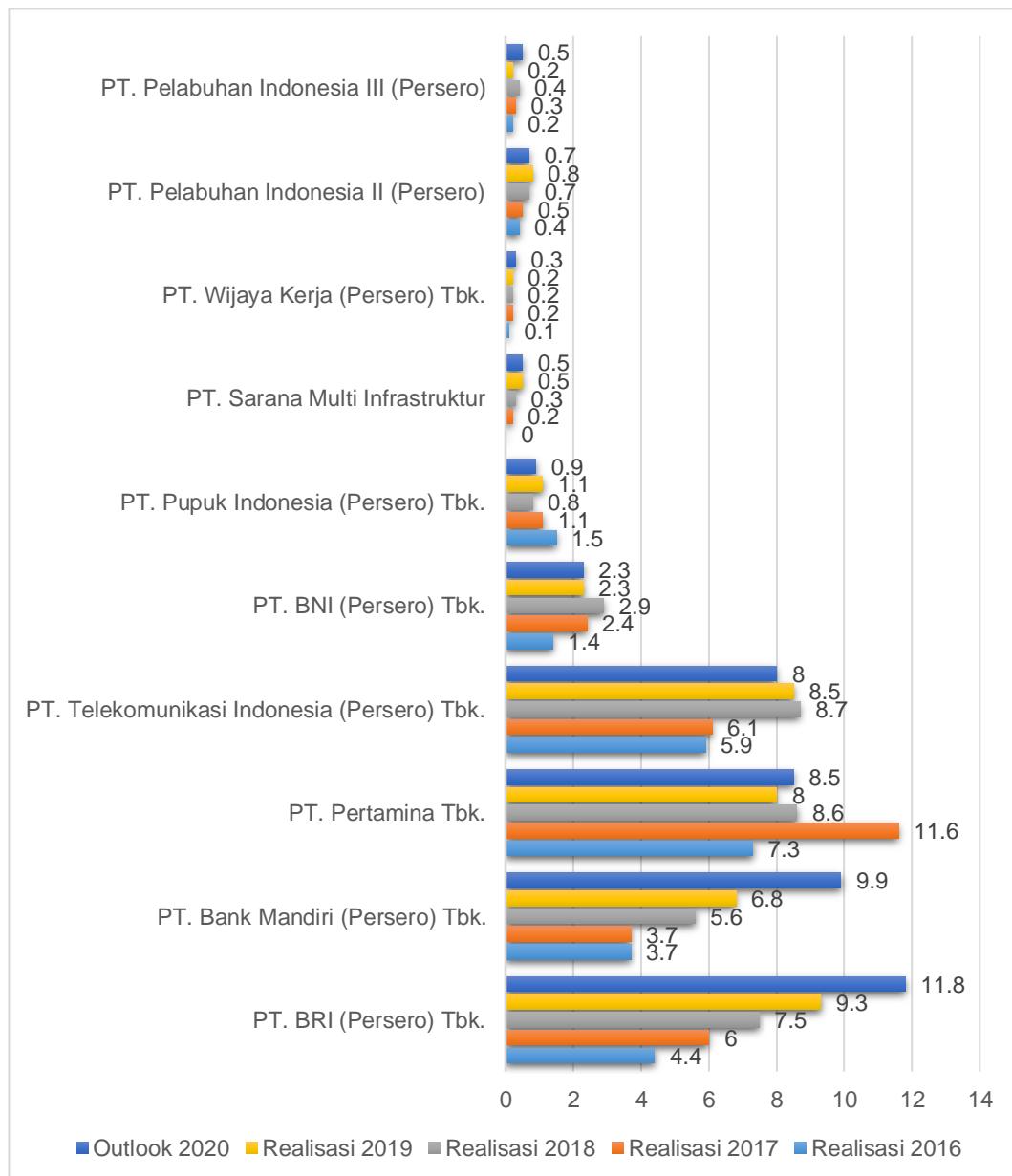
Gambar 2. PNBP Kekayaan Negara Yang Dipisahkan/KND



Sumber: Kementerian Keuangan, berbagai tahun, diolah

PNBP dari pengelolaan KND terdiri atas pendapatan dari bagian pemerintah atas laba BUMN yaitu berupa dividen yang menjadi bagian pemerintah dan pendapatan dari KND lainnya. Pendapatan dari bagian pemerintah atas laba BUMN berupa dividen bagian pemerintah merupakan kontributor terbesar dalam akun pendapatan dari KND tersebut, sedangkan pendapatan dari KND lainnya antara lain berasal dari sisa surplus Bank Indonesia (BI), pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nota Keuangan APBN TA 2020 ditetapkan target PNBP dari hasil pengelolaan KND sebesar Rp49,00 triliun. PNBP bagian pemerintah atas laba BUMN 10 terbesar tahun 2016-2020 di antaranya berasal dari dividen bagian pemerintah dari BUMN sektor perbankan yaitu sebesar Rp19,83 triliun atau 40,48 persen dari target PNBP dari hasil pengelolaan KND dalam Nota Keuangan APBN TA 2020 (Gambar 3). Berdasarkan Nota Keuangan dalam APBN TA 2020, target PNBP bagian pemerintah dari sektor perbankan yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Dengan demikian, keempat BUMN perbankan dimaksud akan berkontribusi besar terhadap pencapaian target PNBP dari hasil pengelolaan KND TA 2020.

Gambar 3. PNBP Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN 10 Terbesar 2016-2020 (dalam triliun Rp)



Sumber: Kemenkeu, diolah

Besaran dividen bagian pemerintah (PNBP KND) yang berasal dari laba BUMN) dihitung dengan rumus berikut:

$$PNBP\ KND = \text{Laba Bersih yang Diatribusikan ke pemilik Entitas Induk} \times DPR \times \text{Persentase Kepemilikan Saham Pemerintah}$$

Dimana:

PNBP KND : Dividen bagian pemerintah

DPR : Dividend Payout Ratio

Laba bersih yang diatribusikan ke pemilik induk merupakan laba bersih yang dalam perhitungannya telah mengeluarkan kepentingan non-pengendali. Laba bersih yang diatribusikan ke pemilik induk dan persentase kepemilikan pemerintah dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan sebagai alat untuk pengukuran kinerja masa lalu dan memproyeksikan kinerja laba di masa mendatang. Sementara persentase kepemilikan saham menunjukkan porsi kepemilikan saham pemerintah dari total saham yang dimiliki perseroan. *Dividend Payout Ratio* (DPR) atau rasio yang menunjukkan persentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham secara tunai (van Home & Wachowicz, 2009). DPR menunjukkan persentase laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen kas, biasanya untuk periode 1 (satu) tahun buku.

Laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk dipengaruhi oleh kinerja keuangan BUMN. Persentase kepemilikan saham pemerintah dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kinerja keuangan. Ada banyak faktor yang memengaruhi DPR menurut hasil penelitian Musiega et.al (2013) dan Rehman & Takumi (2012) di antaranya rasio profitabilitas dan rasio kecukupan modal. Dalam penelitian ini faktor yang memengaruhi profitabilitas yaitu *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula arus kas dalam perusahaan dan diharapkan perusahaan akan membayar dividen yang lebih tinggi (Ismiyanti dan Mahadwartha, 2005). Menurut hasil penelitian Perpatih (2016) dan Lanawati dan Amilin (2015), ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR sedangkan menurut Silfiana & Rachmawati (2015), ROA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR. Dalam penelitian ini faktor yang memengaruhi faktor kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian (Achmad & Kusumo, 2003). Menurut hasil penelitian Purba (2019), CAR berpengaruh signifikan terhadap DPR pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016. Hubungan antara CAR terhadap DPR adalah positif, artinya penambahan CAR akan mengurangi beban perusahaan dan meningkatkan laba perusahaan sehingga meningkatkan DPR. Sedangkan menurut Karauan (2017) CAR tidak berpengaruh terhadap DPR pada bank BUMN yang *go public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

Berdasarkan fenomena dan identifikasi masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan bank yang memengaruhi laba yang diatribusikan kepada pemilik dan persentase kepemilikan pemerintah, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) dan rasio kecukupan modal (CAR) secara bersama-sama (simultan) terhadap DPR pada bank BUMN, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap DPR pada bank BUMN, dan untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal (CAR) terhadap DPR pada bank BUMN, serta untuk mengetahui target dan realisasi PNBP KND atas laba BUMN sektor perbankan agar menemukan formulasi target yang tepat untuk penerimaan PNBP KND BUMN sektor perbankan karena hasil realisasi selalu lebih besar dari target selama ini. Alasan

dipilihnya sektor perbankan karena PNBP dari hasil pengelolaan KND atas laba BUMN sektor perbankan dalam Nota Keuangan APBN TA 2020 sebesar 40,48 persen dari target PNBP KND.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 2018 Tentang PNBP dinyatakan bahwa PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP terdiri dari PNBP sumber daya alam (SDA), PNBP KND, PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

2.2. PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Berdasarkan Nota Keuangan APBN TA 2021, PNBP KND terdiri atas pendapatan pemerintah atas laba BUMN dan pendapatan dari KND lainnya. Pendapatan pemerintah atas laba BUMN memberikan kontribusi terbesar sisa surplus Bank Indonesia (BI) dan pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan teknis PNBP dari pengelolaan KND yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN guna menghasilkan laba bersih yang optimal dengan memperhatikan profitabilitas BUMN khususnya BUMN yang memberikan kontribusi dividen terbesar begitu pula, tingkat solvabilitas atau kemampuan pendanaan perusahaan berdasarkan rasio-rasio keuangan seperti *Debt to Equity Ratio* (DER), CAR, *Asset to Liability Ratio*, *Risk Based Capital (RBC)*, dan *Gearing Ratio*. Penentuan dividen BUMN juga perlu memperhatikan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi sehingga tidak menurunkan nilai pasar yang terdaftar di bursa saham dan keberlangsungan usaha BUMN serta tidak melanggar regulasi atau perjanjian (*covenant*) yang mengikat BUMN. PNBP KND atau dividen yang menjadi bagian pemerintah dihitung dengan rumus:

$$\text{PNBP KND} = \text{Laba Bersih yang Diatribusikan ke pemilik Entitas Induk} \times \text{DPR} \\ \times \text{Persentase Kepemilikan Saham Pemerintah}$$

Dimana:

PNBP KND : dividen bagian pemerintah

DPR : *Dividend Payout Ratio*

2.3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pembentukan BUMN merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengamanatkan bahwa sumber-sumber perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. BUMN dalam kegiatannya menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan siklus ekonomi juga sebagai agen pembangunan yaitu BUMN melakukan upaya pembangunan di segala sektor yang memiliki urgensi tinggi untuk memberikan efek manfaat bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, BUMN juga menyerahkan bagian dari keuntungannya berupa dividen kepada pemerintah sebagai penerimaan negara.

2.4. Dividen

Dividen merupakan bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham (*shareholder*). Dalam sebuah perseroan, penentuan pembagian dividen (waktu dan besarnya) didasarkan pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perusahaan dapat membagi dividen kepada *shareholder* dalam bentuk tunai (*cash dividend*) maupun dalam bentuk saham (*stock dividend*). Dividen sebagai bentuk imbal hasil kepada pemegang saham juga merupakan pengurang ekuitas perusahaan. Pengukuran dividen dalam penelitian menggunakan rumus:

$$\text{Dividend Payout Ratio (DPR)} = \frac{\text{Dividend}}{\text{Earnings}}$$

2.5. Teori Kebijakan Dividen

Beberapa teori yang berkaitan dengan penyusunan target PNBP, DPR yang berasal dari laba BUMN di antaranya *agency theory*, *bird in the hand theory*, dan *residual dividend theory*.

a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Aspek-aspek masalah keagenan selalu dimasukkan ke dalam keuangan perusahaan, karena banyaknya keputusan keuangan yang diwarnai oleh masalah keagenan seperti kebijakan hutang. Teori keagenan mempunyai hubungan dengan kebijakan dividen suatu perusahaan. Suatu ketika apabila tingkat keagenan tinggi maka hal ini dapat menjadi pertanda buruk bagi pemegang saham. Pemegang saham akan mendapatkan dividen yang rendah, hal ini disebabkan manajer akan menggunakan dana-dana secara berlebih dan akan berdampak pada penurunan profitabilitas perusahaan.

b. *The-Bird-In-The-Hand Theory*

Teori ini menyatakan bahwa biaya modal sendiri akan naik apabila DPR rendah. Hal ini dikarenakan investor lebih suka menerima laba dibagikan dalam bentuk dividen daripada *capital gains*.

c. Teori Dividen Residual (*Residual Dividends Theory*)

Teori ini menyatakan pembayaran dividen dilakukan apabila perusahaan mempunyai dana sisa dari laba setelah melakukan pembiayaan berbagai investasi yang memiliki *Net Present Value* positif dengan memakai pendapatan perusahaan yang ditahan (*retained earnings*).

d. Faktor - faktor Yang Memengaruhi Dividen

Faktor yang memengaruhi dividen dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas (ROA) dan rasio solvabilitas (CAR). Hal ini disebabkan ketika melakukan uji asumsi klasik hanya variabel ROA dan CAR yang memenuhi semua uji asumsi klasik. Menurut Kasmir (2016), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas adalah ROA. Di sisi lain, rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur solvabilitas adalah CAR.

2.6. Pengaruh ROA Terhadap DPR

Dividen diambil dari laba bersih. Oleh karena itu, ROA akan memengaruhi DPR. Perusahaan yang semakin besar keuntungannya (ROA) akan membayar porsi pendapatan yang semakin besar sebagai dividen. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha₁: ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR.

2.7. Pengaruh CAR Terhadap DPR

CAR adalah menunjukkan kesehatan suatu bank, maka bank yang sehat bisa secara signifikan meningkatkan laba yang pada gilirannya akan meningkatkan DPR. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha₂: CAR berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR.

2.8. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan suatu teknik atau alat untuk mengevaluasi kondisi finansial dan kinerja sebuah organisasi perusahaan (Darmawi, 2011). Kinerja bank atau kesehatan bank diukur dan dinilai dengan pendekatan rasio keuangan. Adapun rasio-rasio keuangan tersebut antara lain meliputi:

a. Kualitas Aset

Kualitas aset dijelaskan oleh rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Rasio ini menunjukkan persentase komposisi kredit bermasalah dari total kredit yang disalurkan oleh bank. Kredit macet yang dimaksud dalam hal ini adalah kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.

$$NPL = \left(\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \right) \times 100\%$$

Semakin kecil rasio NPL artinya semakin baik, diartikan bank mampu mengelola portofolio kreditnya dengan baik, dan bank mampu menyalurkan kredit secara hati-hati (cermat) dan tepat sasaran.

b. Rentabilitas (Profitabilitas)

Rentabilitas (profitabilitas) dijelaskan oleh beberapa rasio antara lain:

- 1) *Nett Interest Margin (NIM)*. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dan aset produktif.

$$NIM = \left(\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Total Aset Produktif}} \right) \times 100\%$$

Semakin besar NIM artinya semakin baik, diartikan bank mampu mengelola aset produktif secara baik untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih yang semakin besar.

- 2) *Return on Asset (ROA)*. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dan aset.

$$ROA = \left(\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100\%$$

Semakin besar ROA artinya semakin baik, diartikan bank mampu mengelola aset secara baik untuk menghasilkan laba sebelum pajak yang semakin besar

- 3) *Return on Equity (ROE)*. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dan ekuitas.

$$ROE = \left(\frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \right) \times 100\%$$

Semakin besar ROE artinya semakin baik, diartikan bank mampu mengelola ekuitas secara baik untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak yang semakin besar.

- 4) Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional.

$$BOPO = \left(\frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \right) \times 100\%$$

Semakin kecil BOPO artinya semakin baik, diartikan bank mampu mengelola biaya operasional secara baik dan efisien efektif untuk menghasilkan pendapatan operasional yang semakin besar.

c. Likuiditas

Likuiditas dijelaskan oleh rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total kredit dan total dana pihak ketiga.

$$LDR = \left(\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \right) \times 100\%$$

Semakin kecil rasio LDR artinya semakin baik, diartikan bank mampu menyediakan dana untuk kewajiban jangka pendek (dana pihak ketiga) yang sewaktu-waktu bisa saja ditarik atau dicairkan oleh nasabah.

d. Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang merepresentasikan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Rasio kecukupan modal dijelaskan oleh CAR. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.

$$CAR = \left(\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \right) \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio CAR artinya semakin baik, diartikan permodalan bank mampu membiayai aset.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data-data rasio keuangan bank dan data yang diperlukan kemudian dilakukan analisis untuk mengukur hubungan ROA dan CAR terhadap DPR dengan metode analisis regresi yang disebut *Ordinary Least Square* (OLS).

3.2. Obyek dan Sampel Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank BUMN yang telah diaudit dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2019. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur NPL, NIM, ROA, ROE, BOPO, LDR, CAR. Sampel penelitian yaitu empat bank BUMN antara lain BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (Y) yaitu DPR, variabel independen (X_1) yaitu rasio *profitabilitas* (ROA) dan variabel independen (X_2) yaitu rasio kecukupan modal (CAR).

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data secara manual untuk menghitung besarnya NPL, NIM, ROA, ROE, BOPO, LDR, CAR, dan PNBP KND atau setoran dividen pemerintah. Kemudian hasil pengolahan data akan disajikan dalam bentuk-bentuk tabel yang mencerminkan penghitungan dan dijelaskan dengan kalimat. Teknik analisis data untuk analisis hubungan ROA dan CAR terhadap DPR dengan menggunakan analisis regresi (OLS).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Sampel Penelitian

Aliran modal masuk melalui FDI ke ASEAN mengalami peningkatan tiap tahunnya terutama sejak tahun 2015 hingga 2018. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010-2019. Perusahaan BUMN sektor perbankan yang terdaftar di BEI berjumlah 4 perusahaan yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Periode penelitian sebanyak 10 tahun, maka jumlah data yang diteliti dalam penelitian ini menjadi 40 data laporan keuangan perusahaan.

4.2. Kinerja Keuangan Bank BUMN

Melalui perhitungan rasio keuangan, kinerja keempat bank BUMN tersebut selama 10 tahun terakhir (2010 hingga 2019) sebagai berikut:

Tabel 2. Kinerja Keuangan Bank BUMN Tahun 2010-2019

Non Performing Loans (NPL)												Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
BNI	1.11	0.51	0.8	0.5	0.4	0.9	0.4	0.7	0.8	1.2	0.732	1.145	
BRI	0.74	0.42	0.41	0.35	0.36	1.22	1.09	0.88	0.92	1.04	0.743		
BTN	2.66	2.23	3.12	3.04	2.76	2.11	1.85	1.66	1.83	2.96	2.422		
Mandiri	0.6	0.5	0.37	0.37	0.44	0.6	1.38	1.06	0.67	0.84	0.683		
Nett Interest Margin (NIM)												Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
BNI	5.78	6.03	5.9	6.2	6.3	6.4	6.4	5.5	5.3	4.9	5.871	6.868	
BRI	10.77	9.58	8.42	34.11	8.51	7.85	8	7.92	7.45	6.98	10.959		
BTN	5.99	5.76	5.83	5.44	4.47	4.87	4.98	4.76	4.32	3.32	4.974		
Mandiri	5.39	5.29	5.58	5.68	5.94	5.9	6.29	5.63	5.52	5.46	5.668		
Return on Asset (ROA)												Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
BNI	2.49	2.94	2.9	3.4	3.5	2.6	2.6	2.7	2.8	3.17	2.91	2.851	
BRI	4.64	4.93	5.15	0.31	4.74	4.19	3.84	3.69	3.68	2.6	3.777		
BTN	2.05	2.03	1.94	1.79	1.14	1.61	1.76	1.71	1.34	0.13	1.55		
Mandiri	3.5	3.37	3.55	3.66	3.57	3.15	1.95	2.72	3.17	3.03	3.167		
Return on Equity (ROE)												Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
BNI	24.7	20.1	20	22.5	23.6	17.2	17.2	15.6	16.1	14	19.1	20.82025	
BRI	43.83	42.49	38.66	5.03	31.22	29.89	23.08	20.03	20.49	19.41	27.413		
BTN	16.56	17.65	18.23	16.05	10.95	16.84	18.35	18.11	14.89	1	14.863		
Mandiri	33.09	25.57	27.23	27.31	25.81	23.08	11.12	14.53	16.23	15.08	21.905		
Biaya operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPD)												Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
BNI	75.99	72.58	71	67.12	69.78	75.5	75.5	71	70.2	73.2	72.187	70.9455	
BRI	70.86	66.69	59.93	60.58	8.51	66.69	68.69	69.14	68.4	70.1	60.959		
BTN	82.39	81.75	80.74	82.19	88.97	84.83	82.48	82.06	85.58	98.12	84.911		
Mandiri	42.4	67.22	63.93	62.41	64.98	69.67	80.94	71.78	66.48	67.44	65.725		
Loan to Deposit Ratio (LDR)												Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
BNI	70.5	70.37	77.52	85.3	87.8	87.8	85.6	88.8	91.5	83.299	89.342		
BRI	75.2	76.2	79.85	88.54	81.68	86.88	87.77	87.44	88.96	88.64	84.116		
BTN	108.42	102.6	100.9	104.42	108.86	108.78	102.66	103.13	103.5	113.5	105.672		
Mandiri	65.44	71.65	77.66	82.97	82.02	87.05	85.86	89.25	100.2	100.7	84.281		
Capital Adequacy Ratio (CAR)												Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
BNI	18.63	17.63	16.7	15.1	16.2	19.5	19.5	18.5	18.5	19.7	17.996	18.056	
BRI	13.76	14.96	16.95	16.99	18.31	20.59	22.91	22.96	21.21	22.55	19.119		
BTN	16.74	15.03	17.69	15.62	14.64	16.97	20.34	18.87	18.21	17.32	17.143		
Mandiri	13.36	15.34	15.48	14.93	16.6	18.6	21.36	21.64	20.96	21.39	17.966		

* Jika rata-rata bank melebihi rata-rata industri, tercetak hijau, jika kurang dari rata-rata industri tercetak merah

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 2, rasio NPL Bank BTN lebih tinggi di atas rata-rata bank BUMN artinya BTN mempunyai banyak kredit bermasalah. Rasio NIM BNI, BTN dan Bank Mandiri rendah artinya bank belum mampu mengelola aset secara produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih yang semakin besar. Rasio ROA dan ROE BNI dan BTN di bawah rata-rata bank BUMN artinya laba sebelum pajak juga tidak besar disebabkan oleh pendapatan

bunga yang tidak besar. Rasio BOPO BNI dan BTN di atas rata-rata bank BUMN artinya bank belum mampu mengelola biaya operasional secara baik dan efisien sehingga mampu menghasilkan pendapatan operasional yang semakin besar. Rasio LDR BTN di atas rata-rata bank BUMN artinya bank mempunyai potensi masalah besar dalam hal likuiditas karena penyaluran kredit yang terlalu agresif. Rasio CAR BNI, BTN, dan Bank Mandiri lebih rendah dari rata-rata bank BUMN artinya permodalan bank belum dikelola dengan baik untuk membiayai aset.

Berdasarkan hasil analisa kinerja keuangan bank BUMN, hanya bank BRI yang telah memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan laba yang besar padahal berdasarkan teori *residual dividend*, pembayaran dividen akan dilakukan apabila perusahaan mempunyai sisa dari laba setelah melakukan pembiayaan berbagai investasi. Oleh karena itu, guna memaksimalkan PNBP KND atau setoran dividen kepada pemerintah dari laba bank BUMN maka perlu kebijakan teknis pengelolaan PNBP KND dan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja bank BUMN guna menghasilkan laba bersih yang optimal dengan memperhatikan profitabilitas BUMN khususnya BUMN yang memberikan kontribusi dividen terbesar.

4.3. Analisis Deskriptif Pengaruh ROA dan CAR Terhadap DPR

Pada bagian ini disajikan hasil statistik deskriptif dari variabel dependen (DPR) maupun variabel independen ROA dan CAR.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	40	0,13	5,15	2,8593	1,15261
CAR	40	13,36	22,96	18,0560	2,60302
DPR	48	0,1700000000	108,183483000	39,12587484	29,50694831
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data olahan SPSS, 2020

4.4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian model regresi linear dapat dilakukan apabila data pada penelitian ini memenuhi kriteria-kriteria uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, hasil uji autokorelasi, dan hasil uji multikolinearitas.

4.5. Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda dapat disusun sebuah persamaan berikut:

$$DPR = -98,601 + 11,605ROA + 6,220CAR + \varepsilon$$

4.5.1. Pengaruh ROA dan CAR Terhadap DPR (Uji F)

Uji F sebesar 34,792 dengan nilai signifikansi/sig. 0,000. Karena nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi DPR atau dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dan CAR perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap DPR.

Tabel 4. Uji Statistik F (ANOVA)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17260.418	2	8630.209	34.792	.000 ^b
	Residual	9177.835	37	248.050		
	Total	26438.253	39			

a. Dependent Variable: DPR

b. Predictors: (Constant), CAR, ROA

Sumber: Data olahan SPSS, 2020

4.5.2. Pengaruh ROA Terhadap DPR (Uji t/Uji Parsial)

Variabel ROA (X_1) terhadap DPR berdasarkan hasil uji t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,514 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Hasil ini menunjukkan H_a_1 diterima. Berdasarkan hasil uji t, perusahaan bank BUMN apabila mampu mengoptimalkan asetnya maka akan memberikan DPR yang lebih besar kepada pemegang saham. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Perpatih (2016) dan Lanawati dan Amalin (2015) ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR.

Tabel 5. Uji Statistik tCoefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-98.601	18.725		.000		
	ROA	11.605	2.188	.514	.000	1.000	1.000
	CAR	6.220	.969	.622	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: DPR

Sumber: Data olahan SPSS

4.5.3. Pengaruh CAR terhadap DPR (Uji t/Uji Parsial)

Uji hipotesis kedua adalah menguji CAR berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Hasil uji t koefisien regresi untuk CAR sebesar 0,622 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya CAR berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Hasil ini menunjukkan H_a_2 diterima. Berdasarkan hasil uji t, apabila bank BUMN mampu meningkatkan CAR maka akan menambah DPR. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Purba (2019), dimana CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR.

4.5.4. Koefisien Determinasi R²

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat hasil *adjusted R-squared* sebesar 0,653. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA dan CAR hanya mampu menjelaskan variabel DPR sebesar 65,3 persen sedangkan 34,7 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Model Summary ^b						
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson	
1	.808 ^a	.653	.634	15.7495900408465		.653	34.792	2	.37	.000	1.363

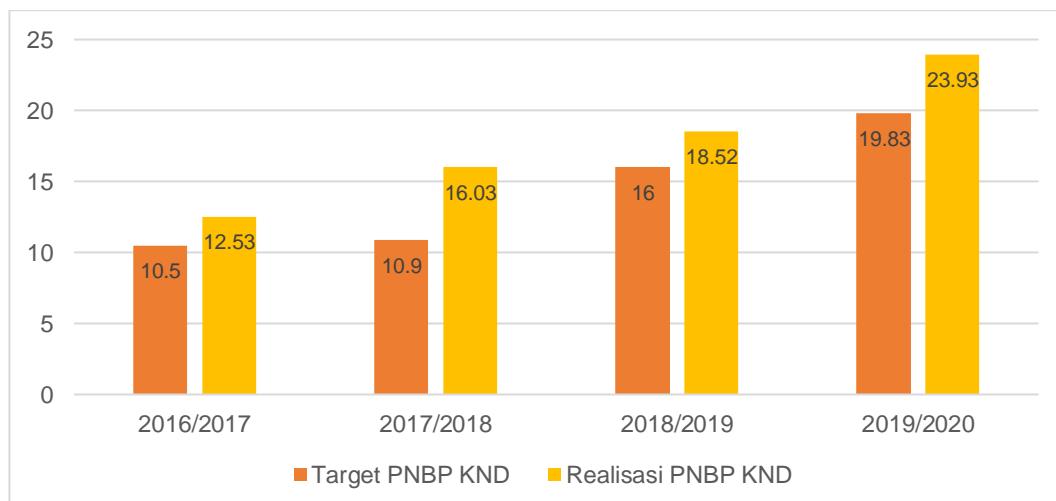
a. Predictors: (Constant), CAR, ROA

b. Dependent Variable: DPR

Sumber: Data Olahan SPSS, 2020

4.6. Target dan Realisasi PNBP KND/ Setoran Dividen Atas Laba Pemerintah BUMN Sektor Perbankan

Berdasarkan Gambar 11, target dan realisasi PNBP KND/setoran dividen atas laba pemerintah BUMN sektor perbankan tahun buku 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020 selalu melampaui target PNBP/KND yang diberikan pemerintah sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya tidak dijelaskan dalam Nota Keuangan APBN berapa target pemerintah PNBP KND sektor perbankan. Target PNBP KND sektor perbankan tahun 2020 berdasarkan Nota Keuangan APBN TA 2020 sebesar Rp19,83 triliun, atas kinerjanya pada tahun buku 2019, BUMN perbankan telah menyetorkan hasil pengelolaan PNBP KND TA 2020 sebesar Rp23,93 triliun. Realisasi penerimaan PNBP KND tahun buku 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020 yang selalu melampaui target mengindikasikan adanya kebutuhan pemerintah untuk memformulasikan target yang tepat agar penerimaan PNBP KND BUMN sektor perbankan lebih optimal karena hasil realisasi PNBP KND selalu lebih besar dari target.

Gambar 4. Target dan Realisasi Setoran PNBP KND/Setoran Dividen Pemerintah Atas Laba BUMN Sektor Perbankan (dalam triliun Rp)

Sumber: Data diolah

Tabel 12 menunjukkan bahwa realisasi PNBP KND atau setoran dividen atas laba bagian pemerintah sektor perbankan selama 10 tahun terbesar berasal dari BRI sebesar Rp52,44 triliun, kemudian Bank Mandiri sebesar Rp41,34 triliun, BNI sebesar Rp18,01 triliun dan BTN sebesar Rp2,59 triliun. BRI menjadi kontributor terbesar PNBP KND. Hal ini disebabkan BRI membukukan

laba yang lebih tinggi tahun buku 2010/2011 sampai dengan tahun buku 2019/2020, begitupula RUPS memutuskan DPR yang cukup tinggi. Sementara itu, BTN membukukan laba paling rendah dengan besaran DPR yang rendah pula sehingga setoran dividen atas laba pemerintah dari BTN tidak besar.

Tabel 7. Kontribusi PNBP KND/ Setoran Dividen Pemerintah Atas Laba BUMN Sektor Perbankan

BUMN	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012	2010/2011
Laba (dalam miliar)										
BRI	34,372.00	32,351.13	28,996.00	26,196.00	25,398.00	24,176.00	21,160.00	18,521.00	15,083.00	11,472.00
Bank Mandiri	27,482.13	25,015.02	20,020.71	13,071.18	20,104.43	19,871.00	18,204.00	15,504.00	12,246.00	9,218.29
BNI	15,384.48	15,015.11	13,616.47	11,338.74	9,066.58	10,783.00	9,054.00	7,046.00	5,826.00	4,102.00
BTN	209.26	2,807.92	3,056.67	5,631.61	1,811.33	1,145.57	1,562.16	1,363.96	1,186.61	916.00
Dividen Payout Ratio/DPR (dalam persen)										
BRI	60.00	50.00	45.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00
Bank Mandiri	60.00	54.00	45.00	45.00	30.00	25.00	30.00	30.00	21.61	31.94
BNI	25.00	25.00	35.00	35.00	25.00	25.00	30.00	30.00	20.00	30.00
BTN	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00	30.00
Kepemilikan Saham (dalam persen)										
BRI	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75
Bank Mandiri	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
BNI	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
BTN	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
PNBP KND (dalam miliar)										
BRI	11,703.67	9,179.63	7,404.85	5,946.49	4,324.01	4,115.96	3,602.49	3,153.20	1,711.92	1,302.07
Bank Mandiri	9,893.57	6,754.06	5,402.89	3,529.22	3,618.80	2,980.65	3,276.72	2,790.72	1,587.82	1,766.59
BNI	2,307.67	2,252.27	2,859.46	2,381.14	1,359.99	1,617.45	1,629.72	1,268.28	699.00	738.36
BTN	25.11	336.95	366.80	675.79	217.36	137.47	281.19	245.51	142.39	164.88
Jumlah PNBP KND	23,930.02	18,522.91	16,034.00	12,532.64	9,520.16	8,851.53	8,790.12	7,457.71	4,141.13	3,971.90

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 7, pemerintah masih menetapkan rasio DPR yang sama untuk bank BUMN tanpa memperhatikan laba bersih lebih besar atau lebih kecil untuk bank BUMN, pemerintah juga masih menetapkan rasio DPR yang sama tanpa memperhatikan kinerja keuangan bank BUMN telah mengalami penurunan pada tahun berikutnya, dan masih terjadi inkonsistensi penetapan DPR antar tahun, yaitu adanya perbedaan laba bersih namun DPR ditetapkan sama pada satu BUMN. Kesulitan pemerintah untuk penentuan target bisa disebabkan oleh penentuan target tahun t dihitung pada awal tahun t-1 pada saat BUMN mulai beroperasi pada tahun buku t-1 tersebut, estimasi kinerja BUMN sektor perbankan yang digunakan untuk menentukan besaran laba dan DPR dari BUMN perbankan tersebut. Masalah teori keagenan juga muncul ketika pemerintah telah menetapkan target bagian pemerintah atas laba BUMN yaitu manajemen sebagai pengelola keuangan mempunyai kepentingan untuk menjaga kelangsungan usaha.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisa kinerja keuangan bank BUMN hanya bank BRI yang telah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan laba

yang besar sehingga penerimaan PNBP KND sektor perbankan belum optimal. Berdasarkan uji F, variabel ROA dan CAR perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap DPR. Bila perusahaan bank BUMN mampu meningkatkan CAR dan pengelolaan aset secara bersama-sama maka akan meningkatkan DPR. Berdasarkan uji t, variabel ROA (X_1) terhadap DPR menunjukkan ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Apabila bank BUMN mampu mengoptimalkan asetnya maka akan memberikan DPR yang lebih besar kepada pemegang saham. Berdasarkan uji t, variabel CAR (X_2) menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap DPR. Apabila bank BUMN mampu meningkatkan CAR maka akan menambah DPR. Realisasi PNBP KND/Setoran Dividen atas Laba Pemerintah BUMN sektor perbankan tahun buku 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020 selalu melampaui target PNBP KND atas laba pemerintah. Pemerintah masih perlu memformulasi target yang tepat untuk penerimaan PNBP KND karena pemerintah masih menetapkan rasio DPR yang sama untuk BUMN tanpa memperhatikan laba bank BUMN lebih besar atau kecil. Pemerintah juga masih menetapkan rasio DPR yang sama tanpa memperhatikan kinerja keuangan bank BUMN telah mengalami penurunan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan sebagai berikut BNI, Bank Mandiri, dan BTN perlu memerhatikan kinerja keuangan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN untuk mendapatkan laba yang optimal. Efisiensi dan efektivitas dapat dilakukan dengan cara manajemen perlu mengelola belanja modal dengan hati-hati. BUMN sektor perbankan perlu meningkatkan ROA dengan cara mengoptimalkan asetnya guna untuk meningkatkan DPR. BUMN sektor perbankan juga perlu meningkatkan kesehatan bank guna meningkatkan DPR. Pemerintah dalam optimalisasi PNBP KND perlu merumuskan formulasi target PNBP KND yang tepat agar tidak menjadi beban bagi BUMN namun juga tidak merugikan pemerintah karena target yang rendah. Penetapan DPR hendaknya menggunakan parameter kinerja keuangan yang jelas dan konsisten baik antar BUMN maupun antar tahun.

Daftar Pustaka

- Achmad, Tarmizi & Willyanto K. Kusumo, 2003, "Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai Indikator dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan di Indonesia", Media Ekonomi dan Bisnis, Vol.XV, No.1, Juni, pp.54-75.
- Darmawi, Herman. 2011. Manajemen Perbankan Cetakan I. Bumi Aksara, Jakarta. ISBN: 979-010-582-7
- Ismiyanti, Fitri & Mahadwartha, PA,. 2005. Uji Faktor-Faktor Pembeda Kebijakan Dividen: Analisis Diskriminan. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 4, No 1, Maret. <https://doi.org/10.24123/jmb.v4i1.182>

- Karauan, Prisilia. 2017. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Bank BUMN Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015*. Jurnal EMBA, Vol.5, No.2, 935-944. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16016>
- Kementerian Keuangan. Nota Keuangan dan APBN Berbagai Tahun.
- Lanawati & Amilin. 2015. *Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Firm Size, Growth dan Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal 55- 64. ISSN 2339 - 1545
- Musiega, M. G., Alala, O. B., Douglas, M., Christopher, M. O., & Robert, E. 2013. *Determinants Of Dividend Payout Policy Among Non-Financial Firms On Nairobi Securities Exchange*. Kenya. International journal of scientific & Technology Research, 2(10), 253-266.
- Perpatih, Zuhafni S. 2016. "Pengaruh "ROA" dan "DER" terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." e-Jurnal Apresiasi Ekonomi, vol. 4, no. 3, 2016, pp. 205-211, doi:10.31846/jae.v4i3.165.
- Purba, Jamian. 2019. Faktor- Faktor yang Memengaruhi Dividend Payout Ratio pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Ikra-Ith Ekonomika, vol. 2, no. 1, Mar. 2019, pp. 49-58.
- Rehman, A., & Takumi, H. 2012. *Determinants of dividend payout ratio: Evidence from Karachi Stock Exchange (KSE)*. Journal of Contemporary Issues in Business Research, 1(1), 20-27.
- Sabri, Fitri Handayani, Dwi Risma Deviyanti, dan Indra Suyoto Kurniawan. 2017. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Dividend Payout Ratio Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN*. Print ISSN: 19 07-3011 - Online ISSN: 2528-1127: Vol. 14 (1)
- Silfiana, Merlinda dan Rachmawati, Erny. 2015. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kompartemen, Vol. XIII, No.2, 2015. DOI: 10.30595/kompartemen.v14i1.1370
- Van Horne, James C. and John M. Wachowicz Jr 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH & HUBUNGANNYA DENGAN BELANJA PEMERINTAH: STUDI DI INDONESIA

***Inequality between Regions & Their Relationship with Government
Expenditures: A Study in Indonesia***

Marihot Nasution

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: marihot.nasution@dpr.go.id

Abstract

This study examines the development of inequality between regions in Indonesia from 2010-2019. Tests are carried out by grouping using Klassen's typology and measuring the value of inequality using the Williamson Index. In addition, the results of the inequality calculation are tested for correlation with government spending according to type, namely personnel expenditure, material expenditure, capital expenditure, subsidy expenditure, grant expenditure, social assistance expenditure and transfers to the regions.

The results showed that the Klassen typology categorized 2 provinces as developed and rapidly developing provinces/quadrant 1, namely DKI Jakarta and Riau Islands. Meanwhile, 8 provinces are included in the group of provinces that are categorized as underdeveloped (quadrant 3). For the group of provinces that are classified as developing with per capita income exceeding the average but with low growth and are in quadrant 4, there are 5 provinces and other provinces (19 provinces) are included in quadrant 2 where the growth is high but the GDP per capita is below the average. Meanwhile, the value of inequality as measured by the Williamson index during 2010-2019 is in the range of 0.70-0.76, which is close to number 1, meaning that Indonesia experiences high regional inequality.

The results of the correlation testing for variations in the Williamson Index on variations in state expenditure show that personnel spending, goods spending, capital expenditures and transfers to regions have a positive and significant relationship to the Williamson index. This proves that state spending is still not evenly distributed and still unable to lift regions with low growth.

Keywords: *inequality between regions, Williamson index, government spending*

1. Pendahuluan

Kesenjangan antarwilayah di Indonesia masih merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan nasional. Saat ini, kesenjangan antar wilayah di Indonesia dipandang relatif masih cukup tinggi, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan Pulau Kalimantan 8,05 persen (BPS, 2020). Bahkan, selama 30 tahun (1986-2019) kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI sangat dominan dan tidak pernah kurang dari 80 persen terhadap PDB (BPS, 2020). Oleh karena itu, upaya untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi salah satu agenda pembangunan nasional.

Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya kabupaten yang merupakan daerah tertinggal tersebar di wilayah Indonesia. Di tahun 2020 masih terdapat 62 daerah tertinggal yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Isu kesenjangan wilayah ini juga terkait dengan isu pemerataan pembangunan. Isu pemerataan pembangunan menjadi suatu keniscayaan bila kita cermati komparasinya dengan perkembangan kawasan regional, melalui peringkat indeks pembangunan inklusif atau Inclusive Development Index (IDI), yang dirilis World Economic Forum (WEF) tahun 2018. Secara umum, WEF melihat negara-negara berkembang menunjukkan peningkatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Dari 77 negara berkembang, Indonesia menempati peringkat ke-36 indeks pemerataan pembangunan (peringkat ke-22 di tahun 2017), di bawah Malaysia (peringkat ke-13 tahun 2018 dan ke-16 tahun 2017), Thailand (peringkat ke-17 tahun 2018 dan ke-12 tahun 2017) dan Vietnam (peringkat ke-33 di tahun 2018).

Upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan tersebut salah satunya dengan menerapkan kebijakan fiskal yang sehat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi; pola persebaran sumber daya; dan distribusi pendapatan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat memengaruhi kesempatan kerja, dapat memengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat memengaruhi distribusi penghasilan nasional.

Namun, hingga kini belanja negara melalui konsumsi pemerintah dan investasi dinilai belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian Bappenas (2019), yang menguji andil belanja negara tahun

2016-2017 terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2018 menyatakan bahwa meskipun pengeluaran pemerintah (khususnya belanja kementerian/lembaga) naik namun kenaikan tersebut hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24 persen, jauh dari angka yang direncanakan sebelumnya yaitu 0,66 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal khususnya belanja pemerintah belum optimal dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya, pengalokasian anggaran sendiri yang belum tepat sasaran sehingga belanja tersebut belum memiliki efek ekonomi secara makro. Lebih khususnya, belanja tersebut belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan maupun kesenjangan antar daerah, mengurangi jumlah pengangguran, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah melalui kementerian/lembaga juga masih cenderung terjebak pada dana rutin yang tidak memberikan dampak ekonomi besar. Misalnya, peningkatan belanja pegawai atau belanja barang yang relatif tidak perlu. Sementara itu, alokasi belanja modal masih belum mendominasi di kementerian/lembaga dan sering penyerapannya menumpuk di akhir tahun.

Penyebab lain mengapa belanja pemerintah masih dinilai belum berandal optimal dalam pertumbuhan ekonomi dan nantinya pengurangan ketimpangan antar wilayah di antaranya disebabkan karena sempitnya ruang gerak fiskal APBN. Saat ini terdapat beberapa belanja rutin yang tidak dapat ditinggalkan atau bersifat mengikat (*mandatory spending*), di antaranya belanja pegawai, transfer ke daerah, pembayaran utang hingga kewajiban mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan.

Untuk itu, perlu dikaji bagaimana kondisi ketimpangan antar wilayah di Indonesia selama ini dan hubungannya dengan belanja pemerintah yang telah direalisasikan. Studi ini diharapkan dapat menjadi langkah evaluasi bagi pemerintah dalam mengalokasikan sumber dayanya melalui kebijakan fiskal yang berorientasi pemerataan pembangunan antar wilayah secara optimal. Pengkajian ini tepat dilaksanakan saat ini mengingat Indonesia sedang fokus mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia yang merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan. Salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

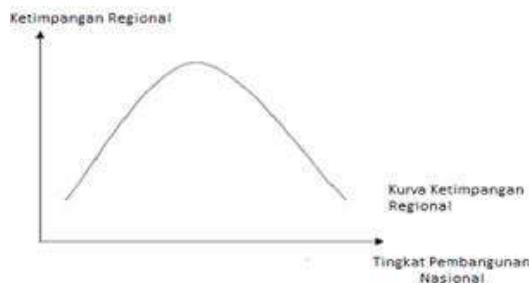
2. Tinjauan Pustaka

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum dalam proses pembangunan ekonomi. Hal ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini berimplikasi terhadap kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan

tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Berdasarkan definisi OECD (2003), kesenjangan wilayah (*regional disparities*) menggambarkan perbedaan intensitas yang dimanifestasikan melalui fenomena ekonomi yang diamati pada sejumlah wilayah dalam satu negara. ILO (2002) dalam Kutscherauer, et al. 2010 menyebutkan bahwa kesenjangan wilayah adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antarwilayah.

Secara teoritis, ketimpangan pembangunan antar-wilayah dimunculkan dari Teori Pertumbuhan Neo-Klasik dari Douglas C. North (Sjafrizal, 2014) dimana muncul prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut teori tersebut pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah memiliki bentuk huruf U terbalik (*reversed U-shape curve*) seperti tampak di gambar di berikut (Sjafrizal, 2014).

Gambar 1. Kurva Ketimpangan Pembangunan



Williamson (1966) dalam Sjafrizal (2014) menguji kebenaran Teori Pertumbuhan Neo-Klasik ini dengan mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah menggunakan Indeks Williamson. Penghitungan indeks Williamson ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i}}{n}$$

Dimana:

Y_i = PDRB per kapita provinsi i

Y = PDRB per kapita rata-rata nasional

f_i = jumlah penduduk di provinsi i

n = jumlah penduduk nasional

Dengan indikator angka indeks Williamson yang diperoleh terletak antara 0 sampai dengan 1, jika mendekati 0 berarti ketimpangan (disparitas) antar

wilayah semakin rendah atau dengan kata lain pembangunan antar wilayah terjadi secara merata, tetapi jika bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol atau mendekati 1 maka ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin tinggi serta mengidentifikasi adanya pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata. Indeks Williamson ini memiliki kelemahan yaitu merupakan yang sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, seperti terjadi dalam penelitian Sjafrizal (2002) yang membahas ketimpangan antarwilayah di Indonesia pada periode 1993-2000 dengan memisahkan ibukota Indonesia, DKI Jakarta dalam pengukuran indeks. Hasil pengukuran indeks ketimpangan wilayah menunjukkan pengaruh kehadiran DKI Jakarta dalam penghitungan ternyata relatif signifikan dikarenakan struktur ekonomi daerah yang berbeda dibandingkan daerah lain yang diikutkan dalam pengukuran. Meskipun demikian indeks ini sudah lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Melihat ketimpangan wilayah juga dapat dilakukan dengan analisis tipologi Klassen. Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (Syafrizal, 1997). Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita pada sumbu horizontal. Klassen mengklasifikasikan tingkat pembangunan menjadi empat kuadran utama yaitu sektor maju dan tumbuh pesat, sektor pertumbuhan tertekan, sektor potensial atau masih bisa tumbuh dan sektor relatif tertinggal (Gambar 2).

Gambar 2. Tipologi Klassen



Dimana:

r_i : PDRB per kapita provinsi i

r : PDRB per kapita wilayah

y_i : pertumbuhan ekonomi provinsi i

y : pertumbuhan ekonomi wilayah

Potensi ketimpangan pendapatan antar daerah akan selalu ada karena kondisi daerah yang berbeda, termasuk faktor *endowment* yang berbeda antardaerah. Semakin besar perbedaan pendapatan perkapita antar daerah berarti ketimpangan pendapatan antar daerah semakin melebar (divergen). Banyak faktor yang menentukan ketimpangan pendapatan antardaerah, yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah, mobilitas barang (perdagangan), faktor produksi antardaerah, alokasi investasi publik dan swasta lintas daerah. Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah akan menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin besar (Sjafrizal, 2008). Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah menunjukkan perbedaan pertumbuhan antar daerah juga. Alokasi investasi pemerintah disini adalah pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, perbedaan pengeluaran pemerintah di suatu daerah dengan daerah lainnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah tersebut.

Mukaramah, dkk. (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran publik terhadap ketimpangan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik pemerintah untuk pendidikan dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan antar etnis dan ketimpangan pendapatan antara perkotaan dan perdesaan. Pengeluaran pemerintah untuk pertanian dan pembangunan pedesaan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan antar kelompok etnis dan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan antara perkotaan dan perdesaan.

Calderon dan Servien (2004) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Panel data digunakan dari 121 negara selama tahun 1960-2000. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi. Hasil studi menunjukkan bahwa dari segi kuantitas, infrastruktur memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara kualitas, infrastruktur berpengaruh lemah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah infrastruktur harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan pendapatan. Artinya, pembangunan infrastruktur melalui belanja pemerintah dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Martines-Vazquez, dkk. (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pajak dan pengeluaran publik terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan data panel 150 negara maju, negara berkembang dan negara transisi, selama 1970-2009, dengan alat analisis OLS dan GMM (*Generalized Method of Moment*). Variabel terikat adalah koefisien gini. Variabel independen adalah pajak dan pengeluaran publik. Pengeluaran publik adalah perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Analisis menemukan bahwa pajak dan pengeluaran publik secara signifikan memengaruhi koefisien gini (ketimpangan pendapatan). Pajak progresif (atas penghasilan) secara positif memengaruhi distribusi pendapatan dan berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan. Pajak penghasilan badan berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan, namun pengaruhnya menurun seiring dengan meningkatnya globalisasi dan keterbukaan

perdagangan (perdagangan internasional). Pangsa pengeluaran publik dalam PDB untuk kesejahteraan sosial, pendidikan dan perumahan berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan. Dari sisi belanja publik, meningkatnya belanja perlindungan sosial menyebabkan koefisien gini 0,22 menurun. Meningkatnya pengeluaran untuk kesehatan masyarakat menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan. Penurunan pengeluaran publik untuk pendidikan dan perumahan menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Alokasi dana publik antar daerah melalui anggaran negara merupakan instrumen kebijakan utama untuk mengatasi disparitas daerah (Acconia & Del Monte, 1999). Di negara maju, efek utama dari kebijakan redistributif dan transfer adalah bahwa daerah berpenghasilan rendah menikmati aliran masuk sumber daya yang positif, yaitu, mereka membayar pajak lebih sedikit daripada yang mereka terima sebagai layanan dan manfaat, sementara daerah berpenghasilan tinggi memberikan dukungan keuangan. Perpindahan dana antar wilayah muncul setidaknya karena dua alasan. Pertama, setiap daerah merupakan bagian dari masyarakat dengan standar nasional untuk pelayanan publik dan kesejahteraan, dan basis perpajakan yang sama. Hal ini memastikan bahwa, untuk daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dari rata-rata nasional, jumlah yang dibayarkan untuk pajak lebih rendah dari jumlah belanja publik yang diterima. Kedua, daerah miskin mendapatkan manfaat dari kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan. Bentuk utama dari kebijakan ini adalah investasi di bidang infrastruktur dan subsidi untuk mendorong investasi masuk.

McCulloch dan McKay dalam Raychaudhuri (2010), menjelaskan bagaimana peran pembangunan infrastruktur dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan kemudian menekan ketimpangan. Hubungan pembangunan infrastruktur sendiri dalam mengurangi tingkat kemiskinan bersifat tidak langsung. Adanya investasi pada bidang infrastruktur, baik dari sisi pemerintah maupun swasta, akan memengaruhi produktivitas dan jumlah angkatan kerja dalam berbagai sektor. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menambah produktivitas suatu sektor sehingga dapat menyerap tenaga kerja, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan upah/gaji pada kaum miskin. Kedua hal tersebut memengaruhi penawaran dan harga dari barang-barang kebutuhan pokok, selanjutnya dengan perkembangan dari kualitas hidup tersebut maka dapat terciptanya pengurangan angka kemiskinan. Semakin berkurangnya tingkat kemiskinan, maka akan memicu terjadinya peningkatan kesejahteraan dari masyarakat, sehingga yang diharapkan, akan mendorong terjadinya pengurangan dari tingkat ketimpangan (Raychaudhuri, 2010). Maka dari itu, dengan infrastruktur yang memadai maka akan memudahkan sekaligus mengundang investor masuk ke suatu daerah sehingga akan meningkatkan kondisi ekonomi pada daerah tersebut yang kemudian mengangkat perekonomian suatu daerah dan menjadikan daerah tersebut setara dengan daerah lainnya. Nangarumba (2015) juga membuktikan bahwa anggaran pada bidang infrastruktur dapat berkontribusi mengurangi besaran tingkat ketimpangan pendapatan.

Semua studi ini menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dapat bervariasi antar negara. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan bisa positif atau negatif, tergantung jenis pengeluaran pemerintah. Meskipun kesenjangan antarwilayah hampir tidak mungkin dihilangkan sama sekali, namun upaya untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah perlu dilakukan. Hal ini untuk menghindari berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat tingginya kesenjangan antar wilayah. Tingginya kesenjangan antarwilayah dapat mengancam kestabilan kondisi sosial-ekonomi di antaranya potensi munculnya dampak negatif terutama terhadap kohesi sosial politik (Bappenas, 2018). Meskipun pertumbuhan ekonomi berlangsung cukup tinggi, namun akan muncul persepsi publik bahwa kesejahteraan belum dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga keadilan dan pemerataan belum terjadi. Kesenjangan yang meningkat akan mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa hal, di antaranya: perubahan pola permintaan, perubahan ukuran pasar domestik, berkurangnya kegiatan kewirausahaan, keterkaitan ekonomi politik dan instabilitas bagi perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya; serta ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini masih cukup besar jumlah masyarakat miskin dan rentan yang tidak terlindungi atau tidak mendapatkan manfaat bantuan dan jaminan sosial.

Oleh karena itu, upaya untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antarkelompok sosial-ekonomi dan antar wilayah menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan oleh agenda prioritas (Nawacita) Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di masa kepemimpinannya periode 2015-2019, khususnya dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Komitmen nasional ini selanjutnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dalam dimensi pembangunan “Pemerataan dan Kewilayahannya”. Upaya ini pun dilanjutkan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi di 2020-2024. Komitmen nasional tersebut kemudian diterjemahkan dalam rencana kerja pemerintah tahunan, dialokasikan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu, APBN berperan strategis dalam mengerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia didistribusikan merata dan berkeadilan. Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahannya sebagaimana dirumuskan pada RPJMN Tahun 2020-2024, pemerintah mengalokasikan APBN ke wilayah melalui belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang meningkat sejak implementasi otonomi daerah. Belanja K/L dikelompokkan menurut jenis pengeluaran di antaranya melalui: a) belanja

pegawai, b) belanja barang, c) belanja modal, d) belanja subsidi, e) belanja hibah, f) belanja bantuan sosial, dan g) belanja lain-lain.

Kebijakan alokasi anggaran melalui belanja K/L dan TKDD tersebut secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya penyaluran TKDD juga terus diarahkan menjadi berbasis kinerja seperti DAK Fisik dan Dana Desa yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level paling rendah yakni desa, sehingga hal tersebut diharapkan mampu menstimulasi peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat. TKDD merupakan bagian belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Sementara itu, meskipun belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah, baik yang dilaksanakan satker pusat maupun satker daerah. Alokasi belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan (Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi), kesehatan (bantuan untuk iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional), serta program perlindungan sosial (PKH dan bantuan pangan). Kedua, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/daerah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah bantuan benih, alat pertanian, dan kegiatan penyuluhan oleh Kementerian; bantuan makanan tambahan dan penyuluhan kesehatan oleh Kemenkes; kegiatan restorasi gambut oleh Kemen LHK; pemeliharaan jalan/jembatan/jaringan irigasi oleh Kemen PUPR; pendamping dana desa pada Kemendes dan PDTT; dan pembangunan pasar rakyat oleh Kemendag. Ketiga, belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, antara lain: kegiatan pelatihan/ sosialisasi, serta kegiatan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan alutsista.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengetahui ketimpangan antar wilayah di Indonesia dengan menggunakan tipologi Klassen dan indeks Williamson. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa komponen penghitungan pengujian ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan tipologi Klassen dan indeks Williamson menggunakan variabel di antaranya: PDRB per kapita, pertumbuhan PDRB provinsi dan jumlah penduduk tiap provinsi. Data dari variabel tersebut diperoleh dari data dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 hingga 2019. Penggunaan kedua analisis ketimpangan tersebut untuk memberikan gambaran komprehensif

ketimpangan wilayah di Indonesia. Analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Mengingat Indeks Williamson bersifat sensitif terhadap daerah yang diikutkan dalam pengujian maka perlu dilakukan pengujian yang mengeluarkan sampel *outlier*, dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengukur pemerataan pembangunan secara riil. Penghitungan indeks Williamson dilakukan secara nasional dan per provinsi untuk melihat ketimpangan di dalam wilayah Indonesia dan ketimpangan dalam provinsi.

Dalam menguji hubungan antara ketimpangan antar wilayah secara nasional dengan belanja pemerintah digunakan data belanja pemerintah berdasarkan jenisnya yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja transfer ke daerah dan belanja pemerintah pusat secara total. Selain itu, data belanja pemerintah diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 hingga 2019. Sementara itu, data PDB diperoleh dari BPS.

Mengingat jumlah sampel yang digunakan untuk menguji hubungan berjumlah kurang dari 30 data (periode 2010-2019) maka pengujian hubungan menggunakan uji korelasi Rank Spearman yang merupakan uji korelasi nonparametrik. Korelasi Rank Spearman dipergunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sampelnya kecil (<30).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskriptif Statistik

Dari pengumpulan data diperoleh 542 pemerintah daerah yang memiliki data lengkap yang diperoleh dari NPD. Data tersebut merupakan jumlah seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dari hasil pengolahan data PDRB provinsi di Indonesia diperoleh indeks Williamson diketahui bahwa nilai indeks Williamson selama 2010-2019 berada di kisaran 0,70-0,76 yang artinya ketimpangan wilayah di Indonesia masih cukup tinggi mendekati angka 1 dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata indeks Williamson pada periode tersebut adalah 0,738. Meskipun demikian, data BPS menunjukkan bahwa rasio gini Indonesia yang menunjukkan ketimpangan pendapatan Indonesia berada di angka rata-rata 0,395 dan makin menurun dari tahun ke tahun. Sehingga meskipun pendapatan makin tersebar merata namun ketimpangan pembangunan wilayah masih belum menunjukkan hasil yang sama.

Sementara itu, data belanja pemerintah dapat dilihat sebarannya pada Tabel 1. Belanja pemerintah di tiap jenisnya meningkat tiap tahunnya. Selama periode 10 tahun ini masing-masing belanja pemerintah di kementerian/lembaga memiliki nilai rata-rata Rp237,46, Rp172,31 triliun, Rp135,35 triliun untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal secara berurutan. Sementara itu, untuk belanja pemerintah lainnya berupa belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain memiliki rata-rata

Rp245,01 triliun, Rp2,29 triliun, Rp77,98 triliun dan Rp14,02 triliun secara berurutan. Untuk belanja transfer ke daerah sebagai wujud desentralisasi rata-rata realisasi alokasi belanjanya adalah Rp547,57 triliun.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

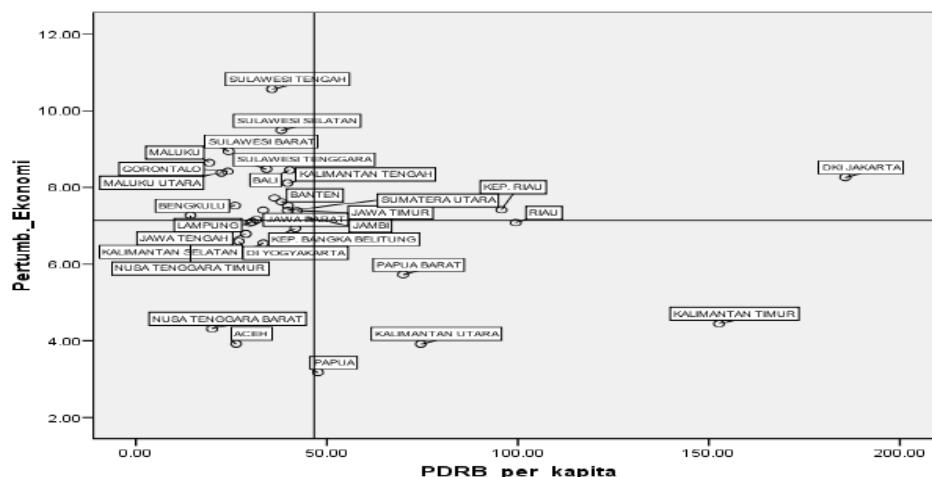
	Belanja Pegawai (triliun Rp)	Belanja Barang (triliun Rp)	Belanja Modal (triliun Rp)	Belanja Subsidi (triliun Rp)	Belanja Hibah (triliun Rp)	Belanja Bansos (triliun Rp)	Belanja Lain-lain (triliun Rp)	Transfer ke Daerah (triliun Rp)	Total Bel. Pem. Pusat (triliun Rp)
Mean	237,46	172,31	135,35	245,01	2,29	77,98	14,02	547,57	1,067,41
Standard Error	25,31	28,05	15,15	24,45	0,79	5,56	3,20	53,15	83,67
Median	232,70	155,30	146,23	209,34	1,11	74,72	10,85	543,48	1,145,59
Standard Deviation	87,69	104,97	56,67	84,71	2,74	19,27	11,09	184,11	289,84
Range	263,24	300,42	160,48	253,88	7,13	62,87	35,56	520,54	867,50
Minimum	112,83	47,05	54,95	138,08	-	49,61	3,37	292,43	628,81
Maximum	376,07	347,47	215,43	391,96	7,13	112,48	38,93	812,97	1,496,31
Count	12,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Sumber: Hasil olah data

4.2. Hasil Pengujian Empiris

Hasil analisis pengelompokan provinsi menggunakan tipologi Klassen membagi 34 provinsi di Indonesia ke dalam 4 kuadran berdasarkan data PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi provinsi rata-rata selama 2010-2019 tampak di Gambar 4 di bawah ini. Dapat diketahui bahwa provinsi yang berada dalam kelompok provinsi yang maju dan berkembang pesat berada di kuadran 1 hanyalah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Sementara itu, kelompok provinsi yang masuk dalam kategori tertinggal (kuadran 3) di antaranya Aceh, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Untuk kelompok provinsi yang tergolong berkembang dengan pendapatan per kapita melebihi rata-rata namun pertumbuhannya rendah dan berada di kuadran 4 di antaranya Provinsi Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua. Provinsi lainnya (19 provinsi) masuk ke dalam kuadran 2 dimana pertumbuhannya tinggi namun PDRB per kapitanya di bawah rata-rata.

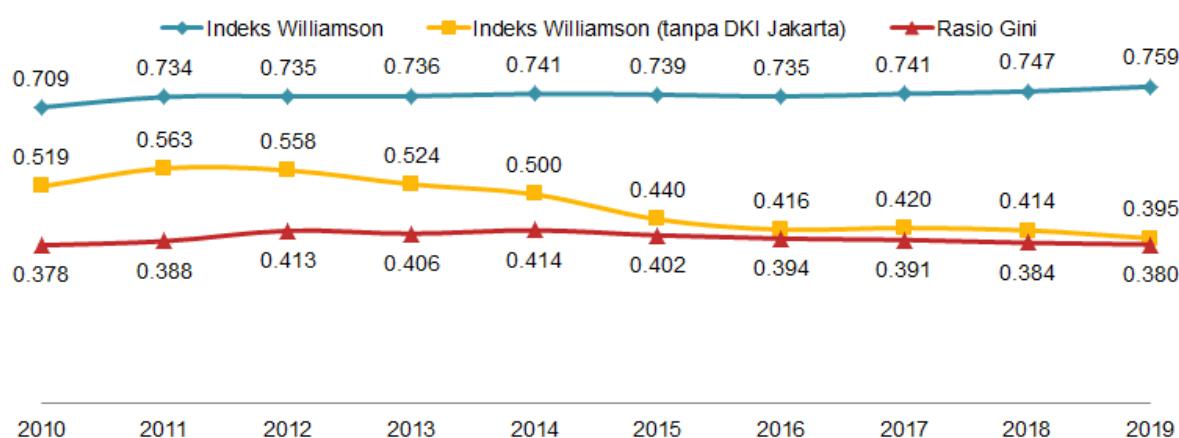
Gambar 4. Tipologi Klassen Provinsi se-Indonesia



Sumber: Hasil olah data

Hasil tipologi Klassen provinsi di atas berhubungan positif dengan ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tertentu, sehingga semakin tinggi nilai dari faktor tersebut maka makin tinggi pula kesenjangannya. Sementara itu, faktor sumber daya alam dan alokasi belanja pembangunan pemerintah juga memberi andil bagi kesenjangan tersebut. Makin tinggi nilai sumber daya alam dan alokasi belanja pemerintah di suatu wilayah maka kesenjangan pembangunan justru makin berkurang. Alokasi belanja pemerintah dapat dilihat dari program pemerintah yang merupakan interpretasi arah kebijakan umum pembangunan nasional dari pemerintah.

Gambar 5. Indeks Williamson dan Rasio Gini Indonesia, 2010-2019



Sumber: Hasil olah data

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa nilai ketimpangan yang diukur dengan indeks Williamson berada di kisaran 0,70-0,76 yang mendekati angka 1, artinya Indonesia mengalami ketimpangan wilayah yang tinggi. Namun jika wilayah yang merupakan *outlier*, atau dalam hal ini DKI Jakarta yang memiliki perkembangan jauh di atas wilayah yang lain dikeluarkan dari penghitungan maka nilai indeks Williamson akan menunjukkan hasil yang lebih rendah (Gambar 5). Hasil ini menunjukkan bahwa tanpa DKI Jakarta, pembangunan wilayah Indonesia relatif lebih merata dengan angka indeks Williamson 0,395 di tahun 2019 turun dari 0,519 di tahun 2010. Penurunan ini merupakan prestasi bagi pemerintahan periode 2010-2019, mengingat sejak 2010 pembangunan kewilayahan menjadi agenda bagi pemerintahan kala itu. Pada awal periode pemerintahan Jokowi di 2009 lalu, pembangunan infrastruktur dan pembangunan dari pinggiran menjadi prioritasnya.

Tabel 2. Indeks Williamson Indonesia Menurut Provinsi, 2010 dan 2018

Provinsi	Indeks Williamson 2010	Provinsi	Indeks Williamson 2018
GORONTALO	0.1759	GORONTALO	0.1259
KEP. BANGKA BELITUNG	0.1856	KALIMANTAN UTARA	0.1464
KALIMANTAN TENGAH	0.2315	KALIMANTAN TENGAH	0.1706
LAMPUNG	0.2328	KEP. BANGKA BELITUNG	0.1997
KALIMANTAN BARAT	0.2350	MALUKU	0.2282
SULAWESI TENGAH	0.2392	SUMATERA BARAT	0.2590
SUMATERA BARAT	0.2644	MALUKU UTARA	0.2734
MALUKU UTARA	0.2720	KALIMANTAN BARAT	0.2777
BALI	0.2723	LAMPUNG	0.2785
SULAWESI BARAT	0.2937	BALI	0.3107
MALUKU	0.3131	ACEH	0.3487
KALIMANTAN UTARA	0.3180	SULAWESI BARAT	0.3539
SULAWESI TENGGARA	0.3423	BENGKULU	0.3789
SULAWESI UTARA	0.3658	KALIMANTAN SELATAN	0.3939
BENGKULU	0.3743	JAMBI	0.4456
SUMATERA UTARA	0.4057	KEP. RIAU	0.4541
ACEH	0.4495	DI YOGYAKARTA	0.4594
DI YOGYAKARTA	0.5130	RIAU	0.4686
KALIMANTAN SELATAN	0.5188	KALIMANTAN TIMUR	0.4865
DKI JAKARTA	0.5456	SULAWESI UTARA	0.5043
SUMATERA SELATAN	0.5464	DKI JAKARTA	0.5102
NUSA TENGGARA TIMUR	0.5544	SULAWESI TENGAH	0.5475
JAMBI	0.5622	SULAWESI TENGGARA	0.5515
SULAWESI SELATAN	0.5675	NUSA TENGGARA BARAT	0.5854
RIAU	0.5725	SUMATERA UTARA	0.6110
KEP. RIAU	0.6543	SULAWESI SELATAN	0.6219
JAWA BARAT	0.6692	JAWA TENGAH	0.6221
KALIMANTAN TIMUR	0.6751	BANTEN	0.6248
JAWA TENGAH	0.7189	NUSA TENGGARA TIMUR	0.6277
BANTEN	0.7741	JAWA BARAT	0.6735
JAWA TIMUR	0.9593	SUMATERA SELATAN	0.7305
PAPUA BARAT	1.5412	JAWA TIMUR	0.9834
NUSA TENGGARA BARAT	1.7026	PAPUA BARAT	1.3300
PAPUA	2.0712	PAPUA	1.8546

Sumber: Hasil olah data

Sementara itu, penghitungan indeks Williamson tiap provinsi untuk mengukur ketimpangan wilayah dalam provinsi di tahun 2010 dan 2018 menunjukkan bahwa masih banyak provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi (indeks Williamson di atas 0,5, Tabel 2). Dari hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa indeks tersebut mengalami penurunan di 18 provinsi, sedangkan 15 provinsi lainnya mengalami peningkatan indeks Williamson (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah telah membahukan hasil, namun belum merata karena masih ada provinsi yang memiliki indeks Williamson di atas 1 karena struktur ekonomi daerahnya memang menyebabkan ketimpangan. Provinsi tersebut di antaranya Papua dan Papua Barat. Kedua provinsi tersebut memiliki

kabupaten yang memiliki PDRB sangat tinggi dibandingkan PDRB wilayah kabupaten lainnya dalam provinsi tersebut. Hal tersebut menunjukkan struktur ekonomi yang jauh berbeda antar kabupaten/kota dan hadirnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber PDRB. Untuk kasus Provinsi Papua dan Papua Barat, keduanya memiliki kabupaten yang memiliki PDRB tinggi dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sesuai dengan rumus penghitungan indeks Williamson yang menggunakan PDRB per kapita maka dengan kondisi jumlah penduduk kabupaten di kedua provinsi tersebut yang relatif sedikit menyebabkan kabupaten dengan PDRB dari pertambangan dan penggalian yang nilainya tinggi memiliki PDRB per kapita yang jauh lebih besar dari kabupaten lainnya dalam provinsi tersebut. Kabupaten tersebut di antaranya Kabupaten Mimika di Provinsi Papua dan Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat.

Hasil pengujian korelasi belanja pemerintah dengan indeks Williamson yang mengukur ketimpangan antar wilayah menggunakan analisis korelasi Spearman Rank menunjukkan bahwa belanja pemerintah selama 2010-2019 berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal serta transfer ke daerah berhubungan positif dan signifikan terhadap indeks Williamson. Selain itu, secara total jumlah belanja pemerintah pusat memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap indeks Williamson yang dihitung dengan memasukkan DKI Jakarta dalam perhitungan indeks. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (sig./p value) yang kurang dari 0,05 (Tabel 3, sisi kanan).

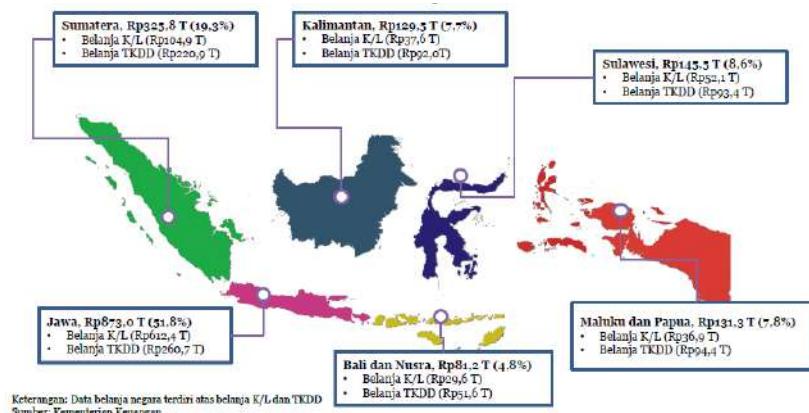
Tabel 3. Hasil Korelasi Indeks Williamson dengan Belanja Pemerintah

Korelasi dengan Indeks Williamson tanpa DKI Jakarta sebagai outlier		Variabel	Korelasi dengan Indeks Williamson	
Nilai Korelasi Spearman Rank	Sig. (p value)		Nilai Korelasi Spearman Rank	Sig. (p value)
-0,915**)	0,000	Belanja pegawai	0,878**)	0,001
-0,903**)	0,000	Belanja barang	0,866**)	0,001
-0,552	0,098	Belanja modal	0,671**)	0,034
0,503	0,138	Belanja subsidi	0,000	1
-0,794	0,006	Belanja hibah	0,579	0,079
-0,164	0,651	Belanja bantuan sosial	0,598*)	0,068
-0,564	0,090	Belanja lain-lain	0,323	0,362
-0,915**)	0,000	Transfer ke daerah	0,878**)	0,001
-0,842**)	0,002	Total belanja pemerintah pusat	0,976**)	0,000

Sumber: Hasil olah data

Dari hasil pengujian koefisien Spearman Rank di atas dapat dilihat bahwa belanja pemerintah berhubungan positif dengan ketimpangan yang dihitung dengan Indeks Williamson yang menyertakan DKI Jakarta dalam penghitungan. Hubungan yang signifikan terjadi pada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, transfer ke daerah dan nilai total belanja pemerintah pusat. Makin bertambah belanja pemerintah tersebut makin meningkat pula ketimpangan/indeks Williamson. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Song (2013) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan daerah di China pada tahun 1978-2007. Ketimpangan pendapatan antar provinsi di China disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bias pada suatu wilayah. Hal ini menyebabkan distribusi belanja pemerintah yang tidak merata antar provinsi sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan antar provinsi di China (Zhang dan Zou, 2012). Samanta dan Cerf (2009) juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang didistribusikan dengan baik dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Dalam hal Indonesia, pengeluaran pemerintah masih berpusat di wilayah Jawa seperti tercantum dalam Nota Keuangan APBN 2019 bahwa belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD berdasarkan kewilayahan, proporsinya secara spasial yang paling besar berada pada wilayah Jawa, diikuti wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi, wilayah Maluku dan Papua, wilayah Kalimantan, dan wilayah Bali-Nusa Tenggara. Porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera, dimana kedua wilayah tersebut memang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata.

Gambar 6. Belanja Negara Menurut Wilayah, 2019



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Sementara itu, jika indeks Williamson dihitung tanpa DKI Jakarta, maka hubungan belanja negara dengan ketimpangan justru negatif, artinya makin tinggi jumlah belanja negara maka ketimpangan antar wilayah menurun. Belanja pemerintah yang berkorelasi signifikan dengan indeks Williamson yang dihitung tanpa *outlier*, DKI Jakarta, di antaranya belanja pegawai, belanja barang, transfer ke daerah, dan total belanja pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (*p value*) di atas 0,05 seperti yang tampak

di Tabel 5, sisi kiri. Hasil ini konsisten dengan Ostergaard (2013) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di negara-negara Sub Sahara. Menurut Claus, dkk. (2014), jika belanja pemerintah dilihat per sektor, maka belanja publik di bidang kesehatan dan pendidikan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di negara-negara Asia. Lebih lanjut Park dan Shin (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Ospina (2010) menunjukkan bahwa belanja publik di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Doerrenberg dan Peichl (2014) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengelompokan menggunakan tipologi Klassen diketahui bahwa masih banyak provinsi yang masuk ke dalam kuadran 2 dimana pertumbuhannya tinggi namun PDRB per kapitanya di bawah rata-rata (19 provinsi). Hal ini pun didukung dengan penghitungan indeks Williamson antar provinsi dimana penghitungan indeks Williamson tiap provinsi untuk mengukur ketimpangan wilayah dalam provinsi di tahun 2010 dan 2018 menunjukkan bahwa masih banyak provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi (indeks Williamson di atas 0,5). Dari hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa indeks tersebut mengalami penurunan di 18 provinsi, sedangkan 15 provinsi lainnya mengalami peningkatan indeks Williamson (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah telah membawa hasil meskipun masih perlu upaya pemerataan lagi agar nilai indeks Williamson turun secara signifikan. Hal ini dikarenakan secara nasional, indeks Williamson berada di kisaran 0,70-0,76 yang mendekati angka 1, artinya Indonesia mengalami ketimpangan wilayah yang tinggi.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan dilakukan dengan pengalokasian pengeluaran pemerintah hingga ke level desa di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pengujian korelasi antara indeks Williamson dan belanja pemerintah menunjukkan bahwa belanja pemerintah berhubungan positif dengan ketimpangan. Hubungan yang signifikan terjadi pada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, transfer ke daerah dan nilai total belanja pemerintah pusat. Makin bertambah belanja pemerintah tersebut makin meningkat pula ketimpangan/indeks Williamson. Hal ini mengingat belanja negara masih terpusat di wilayah Jawa sehubungan dengan banyaknya jumlah penduduk di pulau ini dan banyaknya pusat kegiatan usaha di dalamnya.

5.2. Saran

Melihat masih adanya ketimpangan di wilayah Indonesia, maka perlu diupayakan agar pembangunan lebih merata yang menjangkau seluruh wilayah

Indonesia terutama secara kualitatif sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Langkah pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah desa serta dialokasikannya Dana Desa sejak 2015 merupakan langkah yang bagus namun masih diperlukan pengawasan agar infrastruktur yang dibangun dan penggunaan alokasi anggaran memberikan pembangunan yang memiliki *multiplier effect* tinggi dan inklusif ke semua lapisan masyarakat.

Untuk kedepannya, penelitian ini perlu dilakukan lagi dengan menguji pengaruh belanja pemerintah baik menurut fungsi maupun jenisnya. Selain itu, perlu dilakukan pengujian dengan periode uji yang lebih panjang agar dampak belanja pemerintah dapat lebih terlihat. Pengambilan sampel menurut daerah atau wilayah baik itu menurut pulau, provinsi, ataupun kabupaten/kota juga diperlukan untuk menguji lebih dalam dampak belanja pemerintah terhadap ketimpangan.

Daftar Pustaka

- Acconcia, A., and Del Monte, A. 1999. Regional Development and Public Spending: The Case of Italy. June 1999. Working paper
- Bappenas, 2012. Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2012.
- Bappenas. 2017. Prakarsa Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengurangan Kesenjangan Wilayah Dan Pembangunan Daerah. ISBN: 978-602-61004-1-2
- BPS. 2020. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019. Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th. XXIV, 5 Februari 2020, Jakarta
- Calderon, Cesar and Serven, Luis. 2004, The Effect of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution, Central Bank of Chile, Working paper No.270, September 2004. pp. 1 – 47.
- Claus, I., Martinez-Vazquez, J., and Vulovic, V. 2014, Inequality in Asia and The Pacific: Trend, Driver and Policy Implication, New York, Edited by Ravi Kanbur, Chang Young Rhee and Juzhong Zuang, Routledge and Asian Development Bank.
- Doerrenberg, Philipp and Peich, Andreas. 2014, The Impact of Redistributive Policies on Inequality in OECD Countries, Center for European Economic Research, Discussion Paper, No. 14-012.
- Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2020.
- Kutscherauer, Alois, et al. 2010. Regional Disparities: Disparities in country regional development - concept, theory, identification and assessment. Technical University of Ostrava. Working paper
- Martines-Vazquez, Jorge., Moreno-Dodson, Blanca and Vulovic, V. 2012, The Impact of Tax and Expenditure Policies on Income Distribution: Evidence

- from a Large Panel of Countries, International Center for Public Policy, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Working Paper 12-25, April 2012, pp. 1-45.
- Mukaramah H., Jalil, Ahmad Z. A., and Bakar, Nor'Aznin A. 2011, Household Income Distribution Impact of Public Expenditure by Component in Malaysia, International Review of Business Research Paper, Vol. 7, No. 4, pp. 140-165.
- Nangarumba, Muara. 2015. Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. JESP- Vol. 7, No. 2 November 2015. ISSN 2086-1575
- OECD. 2002. Geographic Concentration and Territorial Disparity in OECD Countries. Paris: OECD Publications Service.
- OECD. 2003. Geographic Concentration and Territorial Disparity in OECD Countries. Paris: OECD Publications Service.
- Ospina, Monica. 2010, The Effect of Social Spending on Income Inequality: An Analysis of Latin American Countries, *Economia y Finanzas*, Universidad, EAFIT, No. 10-03.
- Ostergaard, S. F. 2013, Determinant of Income Inequality: A Sub-Saharan Perspective, Thesis, School of Business and Social Sciences, Aarhus University.
- Park, Donghyun and Shin, Kwanho. 2015, Economic Growth, Financial Development and Income Inequality, ADB. Economic Working Paper Series, No. 441.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Lampiran III
- Rayhchaudhuri, Ajitava. 2010. Trade, Infrastructure and Income Inequality in Selected Asian Countries: An Empirical Analysis. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No. 82.
- Republika. 2019. Belanja Pemerintah Belum Optimal Dorong Pertumbuhan Ekonomi, artikel tayang 12 Agustus 2019. Diakses dari republika.co.id
- Samanta, S. K. and Cerf, J. G. 2009, Income Distribution and Effectiveness of Fiscal Policy: Evidence from Transitional Economics, *Journal of Economics and Business*, Vol. XII, No. I, pp. 29-45.
- Sjafrizal. 2008, Teori Ekonomi Regional dan Aplikasi, Padang, Sumatera Barat: Baduose Media, pp 104 -111.

- Sjafrizal. 2014. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sjafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma, Tahun XXVI, No. 34, LP3ES.
- Song, Yang. 2013, Rising Chinese Regional Income Inequality: The Role of Fiscal Decentralization, *China Economic Review*, pp. 1-16.
- WEF. 2018. The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlights.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf
- Zang, Qinghua and Zou, Heng-fu. 2012, Regional Inequality in Contemporary China, *Annual of Economics and Finance*, Vol. 13, No. 1, pp. 113-137.

PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PROVINSI DI INDONESIA

The Effect Of Regional General Income and Balancing Fund on Capital Expenditure with Economic Growth as a Moderating Variable in Provinces of Indonesia

Rendy Alvaro dan Adhi Prasetyo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: rendy.alvaro@dpr.go.id, dan adhi.wibowo@dpr.go.id

Abstract

This study uses EViews 9 to analyze panel data consisting of cross sections and time series in 33 provinces from 2010-2018. From the test results, it is found that PAD, DAK, DBH have a significant positive effect on capital expenditure. The DAU does not effect capital spending, while economic growth has a significant negative effect on capital spending. Furthermore, economic growth moderates PAD and DAU has a significant positive effect on capital spending, but economic growth moderated DAK and DBH had a significant negative effect on capital spending.

Keywords: *PAD, DAU, DBH, DAK, Capital Expenditures, Economic Growth*

1. Pendahuluan

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dan kewenangan melakukan pinjaman. Selain kewenangan tersebut, terdapat sistem transfer antar level pemerintahan (Kuncoro, 2014). Pemberian kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan demikian diharapkan daerah mampu memiliki kemandirian keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Keberadaan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi dalam efektivitas penyediaan barang dan pelayanan publik sesuai dengan kondisi dan preferensi daerah. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah daerah memiliki data dan informasi mengenai barang publik yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya. Namun

pemenuhan ini perlu tetap berpedoman pada tujuan pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), pajak daerah, retribusi daerah dan potensi lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah agar ke depan mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara nyata dan bertanggung jawab atau dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber daerah lain dan juga dari pemerintah pusat.

Sementara itu, pengalihan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah berimplikasi terhadap peningkatan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah melalui dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, sehingga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dan penyediaan layanan publik, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Lebih lanjut, desentralisasi jika dilihat dari sisi administrasi publik tentu akan berbicara mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik melalui perpanjangan tangan pemerintah daerah melalui belanja daerah. Belanja daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun belanja langsung melalui belanja modal merupakan salah satu bentuk belanja yang mampu mewujudkan bertambahnya infrastruktur dan sarana publik daerah. Adapun besaran alokasi belanja langsung dan belanja modal ditentukan dari seberapa besarnya PAD, sehingga daerah harus mengoptimalkan penerimaan PAD jika ingin meningkatkan pelayanan publik. Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan pada tahun 2017 alokasi belanja modal dalam skala provinsi sebesar 16,8 persen dan sedikit mengalami kenaikan menjadi 17 persen di tahun 2018. Dari data tersebut menunjukkan belanja modal masih mendapatkan alokasi yang terbatas dari keseluruhan belanja di daerah. Sejatinya selain berdampak langsung terhadap pelayanan publik, belanja modal juga mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel pemoderasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian adalah analisis tentang pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada provinsi di Indonesia.

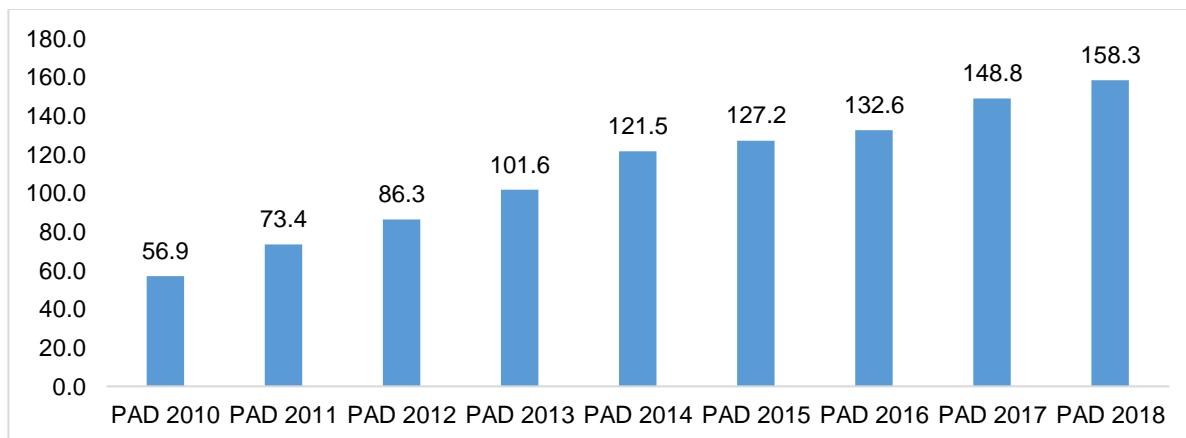
2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008).

Secara nasional setiap tahunnya rata-rata PAD provinsi di Indonesia kecuali Kalimantan Utara sejak tahun 2010 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan. Seperti terlihat pada Gambar 1, dimana PAD tahun 2010 sebesar Rp56,9 triliun dan terus berkembang hingga menjadi Rp158,8 triliun di tahun 2018.

Gambar 1. Total PAD Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018 (triliun rupiah)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

a. Pajak Daerah

Pajak daerah dalam Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini daerah khususnya provinsi diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah apabila dikelompokkan ke dalam objek terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak masuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2. Dana Perimbangan

Upaya memperkecil ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*) dilakukan melalui penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah yang diikuti dengan implikasi pendanaan ke daerah. Pemerintah pusat melalui pelaksanaan fungsi distribusi dan stabilisasi berupaya memperkecil *horizontal imbalance* melalui “kerelaan” daerah-daerah kaya (dengan sumber daya alam melimpah) untuk memberi subsidi daerah-daerah yang kurang beruntung karena ketiadaan sumber daya alamnya (PKA, 2017).

Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun dana perimbangan terdiri dari:

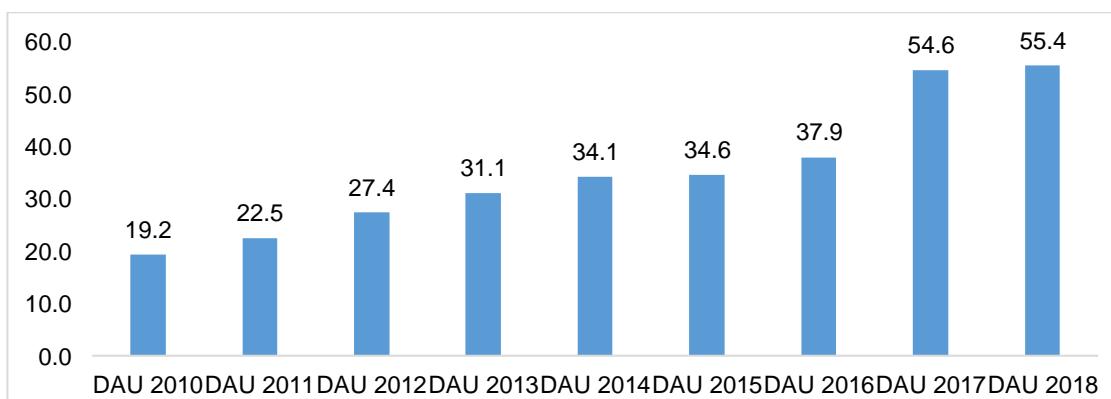
a. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia (Kuncoro, 2014).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa DAU memiliki peran yang signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya di APBD. Oleh karena itu, DAU dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara. DAU sendiri bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah satu dengan yang lainnya dikarenakan tidak meratanya sumber daya yang terdapat pada masing-masing daerah. Penggunaan DAU ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, secara nasional setiap tahunnya rata-rata alokasi DAU yang diperoleh provinsi di Indonesia kecuali Kalimantan Utara sejak tahun 2010 hingga tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Alokasi DAU tahun 2010 yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp19,2 triliun dan terus berkembang hingga menjadi Rp55,4 triliun di tahun 2018.

Gambar 2. Total DAU Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018 (triliun rupiah)



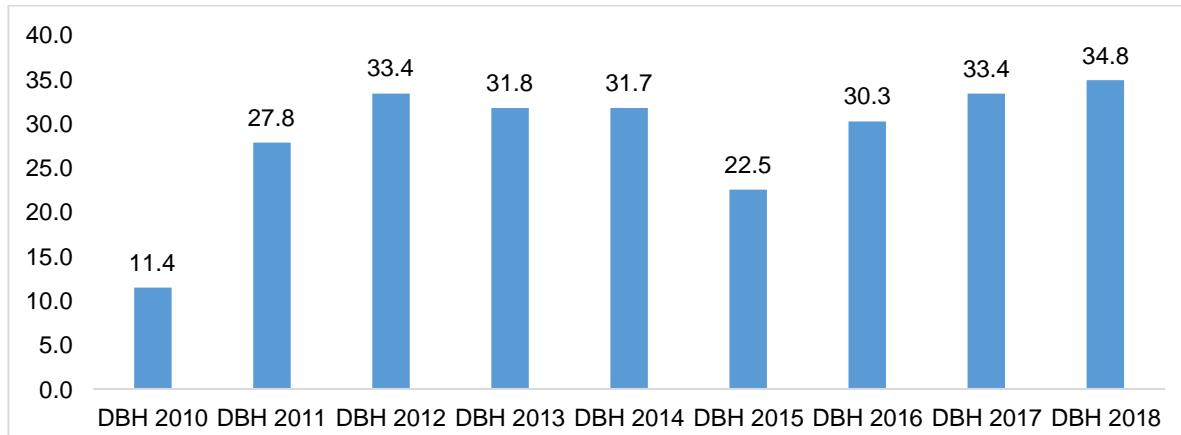
Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU No. 33 Tahun 2014, DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berbeda dengan DAU yang bertujuan demi mengatasi ketimpangan fiskal horizontal. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal vertikal (perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal antara pusat dengan daerah). Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*, dimana DBH dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar.

Dalam dana perimbangan, semakin besarnya alokasi DBH akan berimplikasi pada relatif menurunnya *pool of funds* untuk DAU dan dana transfer lainnya. Hal ini dikarenakan PDN (Penerimaan Domestik Netto) yang menjadi acuan untuk alokasi DAU, merupakan pendapatan domestik setelah dikurangi alokasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. Lebih lanjut alokasi DBH yang diperoleh oleh seluruh provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3 dimana tidak seperti DAU yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, DBH setiap tahunnya mengalami naik dan turun. Hal ini bisa dipahami mengingat DBH yang diterima oleh provinsi sangat bergantung terhadap realisasi yang dihasilkan setiap daerah serta harga minyak mentah dan batu bara.

Gambar 3. Total DBH Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018 (triliun rupiah)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

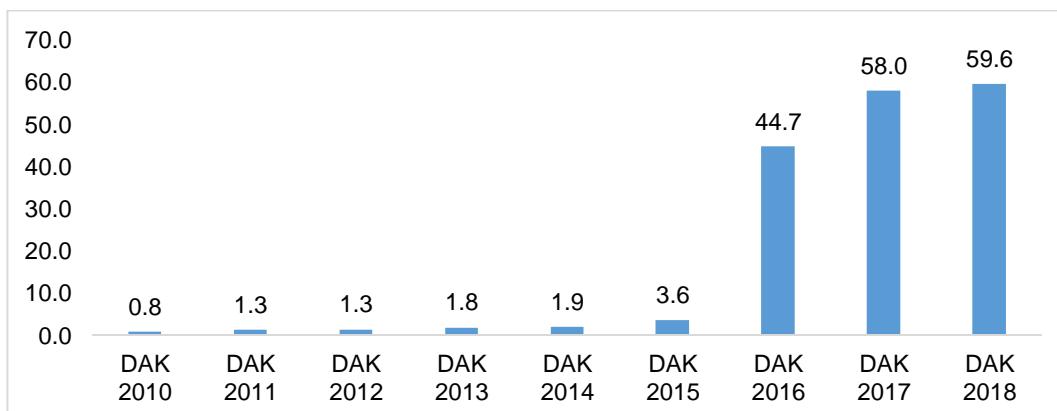
Menurut UU No. 33 Tahun 2014, DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik merupakan salah satu instrumen dalam mendanai infrastruktur, sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan

memerhatikan prinsip *money follow program*. DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Afirmasi dan DAK Fisik Penugasan.

Lebih lanjut DAK Non Fisik bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. Pada tahun 2021, DAK Non Fisik terdiri atas: Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah, Dana Perlindungan Anak dan Perempuan, Dana Fasilitasi Penanaman Modal serta Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Adapun alokasi DAK yang diterima provinsi di Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2018 terus mengalami pertumbuhan khususnya setelah periode tahun 2016 yang mengalami kenaikan dari Rp3,6 triliun menjadi Rp44,7 triliun. Hal ini terjadi dikarenakan DAK tidak hanya mencakup DAK Fisik namun juga terdiri dari DAK Non Fisik.

Gambar 4. Total DAK Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018 (triliun rupiah)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

2.3. Belanja Modal

Belanja modal menurut Mardiasmo (2009) adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Selanjutnya menurut Halim (2014), belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal meliputi: (a) belanja tanah; (b) belanja peralatan dan mesin; (b) belanja modal gedung dan bangunan; (d) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, (e) belanja aset tetap lainnya; (f) belanja aset lainnya.

Lebih lanjut belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005) merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang di dalamnya meliputi pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan belanja modal merupakan pengeluaran oleh pemerintah selama 1 tahun untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan melalui belanja aset dan mampu memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

Tabel 1. Postur Belanja Daerah Tingkat Provinsi (triliun rupiah)

Uraian	2017		2018	
	Rp	Persen	Rp	Persen
Total Belanja	329,1	100	349,6	100
Belanja Pegawai	87,1	26,5	90,6	25,9
Belanja Barang dan Jasa	68,4	20,8	18,8	22,5
Belanja Modal	55,4	16,8	59,4	17
Belanja Lainnya	118,3	35,9	120,9	34,6

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan.

2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai suatu perekonomian. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Menurut Kuznets (1995), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan sebuah negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya. Kemampuan tersebut tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi, ideologi, dan penyesuaian kelembagaan negara tersebut. Lebih lanjut, setiap negara maupun daerah selalu mempunyai keinginan agar pertumbuhan ekonominya meningkat setiap tahunnya, dengan demikian kesejahteraan masyarakat juga akan terangkat.

2.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) menunjukkan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian tersebut juga didukung Ismiyati (2018) yang menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi PAD dan DAU terhadap belanja modal.

Selanjutnya, Ardhani & Ardiyanto (2011) menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan Ardhani & Ardiyanto (2011) mirip dengan hasil penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di pemerintahan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat

Untuk analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada pemerintah daerah, Hidayati (2016) menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel DAU, dan mampu memoderasi variabel DAK dengan intensitas dan arah yang berlawanan namun tidak mampu memoderasi variabel PAD pada belanja modal di kabupaten/Kota Jawa Tengah. Hasil penelitian Hidayati (2016) didukung oleh Junaedy (2015) yang mendapatkan bahwa secara parsial DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan sedangkan PAD, SiLPA dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua. Secara Simultan DAU, PAD, DBH, SiLPA dan luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel berdasarkan waktu dari tahun 2010-2018 dan dengan *cross section* sebanyak 33 provinsi di Indonesia. Data setiap provinsi merupakan data realisasi PAD, dana perimbangan dan belanja modal yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Sedangkan data pertumbuhan ekonomi setiap provinsi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel belanja modal, sebagai variabel dependen, serta variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil serta

menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan alat analisis E Views 9.

Persamaan regresi dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel. Penelitian menggunakan model penelitian Adyatma dan Oktaviani (2015) dengan metode pengujian yang berbeda, objek yang berbeda dan rentang waktu yang berbeda. Berikut ini adalah persamaan dari model penelitian.

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \beta_5 Growth_{it} + \beta_6 PAD * Growth_{it} + \beta_7 DAU * Growth_{it} + \beta_8 DAK * Growth_{it} + \beta_9 DBH * Growth_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal (juta rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah)

DAU = Dana Alokasi Umum (juta rupiah)

DAK = Dana Alokasi Khusus (juta rupiah)

DBH = Dana Bagi Hasil (juta rupiah)

Growth = Pertumbuhan Ekonomi (persen)

e = error term

Data panel terdiri dari tiga model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan model terbaik yang digunakan, dilakukan pengujian. Pengujian tersebut terdiri dari:

3.2.1. *Chow Test*

Uji spesifikasi bertujuan dalam menentukan model analisis data panel yang digunakan. *Chow Test* digunakan untuk memilih model *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling baik untuk digunakan.

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Cross-section Chi-Squared* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model*. Sebaliknya, apabila probabilitas kurang dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*. Ketika model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* maka perlu dilakukan *Hausman Test*.

3.2.2. *Hausman Test*

Hausman Test bertujuan mengetahui model yang dipakai antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis dalam uji Hausman sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Hal ini diukur dengan probabilitas *Cross Section Random*, apabila probabilitas *Cross-section random* lebih dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Random Effect Model* (H0 ditolak). Namun, apabila probabilitas *cross-section random* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect Model* (H0 diterima).

3.2.3. Lagrange-Multiplier Test

Lagrange-Multiplier Test (LM) digunakan untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Common Effect Model*. LM Test ini didasarkan pada distribusi *chi square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen.

Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi square* maka menolak hipotesis *null*. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect Model* dibandingkan *Common Effect Model*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi square* sebagai nilai kritis maka menerima hipotesis *null*. Artinya, estimasi yang tepat adalah dengan menggunakan *Common Effect Model*.

3.3. Uji Statistik

3.3.1. Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Squared*)

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* bertujuan mengetahui besarnya kemampuan model, yaitu pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *adjusted R²* pada EViews dapat diukur dengan melihat nilai *adjusted R-squared* (Basuki dan Prawoto, 2016).

3.3.2. Uji Simultan (F-Test)

Uji F bertujuan mengetahui besarnya pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas F yang < dari 0,05; dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat.

Hipotesa pada pengujian ini adalah:

H_0 = seluruh variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_a = seluruh variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.3.3. Uji Parsial (t-Test)

Uji t untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05, artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat.

Hipotesa pada pengujian ini adalah :

H_0 = variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_a = variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam analisis data panel, dilakukan pemilihan model terbaik yang akan dianalisis. Pengujian dilakukan dengan *Chow Test* dan *Hausman Test*.

4.1. Hasil Uji Chow

Berikut ini adalah hasil pengujian *Chow Test* untuk menguji model terbaik antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* pada penelitian ini (Tabel 4).

Tabel 4. Hasil Chow Test

Chow Test		
Effect Test	Prob.	Kesimpulan
Cross-Section Chi-Square	0,0000	Fixed Effect Model

Sumber: Data Diolah, 2020.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Chow Test*, menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari *Cross-Section Chi-Square* sebesar $0,0000 < 0,05$, H_0 ditolak, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

4.2. Uji Hausman Test

Berikut ini adalah hasil pengujian *Hausman Test* untuk menguji model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* pada penelitian ini (Table 5).

Tabel 5. Hasil Hausman Test

Hausman Test		
Effect Test	Prob.	Kesimpulan
Cross-Section Random	0,0002	Fixed Effect Model

Sumber: Data Diolah, 2020.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Hausman Test*, menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari *Cross-Section Random* sebesar $0,0002 < 0,05$, H_0 ditolak, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

Setelah dilakukan pengujian model terbaik dan dua pengujian menunjukkan *Fixed Effect Model* adalah model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini adalah hasil model untuk dilakukan pengujian hipotesis.

4.3. Hasil Regresi Fixed Effect Model dan uji Hipotesis

Hasil estimasi regresi *Fixed Effect model* dan uji hipotesisnya diberikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Fixed Effect Model				
Variabel Dependen: Belanja Modal				
Variabel Independen	Koefisien	Prob.	Hipotesa	Kesimpulan
C	545.3623	0.0004		
Pendapatan Asli Daerah	0.104679	0.0067	Ha Diterima	Positif Signifikan
Dana Alokasi Umum	-0.028657	0.8238	Ha Ditolak	Tidak Berpengaruh
Dana Alokasi Khusus	0.138005	0.0027	Ha Diterima	Positif Signifikan
Dana Bagi Hasil	0.186238	0.0024	Ha Diterima	Positif Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	-3586.789	0.0437	Ha Diterima	Negatif Signifikan
PAD Moderasi	0.911211	0.0958	Ha Diterima	Positif Signifikan
DAU Moderasi	4.025209	0.0094	Ha Diterima	Positif Signifikan
DAK Moderasi	-2.180800	0.0003	Ha Diterima	Negatif Signifikan
DBH Moderasi	-3.025967	0.0007	Ha Diterima	Negatif Signifikan
<i>R-Squared</i>	0.894499			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.877536			
<i>F-Statistic</i>	52.73276			
<i>Prob. (F-Statistic)</i>	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2020

4.3.1. Koefisien Determinasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai dari *adjusted r-squared* sebesar 0,8775 atau 87,75 persen. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari seluruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, PAD Moderasi, DAU Moderasi, DAK Moderasi, dan DBH Moderasi) terhadap variabel dependen sebesar 87,75 persen. sisanya sebesar 12,25 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.2. Uji Simultan (F-Test)

Hasil pengujian hipotesis untuk seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas *F-statistic yakni* sebesar $0,0000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa Ha diterima. Artinya, seluruh variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH, pertumbuhan ekonomi, DAU Moderasi, DAK Moderasi, dan DBH Moderasi) secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.3.3. Uji Parsial (t-Test)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari PAD yakni $0,0067/2 < 0,05$. Hal ini berarti Ha diterima dimana PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari PAD adalah positif 0.104679, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat Dan Pemerintahan Daerah, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD yang semakin tinggi, maka kewenangan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya semakin besar, maka belanja modalnya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah semakin tinggi. PAD yang tinggi akan memberikan manfaat untuk meningkatkan fasilitas publik termasuk pembangunan sarana dan prasarana.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAU yakni $0,8238/2 > 0,05$. Artinya, DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang menemukan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sebagian besar DAU atau hampir separuhnya digunakan untuk belanja pegawai, seperti gaji PNSD, sehingga dapat mengurangi alokasi belanja modal (BKF, 2017). DAU banyak diperuntukkan untuk keperluan belanja pegawai dan bukan belanja modal. DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAK yakni $0,0027/2 < 0,05$. Ini berarti DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari DAK adalah positif 0,138005, dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) dimana DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan daerahnya sesuai dengan kebijakan dan program nasional.

d. Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DBH $0,0024/2 < 0,05$ Ha diterima, maka DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari DBH adalah positif, dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Junaedy (2015) bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi

DBH yang diberikan pemerintah pusat maka dapat meningkatkan pula belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menunjang kebutuhannya.

e. Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Swastika (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini dapat terjadi apabila pertumbuhan ekonomi tidak berjalan seiringan dengan peningkatan pada sektor riil, namun hanya pada sektor keuangan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru akan menurunkan belanja modal yang disebabkan oleh berkurangnya minat untuk berinvestasi pada sektor riil.

f. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian PAD yang dimoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar $0,0958/2 < 0,05$. Ini mengindikasikan PAD yang dimoderasi oleh *growth* berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari PAD moderasi adalah 0,911211, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Ismiyati (2018). Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkatkan PAD terhadap belanja modal. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat dapat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat.

g. Dana Alokasi Umum (DAU) yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian DAU yang dimoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar $0,0094/2 < 0,05$. Ini mengindikasikan DAU yang dimoderasi oleh *growth* berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari DAU moderasi adalah 4.025209, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Hidayati (2016). Ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka daerah tersebut terpacu untuk lebih meningkatkan alokasi belanja modalnya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat

h. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian DAK yang dimoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar

0,0958/2<0,05. Ini mengindikasikan DAK yang dimoderasi oleh *growth* berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari DAK moderasi adalah -2,180800, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Hidayati (2016). Ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan menggunakan DAK tersebut untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional lainnya selain belanja modal. Hal ini karena tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal yaitu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai.

i. Dana Bagi Hasil (DBH) yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian DBH yang dimoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,0958/2<0,05. Ini mengindikasikan DBH yang dimoderasi oleh *growth* berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari DBH moderasi adalah -3,025967, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mukti (2019). Sama halnya dengan DAK, apabila suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan, maka pemerintah daerah akan mengurangi DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang dilaksanakan terhadap data dari 33 provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2018 dapat disimpulkan bahwa PAD, DAK dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk pertumbuhan ekonomi ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Di samping itu, pada pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dan DAU ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

5.2. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan, baik bagi pemerintah dan legislatif serta baik bagi pemerintah pusat maupun daerah terkait PAD dan dana perimbangan agar dapat mendukung keputusan yang terbaik dalam mencapai tujuan target yang diinginkan dalam pembangunan. Dengan era desentralisasi, kontribusi transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan seharusnya mampu digunakan dengan baik untuk kebutuhan

daerah dalam belanja modal untuk pembangunan di daerah masing-masing. Pemerintah daerah pun diharapkan mampu menggunakan dana yang diterima untuk dikelola dan dibelanjakan lebih baik agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pemerintah daerah perlu lebih meningkatkan PAD agar dapat dialokasikan untuk mendukung pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan infrastrukturnya. Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan transfer ke daerah melalui DBH dan DAK kepada pemerintah provinsi dengan juga melihat kriteria yang ada dan disertai akuntabilitas yang jelas. Untuk DAU, pemerintah perlu memperhatikan kembali karena DAU yang bersifat *block grant* maka pemanfaatan DAU di daerah pun tidak mudah diarahkan ke belanja modal melainkan saat ini lebih kepada belanja pegawai.

Daftar Pustaka

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. Meita. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2). Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/4598>
- Ardhani, Pungky and Ardiyanto, Moh Didik. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro.
- Arwati, Dini and Hadiati, Novita (2013) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Semantik* 2013, 3 (1). pp. 498-507. ISSN 979-26-0266-6 (In Press)
- Basuki, Agus Tri dan Prawoto, Nano. 2016. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- BKF. 2017. Laporan Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI 2017.
- DJPK. 2020. APBD setelah TA 2006. Diunduh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Hidayati, Nurin. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel

- Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ismiyati. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Junaedy. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal. Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 2, No. 2.
- Juniawan, Made Ari; Suryantini, Ni Putu Santi. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen, [S.I.], v. 7, n. 3, p. 1255 - 1281, Mar. 2018. ISSN 2302-8912.
- Kementerian Keuangan. 2017. Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah, Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mukti, Sapti Dwi. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016). Undergraduate thesis, Unisbank.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pusat Kajian Anggaran (PKA). 2017. Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN, Jakarta.
- Kuznets, Simon. 1995. Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review
- Swastika, Lingga. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Di Kabupaten Boyolali Periode Tahun 2005 – 2012. *Electronic Theses and Dissertations* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA

The Effect of Provincial Minimum Wage On Investment In Indonesia

Robby Alexander Sirait

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: roddy.sirait@dpr.go.id

Abstract

This research empirically to analyze the effect of provincial minimum wage on investment in Indonesia. The data were collected from 32 provinces between 2011 and 2019. To analyze cross-provinces panel data, we used fixed effect model (FEM). The findings showed a negative relationship between provincial minimum wage and investment, and statistically significant. Another finding is human capital as measured by the level of education, health and purchasing power of the population have a positive influence on investment and statistically significant. And finally, we provide a few recommendations which policy makers may adopt in reducing the impact of provincial minimum wage increases on investment.

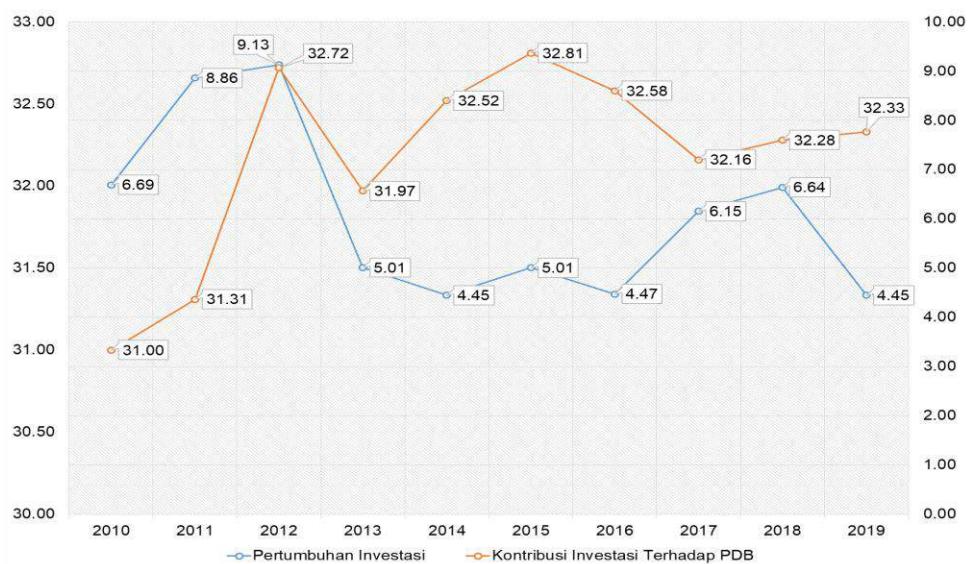
Keywords: *Provincial Minimum Wage, Human Capital, Investment, Fixed Effect*

1. Pendahuluan

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kemajuan perekonomian di suatu negara adalah kinerja investasi negara tersebut, yang merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) negara bersangkutan. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi (Sulistiwati, 2012). Harrod-Domar, dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi (Murni, 2016 dalam Kambono, 2020). Dengan demikian, investasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas investasi akan menambah stok barang modal yang tersedia atau *capital stock* pada perekonomian sebuah negara. Penambahan ini akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas secara nasional, yang akhirnya akan mendorong peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir masih dominan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata kontribusi terhadap PDB sebesar 55,80 persen per tahun. Sedangkan investasi, hanya menduduki posisi kedua, dengan kontribusi sebesar 32,17 persen per tahun terhadap PDB dan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,09 persen per tahun. Padahal, peran investasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dalam jangka panjang. Selain itu, kinerja investasi dalam satu dekade terakhir mengalami tren yang berfluktuasi, baik dari sisi kontribusi terhadap PDB maupun pertumbuhan tahunan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kinerja investasi dalam lima tahun terakhir cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti (Gambar 1).

Gambar 1. Kontribusi Investasi Terhadap PDB dan Pertumbuhan Investasi (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah.

Kondisi capaian dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa kinerja investasi belum berperan optimal dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional. Kinerja investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang sifatnya internal perusahaan maupun kondisi eksternal perusahaan, dan baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Berdasarkan Teori Dunning, faktor makroekonomi yang memengaruhi investasi (dalam hal ini *Foreign Direct Investment/FDI*) adalah ukuran pasar, stabilitas makroekonomi, kelayakan kredit atau pinjaman, keterbukaan perdagangan, infrastruktur, dan biaya tenaga kerja di negara tujuan investasi (Dua dan Garg, 2015). Dari teori tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor ekonomi yang memengaruhi kinerja investasi adalah biaya tenaga kerja, yang salah satunya dapat diproksi dengan upah pekerja.

Hasil studi empiris hubungan antara biaya tenaga kerja atau upah terhadap investasi beragam dan ambigu. Penelitian Schneider and Frey (1985) dan Vijayakumar, Sridharan dan Rao (2010) dalam Dua & Garg (2015)

menemukan bahwa upah/gaji berpengaruh positif terhadap investasi (dalam hal ini FDI). Hubungan positif ini dimungkinkan terjadi apabila kenaikan upah atau pemberian upah yang tinggi kepada pekerja yang berkompeten atau memiliki keterampilan akan meningkatkan produktivitas pekerja yang akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan dan mendorong peningkatan investasi.

Hatziu (2000), dan Janicki dan Wunnava (2004) dalam Lai dan Sarkar (2011) menyatakan bahwa biaya tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan arus modal keluar (FDI outflow) dan menurunkan masuknya investasi (FDI). Artinya, biaya tenaga kerja atau upah memiliki hubungan negatif dengan FDI. Penelitian Lai dan Sarkar (2011) juga menemukan hal yang senada dimana upah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap FDI di India. Demikian juga penelitian Kurniati et.al (2007) yang menemukan bahwa peningkatan upah buruh sebesar 1 persen di negara-negara Asia yang menjadi sampel, akan menurunkan investasi yang masuk ke negara-negara tersebut sebesar 0,30 persen.

Untuk Indonesia, penelitian Sodik dan Nuryadin (2008) menemukan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi di Indonesia pada periode 1993-2003. Untuk variabel investasi, penelitian ini menggunakan nilai total absolut dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau FDI dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau *Domestic Direct Investment* (DDI). Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian Anggrainy (2013), dimana Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Malang memiliki dampak negatif terhadap investasi di Kota Malang periode 2001-2011. Hubungan negatif upah terhadap investasi atau PMA/FDI di Indonesia juga ditemukan pada penelitian Utma dan Rakhman (2019), namun tidak signifikan secara statistik pada periode 2013-2016.

Berbeda dengan hasil penelitian Sodik dan Nuryadin (2008), Utma dan Rakhman (2019), dan Anggrainy (2013), penelitian Sitorus (2017) menemukan hubungan yang searah dimana upah berpengaruh positif terhadap FDI di Pulau Jawa pada 2001-2016. Peneliti berargumentasi bahwa hubungan positif tersebut dapat terjadi apabila upah yang tinggi pada pekerja yang kompeten dan berketerampilan akan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan investasi. Argumentasi tersebut didasarkan pada teori *efficiency wage* yang menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Demikian sebaliknya. Teori *efficiency wage* yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif (Sitorus, 2017). Hubungan positif antara upah dengan investasi juga ditemukan dalam penelitian Sanusi et.al (2019). Penelitian ini menemukan bahwa upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Pulau Jawa pada periode 2010-2018. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan Sitorus (2017), hubungan positif ini dikaitkan dengan upah tinggi akan meningkatkan produktivitas pekerja yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan bagi investor. Biaya upah yang tinggi tanpa diikuti dengan produktivitas tenaga kerja

yang tinggi dapat menjadi masalah bagi perusahaan, karena dapat memengaruhi keuntungan yang didapatkan (Sanusi et.al, 2019).

Dari berbagai penelitian yang meneliti determinan investasi, baik di maupun luar Indonesia, para peneliti lebih sering menggunakan penanaman modal asing atau FDI sebagai variabel terikat atau variabel proksi dari investasi. Padahal, investasi dalam konteks aktivitas perekonomian sebuah negara dalam kurun waktu tertentu bukan hanya yang bersumber dari luar atau asing saja. Namun, investasi dimaksud juga bersumber dari dalam negeri atau *domestic direct investment*. Meskipun demikian, penggunaan PMA/FDI ditambah PMDN/DDI sebagai proksi investasi agregat dari suatu perekonomian negara juga dirasa belum tepat. Hal ini didasarkan pada pernyataan BPS (2018) bahwa investasi dalam bentuk barang modal dikenal dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kemudian, PMA/FDI dan PMDN/DDI hanya merupakan sebagian dari total investasi yang dicatatkan sebagai PMTB dalam perhitungan PDB nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh upah atau biaya tenaga kerja terhadap investasi, dengan menggunakan PMTB sebagai ukuran investasi di Indonesia. Dari beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa upah atau biaya tenaga kerja memiliki pengaruh yang beragam dan ambigu terhadap investasi (khususnya FDI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap investasi di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Upah dan Investasi

Dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU tentang Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan upah minimum adalah standar minimum upah yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang ditujukan untuk pemenuhan kehidupan layak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU tentang Ketenagakerjaan.

Dalam ilmu ekonomi, tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi variabel dan upah merupakan imbal jasa dari penawaran tenaga kerja yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan. Upah tersebut merupakan salah satu komponen biaya faktor produksi yang sifatnya variabel dan memengaruhi tingkat produksi atau produktivitas. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya (Rahardja dan Manurung, 2010). Dengan demikian, upah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi

keputusan pelaku usaha atau produsen dalam meningkatkan produksinya. Penambahan atau peningkatan produksi tersebut sangat bergantung pada jumlah stok barang modal yang tersedia (*capital stock*). Untuk meningkatkan produksi, maka salah satu yang dilakukan adalah melakukan penambahan jumlah *capital stock*. Penambahan inilah yang disebut investasi. Rahardja dan Manurung (2014) mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (*capital stock*).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa peningkatan jumlah produksi dipengaruhi oleh upah sebagai biaya faktor produksi dan peningkatan jumlah produksi mensyaratkan penambahan stok barang modal yang tersedia atau investasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan salah satu determinan yang diperhitungkan oleh pelaku usaha dalam pengambilan keputusan penambahan stok modal atau investasi.

Dalam teori makroekonomi, disebutkan bahwa kenaikan tingkat upah akan berimplikasi pada kenaikan tingkat pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan permintaan uang. Menurut Keynes, kenaikan permintaan uang tersebut akan berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga, dengan asumsi *ceteris paribus* (Anggrainy, 2013). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan tingkat bunga dengan asumsi suplai uang tetap stabil (Stonier dan Haque, 1975 dalam Anggrainy, 2013). Selanjutnya tingkat bunga yang tinggi tersebut akan berpengaruh negatif terhadap investasi, yaitu menyebabkan turunnya investasi (Anggrainy, 2013). Hal ini sejalan dengan pemikiran Keynes yang menyatakan bahwa penurunan tingkat bunga akan meningkatkan permintaan terhadap investasi dan demikian sebaliknya. Artinya, kenaikan tingkat suku bunga akibat kenaikan upah akan berdampak pada kenaikan biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, yang akhirnya akan memengaruhi investasi.

2.2. Studi Empiris Tentang Pengaruh Upah Terhadap Investasi

Berdasarkan Teori Dunning, faktor makroekonomi yang memengaruhi investasi (dalam hal ini FDI) adalah ukuran pasar, stabilitas makroekonomi, kelayakan kredit atau pinjaman, keterbukaan perdagangan, infrastruktur, dan biaya tenaga kerja di negara tujuan investasi (Dua dan Garg, 2015). Dari teori tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor ekonomi yang memengaruhi kinerja investasi adalah biaya tenaga kerja yang salah satunya dapat diproyksi dengan upah pekerja. Berdasarkan beberapa hasil studi empiris, ditemukan bahwa hubungan antara biaya tenaga kerja atau upah terhadap investasi beragam dan ambigu.

Dalam literatur ilmu ekonomi, upah merupakan salah satu komponen yang memengaruhi besaran biaya produksi maupun biaya investasi. Kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi maupun investasi, baik secara langsung maupun ditransmisi melalui kenaikan suku bunga akibat kenaikan upah yang berimplikasi pada kenaikan permintaan uang pada kondisi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, upah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja investasi suatu negara. Upah buruh yang meningkat menunjukkan

adanya pertambahan biaya produksi, sehingga biaya untuk melakukan produksi di dalam suatu negara relatif menjadi lebih mahal (Kurniati et.al, 2007). Hal ini yang memengaruhi keputusan investasi. Bagi beberapa pengusaha, upah minimum merupakan biaya produksi yang dapat mengurangi keuntungan. Bila kenaikan biaya produksi tidak diimbangi dengan tingkat produktivitas pekerja maka keuntungan perusahaan akan berkurang dan tingkat investasi juga akan berkurang (Utma dan Rakhman, 2019).

Penelitian Hatziu (2000), dan Janicki dan Wunnava (2004) dalam Lai dan Sarkar (2011) menyatakan bahwa biaya tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan arus modal keluar (FDI outflow) dan menurunkan masuknya investasi (FDI). Artinya, biaya tenaga kerja atau upah memiliki hubungan negatif dengan FDI. Temuan tersebut senada dengan hasil penelitian Lai dan Sarkar (2011) yang juga menemukan upah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap FDI di India, dengan menggunakan data dari 305 perusahaan di 14 industri di India pada periode 2002/2003 – 2005/2006 dan metode *Ordinary Least Square*. Demikian juga penelitian Alam dan Shah (2013) yang menemukan bahwa biaya tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI di negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dengan menggunakan data panel pada periode 1985-2009 dan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Namun, hubungan upah tidak selamanya berbanding terbalik dengan investasi.

Penelitian Schneider and Frey (1985) dan Vijayakumar, Sridharan dan Rao (2010) dalam Dua & Garg (2015) menemukan bahwa upah/gaji berpengaruh positif terhadap investasi (dalam hal ini FDI). Hubungan positif ini dimungkinkan terjadi apabila kenaikan upah atau pemberian upah yang tinggi kepada pekerja yang berkompeten atau memiliki keterampilan akan meningkatkan produktivitas pekerja, yang akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan dan mendorong peningkatan investasi. Menurut Mentari & Yasa (2016) dalam Utma dan Rakhman (2019), hubungan positif dan signifikan dapat terlihat pada studi kasus Henry Ford dimana perusahaan Ford Motor Company memberikan upah minimum kepada para tenaga kerja di atas rata-rata dengan bukti yang menunjukkan bahwa membayar upah yang tinggi akan menguntungkan perusahaan, para pekerja yang bekerja di tempat tersebut merasa terpacu untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga laba perusahaan meningkat. Dengan diiringi peningkatan laba perusahaan, maka investasi perusahaan tersebut juga meningkat. Khasanah (2009) dalam Sitorus (2017) menyebutkan bahwa investor berani membayar upah yang tinggi pada beberapa kasus. Pekerja yang diberikan upah tinggi tersebut diasumsikan sebagai pekerja yang memiliki kualitas yang baik dan berketerampilan. Selama upah masih berada di titik keseimbangan produksi, maka kenaikan upah dapat meningkatkan produktivitas para pekerja dan meningkatkan keuntungan investor.

Penelitian Barrell dan Pain (1996) dan Biswas (2002) dalam Dua & Garg (2015) menemukan tidak ada dampak signifikan biaya tenaga kerja terhadap investasi. Temuan ini dapat dimungkinkan apabila determinan lain yang paling utama

memengaruhi investasi atau dengan kata lain biaya tenaga kerja atau upah bukan determinan bagi pemilik modal. Carstensen & Toubal (2003) dalam Lai dan Sarkar (2011) menyebutkan bahwa biaya tenaga kerja tidak memengaruhi aliran investasi (dalam hal ini FDI), apabila negara tujuan FDI memiliki potensi pasar yang tinggi serta lingkungan hukum dan ekonomi yang mendukung. Penelitian Gao (2005) di China dalam Lai dan Sarkar (2011) menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan dengan biaya tenaga kerja dalam menarik investasi asing dari negara maju.

Untuk Indonesia, penelitian Sodik dan Nuryadin (2008) menemukan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap investasi di pada periode 1993-2003, dengan menggunakan metode *fixed effect model*. Untuk variabel investasi, penelitian ini menggunakan nilai total absolut dari PMA/FDI dan PMDN/DDI. Hasil yang relatif sama juga ditemukan pada penelitian Anggrainy (2013), dimana Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Malang memiliki dampak negatif dan signifikan secara statistik terhadap investasi di Kota Malang periode 2001-2011, dengan metode *two stage least square*. Hubungan negatif upah terhadap investasi atau PMA/FDI di Indonesia juga ditemukan pada penelitian Utma dan Rakhman (2019), namun tidak signifikan secara statistik pada periode 2013-2016.

Berbeda dengan hasil penelitian Sodik dan Nuryadin (2008), Utma dan Rakhman (2019), dan Anggrainy (2013), penelitian Sitorus (2017) menemukan hubungan yang searah dimana upah berpengaruh positif terhadap FDI di Pulau Jawa pada 2001-2016, dengan metode *fixed effect model*. Peneliti berargumentasi bahwa hubungan positif tersebut dapat terjadi apabila upah yang tinggi pada pekerja yang kompeten dan berketerampilan akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya meningkatkan investasi. Argumentasi tersebut didasarkan pada teori *efficiency wage* yang menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, hal tersebut juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Demikian sebaliknya. Teori *efficiency wage* yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif (Sitorus, 2017). Hubungan positif antara upah dengan investasi juga ditemukan dalam penelitian Sanusi et.al (2019). Penelitian ini menemukan bahwa upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Pulau Jawa pada periode 2010-2018, dengan metode *random effect model*. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan Sitorus (2017), hubungan positif ini dikaitkan dengan upah tinggi akan meningkatkan produktivitas pekerja yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan bagi investor. Biaya upah yang tinggi tanpa diikuti dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi dapat menjadi masalah bagi perusahaan, karena dapat memengaruhi keuntungan yang didapatkan (Sanusi et.al, 2019).

2.3. Studi Empiris Tentang Pengaruh Tentang Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Investasi

Selain upah pekerja, faktor atau determinan lain yang memengaruhi kinerja investasi suatu negara adalah modal manusia atau *human capital* yang dimiliki oleh suatu negara. Penelitian Lall (1997), Dunning (2002), Donges (2005), serta Dunning dan Lundon (2008) dalam Karimi, et. al (2013) menyatakan bahwa iklim investasi yang menarik dan lingkungan kebijakan yang mendukung merupakan faktor penting agar negara berkembang berhasil menarik investasi (dalam hal ini FDI). Iklim investasi tersebut salah satunya terkait ketersediaan/kualitas faktor produksi, selain ukuran/akses pasar, biaya logistik, dan berbagai kondisi sosial politik yang kondusif untuk melakukan bisnis dengan risiko minimal (Karimi, et.al; 2013). Dalam literatur ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi adalah modal atau sumber daya manusia. Dengan demikian, modal manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan iklim investasi yang akhirnya mendorong kinerja investasi suatu negara. Pengalaman masa lalu dari berbagai negara yang berhasil menarik investasi menyatakan bahwa tingkat modal manusia atau *human capital* telah menjadi faktor krusial bagi perusahaan multinasional (terutama perusahaan bernilai tambah tinggi) untuk menentukan lokasi produksi baru (Karimi et.al, 2013). Lucas (1990) dalam Karimi, et. al (2013) menduga bahwa kurangnya modal manusia menyebabkan kurangnya FDI ke negara kurang berkembang.

Sejak 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) telah memperkenalkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan indeks komposit dari pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Menurut BPS, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dengan demikian, indeks ini mencerminkan kualitas modal manusia yang diukur dari indikator tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat (Ezkirianto dan Alexandi, 2013). Artinya, kualitas modal manusia sebagai salah satu faktor produksi sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, investasi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Zhang dan Markusen (1999) dalam Karimi, et. al (2013) menyatakan ketersediaan tenaga terampil di negara tujuan investasi merupakan persyaratan utama perusahaan multinasional dan memengaruhi volume aliran masuk FDI. Dunning (1988) dalam Karimi, et. al (2013) menyatakan bahwa keterampilan dan tingkat pendidikan tenaga kerja dapat memengaruhi aliran masuk investasi (FDI) dan aktivitas produksi perusahaan multinasional di suatu negara. Penelitian Karimi et.al (2013) menemukan bahwa tingkat pendidikan yang diukur dari angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan di 50 negara yang masuk kategori *developed and developing countries*. Demikian juga penelitian Alsan et.al (2006) yang menemukan bahwa

tingkat pendidikan di 74 negara industrial dan berkembang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDI pada periode 1980–2000.

Kesehatan yang dipandang sebagai salah satu pembentuk modal manusia dapat memengaruhi FDI melalui beberapa mekanisme. Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia/WHO (2001) dalam Alsan et.al (2006) menyatakan bahwa tenaga kerja yang sehat penting untuk menarik investasi langsung asing karena pengaruh kesehatan pada produktivitas pekerja. Kesehatan dapat memengaruhi kinerja ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, kesehatan memengaruhi produktivitas pekerja. Pekerja yang sehat umumnya memiliki fisik dan mental yang kuat dibanding yang menderita penyakit. Kemudian, pekerja yang sehat kecil kemungkinan untuk absen bekerja atau memiliki produktivitas yang rendah dalam bekerja (Alsan et. al, 2006). Produktivitas tenaga kerja inilah yang menjadi salah satu determinan keputusan pelaku usaha untuk melakukan investasi.

Di sisi lain, Alsan et. al (2006) juga menyatakan keuntungan perusahaan akan berkurang atau menderita apabila biaya kesehatan bagi perusahaan tinggi. Perusahaan yang beroperasi di negara dengan kesehatan dan tenaga kesehatan yang terbatas mungkin harus membangun atau memberikan subsidi sistem jaminan kesehatan kepada karyawannya. Cuti sakit, biaya pemakaman, dan moral tenaga kerja yang rendah merupakan beban tambahan bagi investasi perusahaan. investor akan menghindari daerah yang penyakitnya merajalela dan akses layanan kesehatan terbatas sebagai tujuan investasi karena pertimbangan risiko kesehatan. Penelitian Alsan et.al (2006), dan Talukdar dan Parvez (2017) menemukan bahwa kesehatan yang diproksi dengan angka harapan hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi atau FDI.

Determinan modal manusia terakhir yang menjadi ukuran penghitungan IPM atau pembentuk modal manusia adalah daya beli masyarakat. Salah satu cerminan kemampuan daya beli masyarakat adalah tingkat pendapatan per kapita atau PDB per kapita. Kenaikan tingkat pendapatan per kapita akan memengaruhi investasi dari beberapa mekanisme. Kenaikan tingkat pendapatan per kapita akan berimplikasi pada kenaikan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas modal manusia di suatu negara. Peningkatan kualitas modal manusia tersebut akan berdampak pada peningkatan produktivitas yang pada gilirannya akan mendorong keinginan investor untuk berinvestasi.

Mekanisme selanjutnya adalah melalui perubahan keseimbangan pasar secara agregat, baik pasar uang maupun pasar barang. Kenaikan pendapatan per kapita akan meningkatkan permintaan masyarakat secara agregat. Kenaikan permintaan secara agregat ini akan mendorong pelaku usaha atau produsen untuk memenuhi kenaikan permintaan tersebut dengan meningkatkan

kapasitas produksinya dengan menambah *capital stock* atau investasi. Artinya, kenaikan pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap investasi. Penelitian Karimi et.al (2013), Alam dan Shah (2013), Alsan et.al (2006), dan Paudel (2016) menemukan hubungan positif antara PDB per kapita dengan investasi (FDI).

Namun, kenaikan pendapatan per kapita juga dimungkinkan berpengaruh negatif terhadap investasi. Kenaikan pendapatan per kapita akan berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat yang akhirnya meningkatkan permintaan uang. Kenaikan permintaan uang ini akan berdampak pada kenaikan suku bunga, pada kondisi *ceteris paribus*. Kenaikan suku bunga tersebut akhirnya akan meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung oleh investor atau pelaku usaha, yang pada gilirannya akan mengurangi investasi. Penelitian Walsh dan Yu (2010), Ali et.al (2013), dan Sitorus (2017) menunjukkan bahwa kenaikan PDB per kapita mengurangi investasi (FDI).

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data panel dari 32 (tiga puluh dua) provinsi di Indonesia pada periode tahun 2011-2019. Data-data tersebut bersumber dari BPS. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis data menggunakan metode analisis statistik inferensial dengan metode estimasi *fixed effect model* (*FEM*).

3.2. Spesifikasi Model

Dalam menganalisis pengaruh upah minimum terhadap investasi di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode estimasi *FEM*. Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan referensi penelitian Sodik dan Nuryadin (2008). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Sodik dan Nuryadin adalah sama-sama menggunakan upah minimum provinsi sebagai salah satu variabel bebas yang memengaruhi investasi di Indonesia dan menggunakan metode *FEM* sebagai metode estimasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada data (jumlah provinsi dan periode) yang berbeda. Penelitian Sodik dan Nuryadin menggunakan data dari 26 (dua puluh enam) provinsi pada periode 1993-2003. Penelitian ini menggunakan data dari 32 (tiga puluh dua) provinsi pada periode 2011-2019. Dalam penelitian ini, provinsi DKI Jakarta dan provinsi Kalimantan Utara tidak dimasukkan dalam proses estimasi. Hal ini didasarkan pada sifat data provinsi DKI Jakarta merupakan *outlier*, yang diduga disebabkan oleh kedudukan provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah pusat pemerintahan nasional dan bisnis di Indonesia. Untuk Kalimantan Utara, tidak terdapat data yang lengkap sepanjang periode 2011-2019 yang diakibatkan oleh provinsi ini baru terbentuk pada 2013.

Perbedaan kedua dengan penelitian Sodik dan Nuryadin adalah data yang digunakan untuk variabel terikat yakni variabel investasi. Penelitian Sodik dan

Nuryadin menggunakan total PMA dan PMDN sebagai proksi investasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai data proksi investasi. Perbedaan ini didasarkan pada pandangan penulis bahwa penggunaan PMA/FDI ditambah PMDN/DDI sebagai proksi investasi agregat dari suatu perekonomian negara juga dirasa belum tepat. Hal ini didasarkan pada pernyataan BPS (2018) bahwa investasi dalam bentuk barang modal dikenal dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kemudian, PMA/FDI dan PMDN/DDI hanya merupakan sebagian dari total investasi yang dicatatkan sebagai PMTB dalam perhitungan PDB nasional.

Perbedaan selanjutnya adalah fokus penelitian yang berbeda. Penelitian Sodik dan Nuryadin lebih fokus untuk melakukan kajian terhadap berbagai determinan investasi di daerah. Adapun determinan yang diuji dalam penelitian tersebut adalah indikator *market size*, infrastruktur, spasial, ketenagakerjaan (yang salah satunya diproksi dengan upah minimum provinsi), dan ekonomi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap investasi di Indonesia. Adapun variabel di luar UMP, seperti tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, merupakan variabel kontrol lainnya dari model yang dibangun dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka spesifikasi model penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

Dimana :

INV : Investasi yang merupakan nilai PMTB harga konstan (triliun rupiah).

UMP : Upah Minimum Provinsi (juta rupiah)

PEND : Tingkat Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah (tahun).

KES : Tingkat Kesehatan yang diukur dengan umur harapan hidup (tahun).

DB : Daya Beli Masyarakat yang diukur dengan PDRB per Kapita Harqa Konstan (juta rupiah)

Berdasarkan persamaan (1), Investasi (INV) dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pendidikan (PEN), Tingkat Kesehatan (KES), dan Daya Beli Masyarakat (DB).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Likelihood Ratio Test dan Hausman Test

Sebelum melakukan pengujian empiris pengaruh upah minimum provinsi terhadap investasi, model pengujian terlebih dahulu diuji melalui *Likelihood*

Ratio Test dan *Hausman Test* untuk mengetahui pendekatan apa yang akan digunakan. Hasil test menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat adalah *Fixed Effect Model*.

4.2. Pembahasan

Dalam proses pengujian empiris, model pada penelitian ini menggunakan *fixed effect model* yang hasilnya disajikan dalam berikut ini:

$$\text{INV} = -286,63 - 3,25^*\text{UMP} + 8,64^*\text{PEN} + 3,59^*\text{KES} + 1,35^*\text{DB}$$

(0,00) (0,00)* (0,00)* (0,00)* (0,00)*

N = 288 R² = 0,9835 F-Stat = 431,11 F-Prob = 0.00

Keterangan: * = signifikan pada level $\alpha = 1$ persen

Pada Tabel 1 dapat diperhatikan bahwa nilai F-statistic (probabilitas model 0,00) menunjukkan nilai yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen. Ini berarti bahwa keempat variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap investasi. Secara parsial, hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien variabel UMP memiliki tanda negatif dan signifikan secara statistik. Artinya, UMP berpengaruh negatif terhadap investasi dan signifikan secara statistik atau kenaikan upah minimum provinsi akan menyebabkan penurunan nilai investasi. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Lai dan Sarkar (2011), Alam dan Shah (2013), Sodik dan Nuryadin (2008), dan Anggrainy (2013) yang menemukan hubungan negatif antara upah dengan investasi (yang diukur dengan FDI).

Temuan lain dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat terhadap investasi. Secara parsial, hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien variabel PEN memiliki tanda positif dan signifikan secara statistik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa variabel PEN berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel INV. Artinya, semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka akan menambah nilai investasi. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Karimi et.al (2013), dan Alsan et.al (2006).

Selanjutnya, koefisien variabel KES juga memiliki tanda positif dan signifikan secara statistik. Dengan kata lain, variabel KES berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel INV. Artinya, bertambahnya tingkat kesejahteraan atau usia harapan hidup masyarakat akan berdampak pada peningkatan investasi. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Alsan et.al (2006), dan Talukdar dan Parvez (2017) yang menemukan bahwa kesehatan yang diproksi dengan angka harapan hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi atau FDI.

Untuk variabel DB, penelitian ini menemukan hubungan yang positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel INV, yang ditandai dengan koefisien variabel DB memiliki tanda positif. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan daya beli atau pendapatan masyarakat akan berdampak pada peningkatan investasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Karimi

et.al (2013), Alam dan Shah (2013), Alsan et.al (2006), dan Paudel (2016) yang menemukan hubungan positif antara PDB per kapita dengan investasi (FDI).

5. Penutup

5.1. Simpulan

Terdapat 2 (dua) temuan dalam penelitian ini. Pertama, hasil estimasi menunjukkan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap kenaikan harga upah minimum provinsi akan menyebabkan penurunan nilai investasi. Demikian juga sebaliknya.

Kedua, variabel kontrol lainnya yakni tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan berdampak pada peningkatan nilai investasi.

5.2. Saran

Literatur ilmu ekonomi dan bukti empiris berbagai penelitian menyatakan bahwa investasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemajuan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas investasi akan menambah *capital stock* pada perekonomian sebuah negara. Penambahan ini akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas secara nasional, yang akhirnya akan mendorong peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi. Salah satu determinan yang diperhatikan oleh investor atau pelaku usaha pada saat pengambilan keputusan investasi adalah upah tenaga kerja yang memang merupakan salah satu komponen yang memengaruhi beban biaya produksi. Di satu sisi, kenaikan upah tenaga kerja akan menekan kinerja investasi. Hasil penelitian ini menunjukkan upah minimum provinsi akan mengurangi nilai investasi. Di sisi lain, tren upah minimum provinsi di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah (khususnya pemerintah daerah) harus tetap berhati-hati dalam menetapkan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka mengurangi dampak kenaikan upah tenaga kerja terhadap nilai investasi secara agregat, pemerintah perlu terus mendorong peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Hal ini diperlukan agar penetapan upah minimum sejalan dengan tingkat produktivitas pekerja itu sendiri. Jika sejalan, maka sangat dimungkinkan investor atau pelaku usaha menjadikan faktor upah tenaga kerja bukan determinan utama atas keputusan investasi. Kemudian, pemerintah juga harus terus berupaya mendorong peningkatan modal manusia di setiap daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pentingnya hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli sebagai ukuran atau pembentuk modal manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi.

Selain rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil temuan penelitian, rekomendasi lainnya adalah dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti pengaruh upah minimum atau upah tenaga kerja terhadap investasi. Kebutuhan penelitian lebih lanjut tersebut disebabkan oleh masih terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini. Salah satu kelemahan penelitian ini adalah data yang digunakan pada variabel dependen maupun independen yang merupakan data agregat pada level provinsi. Penggunaan data agregat tersebut akan berdampak pada berkurangnya tingkat akurasi, kelengkapan cakupan dan variasi data dari setiap variabel yang diuji. Kondisi ini akan mengurangi akurasi hasil uji estimasi dan berpotensi bias pada saat penarikan kesimpulan secara nasional. Apalagi, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penetapan upah minimum pada tingkatan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Alam, Abdullah, dan Shah, Syed Zulfiqar Ali. 2013. Determinants of foreign direct investment in OECD member countries. *Journal of Economic Studies*, Vol. 40, No.4, hal. 515-527.
- Ali, Hina., Chaudhary, Imran Sharif., Ali, Huma., Tasneem, Amna dan Ali, Hira. 2013. Human Capital as Determinant of Foreign Direct Investment (FDI) in Pakistan. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 17(7), hal. 877–884.
- Alsan, Marcella., Bloom, David E., dan Canning, David. 2004. The Effect Of Population Health On Foreign Direct Investment. *Nber Working Paper Series*, Working Paper 10596. Massachusetts: National Bureau of Economic Research.
- Alsan, Marcella., Bloom, David E., dan Canning, David. 2006. The Effect of Population Health on Foreign Direct Investment Inflows to Low- and Middle-Income Countries. *World Development* Vol.34, No. 4, hal. 613-630.
- Anggrainy, Kholifah. 2013. Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Kesempatan Kerja Dan Investasi: Studi Kasus pada Kota Malang Periode 2001-2011. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, Vol 1, No 2, hal. 1-14.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha, 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2015-2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2014-2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2011-2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dua, Pami dan Garg, Reetika. 2015. Macroeconomic Determinants Of Foreign Direct Investment: Evidence From India. *The Journal of Developing Areas*, Winter 2015, Vol. 49, No. 1 (Winter 2015), hal. 133-155.
- Ezkirianto, R., & Alexandi, M. F. (2013). Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dan PDRB Per Kapita Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(1), 14-29. <https://doi.org/10.29244/jekp.v2i1.19949>.
- Kambono, Herman. 2020. Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Volume 12 Nomor 1, Mei 2020, hal. 137-145.
- Karimi, Mohammad Sharif., Yusop, Zulkornain., Hook Law Siong., dan Chin, Lee. 2013. Effect of Human Capital on Foreign Direct Investment Inflows. *Journal of Economic Research* 18 (2013), hal. 1-23.
- Kurniati, Yati., Prasmuko, Andry., dan Yanfitri. 2007. Determinan FDI (Faktor-faktor yang Menentukan Investasi Asing Langsung). *Working Paper*, WP/06/2007. Jakarta: Bank Indonesia.
- Lai, Yu-Cheng dan Sarkar, Santanu. 2011. Labour Cost & Foreign Direct Investment-Evidence from India. *The Indian Journal of Industrial Relations*, Vol. 46, No. 3, January 2011, hal. 396-411.
- Paudel, Ramesh. 2016. Role of Human Development and Governance in Foreign Direct Investment in the Post Reform Era: The Case of Tanzania. *International Journal of Research & Methodology in Social Science*, 2(2), hal. 5–18.
- Rahardja, Prathama., dan Manurung, Mandala. 2010. Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar, Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahardja, Prathama., dan Manurung, Mandala. 2014. Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sanusi, Muhammad., Kuncoro, Haryo Firas Tunas., dan Herianingrum, Sri. 2019. Makroekonomi dan Penanaman Modal Asing di Indonesia: Bukti Empiris di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi*/Volume XXIV, No. 02 July 2019, hal. 288-303.
- Sitorus, Daud Oloan. 2017. Pengaruh PDRB Perkapita, Inflasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penanaman Modal Asing Di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, Vol 5, No 2, hal. 1-14.

- Sodik, Jamzani dan Nuryadin, Didi. 2008. Determinan Investasi di Daerah: Studi Kasus Propinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.13 No.1, April 2008, hal. 15-31.
- Sulistiwati, Rini. 2012. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 2012, Vol. 3, No. 1, hal. 29-50.
- Talukdar, Zayeed Hasan dan Parvez, Al-Amin. 2017. Measuring The Impact Of Population Health And Education On Foreign Direct Investment: Panel Evidence From 46 Countries. *Asian Economic and Financial Review*, 2017, 7(12), hal. 1242-1255.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Utma, Siti Syafaatul dan Rakhman, Arif. 2019. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, Dan Angkatan Kerja Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2013-2016. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Volume 4, Nomor 2, 2019, hal. 101-109.
- Walsh, James P., dan Yu, Jiangyan. 2010. Determinants of Foreign Direct Investment: A Sectoral and Institutional Approach. *IMF Working Paper*, WP/10/187. Washington DC: International Monetary Fund

ANALISIS KRITIS TERHADAP KINERJA SEKTOR PERTANIAN SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN

Critical Analysis Of Agriculture Sector Performance Food Plant Subsector

Dahiri

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

Email: dahiridai@gmail.com

Abstract

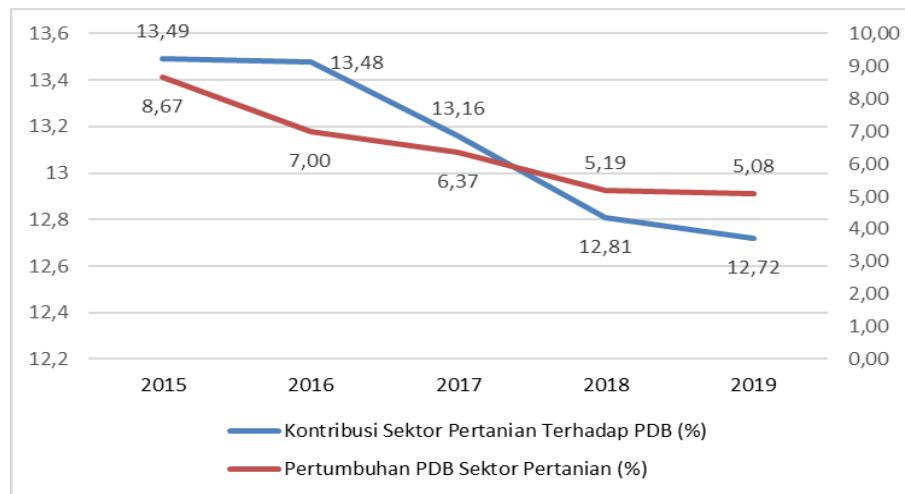
The performance of the agricultural sector in the food plant subsector is currently experiencing a decline, due to a slowdown in GDP growth and a negative trade position every year. The purpose of this study is to determine the determinants of production and efforts to increase the production of the food plant subsector. The research method used is the exploratory and descriptive method. The results showed that the determinants of production were influenced by land area and productivity, there was a change in the function of agricultural land, and alsintan in post-harvest was still relatively minimal. Efforts to overcome these problems are that the government must absorb the production of farmers and the provision of agricultural machine tools (alsintan) must be complete, namely pre-harvest and post-harvest.

Keywords: the food plant subsector, production, land area, productivity

1. Pendahuluan

Kinerja sektor pertanian tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB. Pertumbuhan PDB sektor pertanian selama periode 2015-2019 terus mengalami perlambatan, dari 8,67 persen tahun 2014 menjadi 5,08 persen pada tahun 2019. Begitu juga kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dari 13,34 persen di tahun 2014 menjadi 12,72 persen di tahun 2019 (Gambar 1).

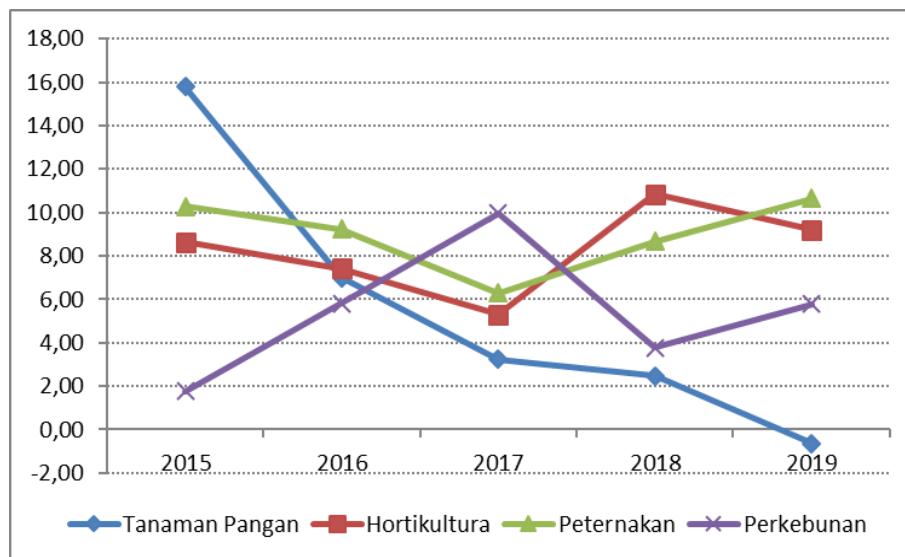
Gambar 1. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian dan Kontribusinya 2015-2019



Sumber: BPS (2020a), diolah.

Turunnya kinerja sektor pertanian di atas merupakan secara agregat dari keempat subsektor pertanian yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Sedangkan pertumbuhan PDB masing-masing subsektor cenderung berfluktuatif, kecuali subsektor tanaman pangan yang terus mengalami perlambatan setiap tahunnya (Gambar 2).

Gambar 2. Perkembangan PDB per Subsektor, 2015-2019



Sumber: BPS (2020b), diolah.

Sedangkan kinerja sektor pertanian dalam perdagangan internasional dominan mengalami neraca perdagangan yang negatif, kecuali subsektor perkebunan yang selalu positif (Gambar 3).

Gambar 3. Perkembangan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian 2015-2019

Sumber: Kementerian Pertanian (2020d), diolah.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan masih cenderung bergantung dari impor. Lebih parahnya lagi, subsektor tanaman pangan juga yang mengalami neraca perdagangan yang paling dalam setiap tahunnya.

Beberapa permasalahan di atas menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan saat ini mengalami penurunan, karena pertumbuhan PDB mengalami perlambatan dan neraca perdagangan negatif setiap tahunnya. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor produksi dan harga. Faktor produksi merupakan faktor yang masih bisa dalam kendali pemerintah. Sedangkan faktor harga sangat berkaitan dengan faktor eksternal, sehingga tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Karena itu, tulisan ini akan fokus pada pembahasan faktor produksi pada subsektor tanaman pangan.

Pertumbuhan PDB subsektor tanaman pangan mengalami perlambatan setiap tahunnya. Begitu juga neraca perdagangan subsektor tanaman pangan terus negatif setiap tahunnya. Kedua kondisi tersebut sangat berkaitan dengan faktor produksi. Karena itu, rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana determinan faktor produksi subsektor tanaman pangan dan bagaimana upaya meningkatkan produksi subsektor tanaman pangan. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis determinan faktor produksi subsektor tanaman pangan dan upaya meningkatkan produksi subsektor tanaman pangan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dimensi Terkini Pembangunan Pertanian Indonesia

Dimensi baru dalam pembangunan pertanian Indonesia meliputi pertumbuhan pertanian, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ketiga hal tersebut terkadang tidak komplementer satu dengan yang lain. Itulah sebabnya tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk dapat mencapai

tujuan ketiga hal itu. Namun hal itu bukan berarti tidak memungkinkan untuk dapat mencapai komplementer ketiganya secara serentak. Jika kondisi spesifik sosial-ekonomi dan agroekosistem dalam kondisi sangat memungkinkan, maka tingkat komplementer yang tinggi dari ketiganya dapat tercapai secara baik. Kondisi yang dimaksud di atas memungkinkan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada pertanian yang tangguh dan berdaya saing tinggi (Andrianto, 2014).

2.2. Kesejahteraan Petani

Unsur penting yang dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani adalah besarnya pendapatan dan perimbangannya dengan pengeluaran. Dalam kaitan tersebut salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/dibayar petani yang mencakup konsumsi dan *input* produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan *input* produksi tersebut, dan berarti secara relatif lebih sejahtera. Penanda kesejahteraan yang unik bagi rumah tangga tani praktis tidak ada, sehingga NTP menjadi pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan pertanian dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian, NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani (Simatupang dan Maulana, 2008 dalam BAPPENAS dan JICA, 2013). Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (Silitonga, 1995; Sumodiningrat, 2001; Tambunan, 2003; BPS, 2006; Masyhuri, 2007 dalam BAPPENAS dan JICA, 2013).

Dengan menggunakan teori keseimbangan umum menunjukkan bahwa NTP dapat dijadikan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan petani. Secara konsepsi arah dari NTP (meningkat atau menurun) merupakan resultan dari arah setiap komponen penyusunnya, yaitu komponen penerimaan yang mempunyai arah positif terhadap kesejahteraan petani dan komponen pembayaran yang mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan. Apabila laju komponen penerimaan lebih tinggi dari laju pembayaran maka nilai tukar petani akan meningkat, demikian sebaliknya. Pergerakan naik atau turun NTP menggambarkan naik turunnya tingkat kesejahteraan petani. Lebih lanjut, NTP mempunyai karakteristik yang cenderung menurun. Hal ini berkaitan dengan karakteristik yang melekat dari komoditas pertanian dan nonpertanian. Ada tiga penjelasan mengenai terjadinya penurunan NTP, yaitu: (1) elastisitas pendapatan produk pertanian bersifat inelastis sementara produk nonpertanian cenderung lebih elastis, (2) perubahan teknologi dengan laju yang berbeda menguntungkan produk manufaktur, dan (3) perbedaan dalam struktur pasar. Struktur pasar dari produk pertanian cenderung kompetitif, sementara struktur pasar produk manufaktur cenderung kurang kompetitif dan mengarah ke pasar monopoli/oligopoli (Rachmat, 2000 dalam BAPPENAS dan JICA, 2013).

2.3. Teknologi Pertanian

Pengembangan alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam pertanian atau sering dikenal sebagai mekanisasi pertanian dewasa ini mulai ditingkatkan hampir seluruh negara agraris di dunia. Kata "mekanisasi pertanian" memiliki jangkauan yang sangat luas dapat mencakup penggunaan alat-alat pertanian yang sifatnya masih sederhana sampai alsintan yang dapat dikatakan rumit dari sudut penerapan teknologi. Alat-alat pertanian sederhana yang umum digunakan petani dalam rangkaian bercocok tanam mereka seperti cangkul, sabit, bajak yang ditarik oleh sapi atau kerbau, alat tampi yang digerakkan dengan menggunakan tangan manusia atau hewan ternak. Sedangkan alsintan yang sekarang telah dikenal banyak digunakan dalam rangkaian bercocok tanam misalnya mesin bajak, mesin perontok padi, mesin pemipil jagung, peralatan lain-lain yang menggunakan bahan bakar atau alat pembangkit listrik. Dengan demikian alsintan menyediakan jasa bagi manusia (petani), mulai dari membalik tanah menyiapkan persemaian, menebar, menebas, dan lain-lain. Peluang pengembangan alsintan di Indonesia masih terbuka sangat lebar. Namun, perlu diperhatikan alsintan yang dikembangkan harus memenuhi kriteria ketepatgunaan dengan didukung penelitian yang memadai. Kriteria yang demikian itu harus dipenuhi agar penggunaan alsintan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, nilai tambah hasil pertanian, pengendalian limbah dan pemanfaatannya (Andrianto, 2014).

2.4. Penelitian Terdahulu

Fajar dan Alfiyani (2018) menganalisis kinerja sektor pertanian Indonesia 2012-2016. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pertama, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian mengalami *stagnan* pada angka 13 persen dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari subsektor tanaman perkebunan. Kedua, dari sisi tenaga kerja sektor pertanian masih merupakan penyerap terbesar, namun selama periode observasi mengalami penurunan akibat upah yang rendah, lahan pertanian semakin menurun, investor kurang tertarik berinvestasi pada sektor pertanian, dan diduga adanya mekanisasi sehingga secara absolut mengurangi pemakaian tenaga kerja, namun juga meningkatkan nilai *output* akibatnya produktivitas sektor pertanian meningkat selama periode observasi. Ketiga, dari sisi perdagangan luar negeri, pergerakan nilai impor komoditas pertanian di atas pergerakan nilai ekspor, yang artinya terjadi defisit neraca perdagangan secara agregat.

Saputra dan Wardana (2018) menganalisis pengaruh langsung luas lahan, alokasi waktu terhadap produksi petani. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa luas lahan, alokasi waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi petani.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif dan deskriptif. Pendekatan eksploratif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data primer dan sekunder baik kualitatif maupun kuantitatif.

3.2. Data Penelitian

Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari instansi-instansi terkait sektor pertanian serta hasil penelitian.

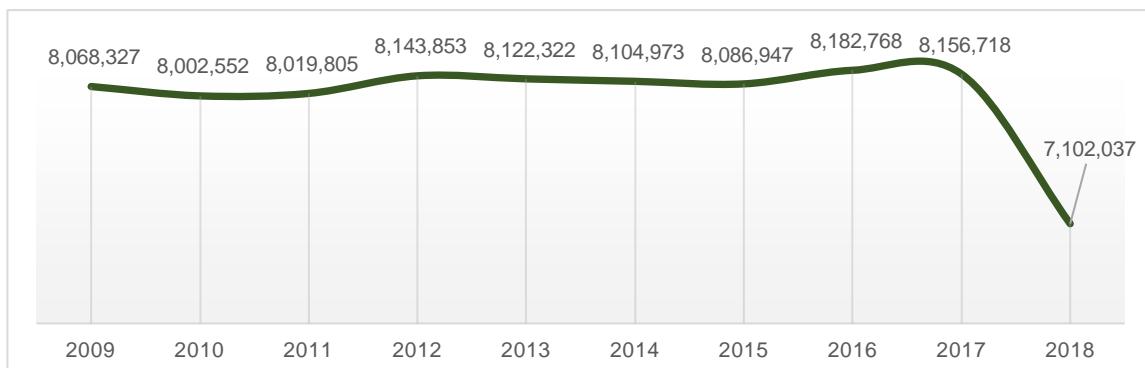
4. Hasil dan Pembahasan

Turunnya kinerja sektor pertanian subsektor tanaman pangan merupakan tekanan bagi pemerintahan, karena tanaman pangan merupakan komoditas unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024. Turunnya kinerja tersebut tidak terlepas dari kapasitas produksi tanaman pangan. Sedangkan determinan produksi sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan produktivitas. Luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani melalui produksi petani (Saputra dan Wardana, 2018). Sedangkan produktivitas merupakan rata-rata produksi dibagi rata-rata luas lahan (Silamat, et. al, 2014). Dengan demikian, produksi sangat tergantung pada luas lahan dan produktivitas.

4.1. Lahan

Kondisi luas lahan pertanian saat ini cenderung mengalami penyusutan karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian. Alih fungsi yang masif tersebut seperti pembangunan fasilitas umum dan perumahan, serta alih komoditi. Dengan adanya alih fungsi lahan, maka produksi juga akan menurun. Meskipun terbitnya Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), tetapi luas lahan sawah masih terus terjadi penurunan (Gambar 4).

Gambar 4. Perkembangan Luas Lahan Sawah (Ha)



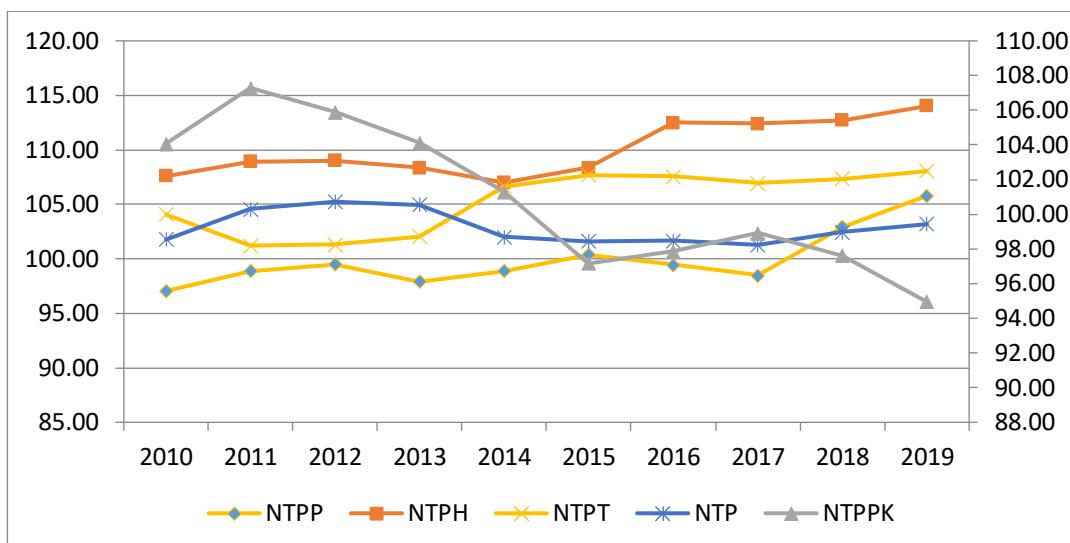
Sumber: Kementerian Pertanian (2020c) dan Badan Pusat Statistik (2009-2019), diolah.

Konversi lahan sawah (dari sawah menjadi lahan lain) tersebut diperkirakan mencapai 100.000 ha per tahun. Bila konversi lahan produktif ini tidak diatasi, maka diperkirakan pada 40-50 tahun yang akan datang, luas lahan sawah akan habis menjadi kawasan nonpertanian (Tribunnews, 2017). Kemudian penelitian lainnya memperkirakan laju konversi lahan sawah nasional sekitar 96.512 ha th⁻¹. Dengan laju tersebut lahan sawah yang saat ini seluas 8,1 juta ha diprediksi akan menciut menjadi hanya 5,1 juta ha pada tahun 2045. Laju konversi lahan sawah tersebut berada pada tingkat yang mengkhawatirkan (Mulyani, et.al; 2016).

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa permasalahan pada lahan yaitu adanya alih fungsi lahan karena kebutuhan tempat tinggal, dan keperluan untuk fasilitas umum. Sedangkan konversi lahan sawah yang disebabkan adanya alih komoditi dari tanaman pangan ke tanaman nonpangan karena margin harga komoditas nonpangan dianggap lebih menguntungkan bagi petani.

Menurut penulis, terjadinya alih komoditi merupakan tekanan terhadap sektor tanaman pangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan subsektor tanaman pangan masih lebih rendah dari kesejahteraan nonpangan. Tingkat kesejahteraan petani tersebut tercermin dalam NTP. NTP sendiri terdiri dari Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP), Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH), Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPPK), dan Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPPT) dengan perkembangannya disajikan dalam Gambar 5.

Gambar 5. Perkembangan NTP, NTPP, NTPH, NTPPK, dan NTPPT



Sumber: Kementerian Pertanian (2020b), diolah

Dari Gambar 5 di atas terlihat bahwa tingkat kesejahteraan petani subsektor tanaman sepanjang tahun 2010-2014 merupakan terendah dari pada subsektor lainnya dan selalu di bawah tingkat kesejahteraan petani nasional (NTP). Periode tahun 2015-2017 NTPP tetap menjadi yang paling rendah dan di bawah NTP nasional. Namun, pada tahun 2018-2019 NTPP cukup membaik

karena sudah bisa di atas NTP nasional. Tetapi, NTPP masih tetap di bawah tingkat kesejahteraan subsektor hortikultura dan peternakan. Artinya usaha tani subsektor hortikultura dan peternakan lebih menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi dari pada subsektor tanaman pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan subsektor tanaman pangan belum mampu lebih sejahtera dari subsektor hortikultura dan peternakan. Sebagai contoh perbandingan antara pendapatan subsektor tanaman pangan dengan subsektor hortikultura disajikan dalam Tabel 2.

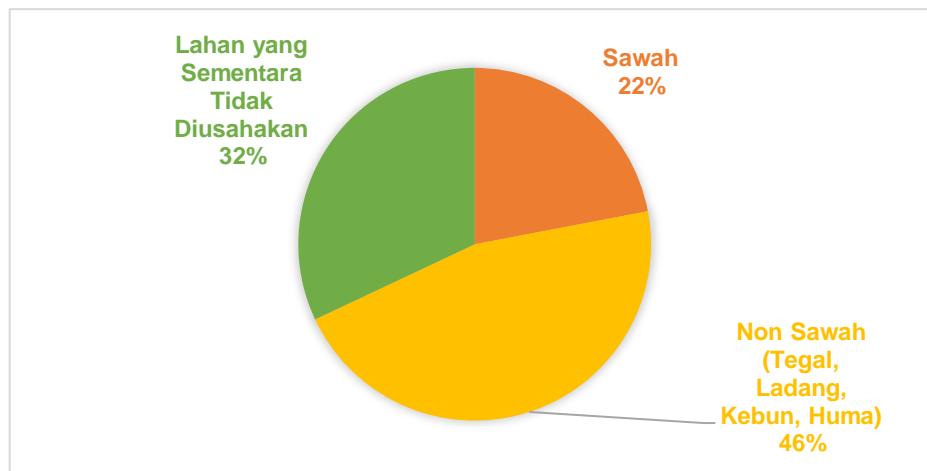
Tabel 2. Perbandingan Pendapatan Komoditi Tanaman Pangan dengan Hortikultura per Hektar

Jenis \Uraian	Nilai Produksi (juta Rp)	Biaya Produksi (juta Rp)	Pendapatan (juta Rp)
Padi (Tanaman Pangan)	17,2	12,7	4,5
Jagung (Tanaman Pangan)	12	9,1	2,9
Cabai Merah (Hortikultura)	77,1	52,1	25
Bawang Merah (Hortikultura)	77,2	67,2	10

Sumber: BPS, diolah.

Dari Tabel 2 di atas jelas terlihat bahwa pendapatan subsektor hortikultura jauh lebih menguntungkan dari pada subsektor tanaman pangan. Suatu pilihan yang realistik jika petani tanaman pangan beralih komoditi, mengingat pendapatan komoditi hortikultura jauh lebih besar. Hal ini menjadi faktor utama alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan nonpangan. Kondisi ini juga tercermin dari persentase luas lahan pertanian sawah hanya sebesar 22 persen, sementara lahan nonsawah sebesar 46 persen (Gambar 6).

Gambar 6. Distribusi Luas Lahan Pertanian Indonesia, 2018



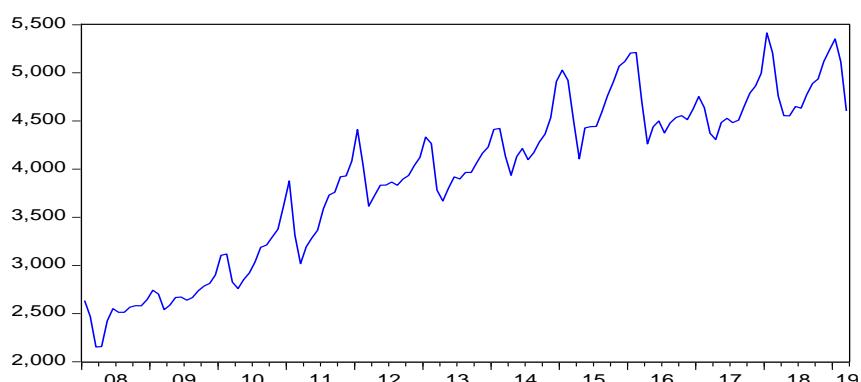
Sumber: Kementerian Pertanian, 2020c, diolah.

Semakin kecilnya lahan pertanian pangan akan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dan keadautan pangan Indonesia pada masa yang akan datang. Jika permasalahan ini tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah, maka luas lahan pertanian pangan akan terancam habis. Dampaknya Indonesia akan sangat tergantung impor untuk memenuhi

kebutuhan pangan. Dengan demikian, produksi hasil pertanian subsektor tanaman pangan akan semakin tergerus, sehingga kedaulatan pangan menjadi sulit terwujud.

Salah satu faktor utama alih komoditi adalah persoalan harga khususnya pada saat panen raya. Panen raya merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh para petani, karena saatnya untuk menikmati hasil kerja selama kurang lebih 3 bulan. Namun hal tersebut tidak seindah yang diharapkan, karena cenderung pada saat waktu panen raya harga gabah anjlok. Petani mengeluhkan harga gabah selalu turun setiap musim panen raya. Dalam kurun waktu 2008-2019 harga gabah selalu mengalami penurunan saat musim panen raya tiba yang disajikan dalam Gambar 7.

Gambar 7. Tren Harga Gabah Kering Panen 2008-2019 (Rp per kg)



Sumber: Kementerian Pertanian (2020a), diolah

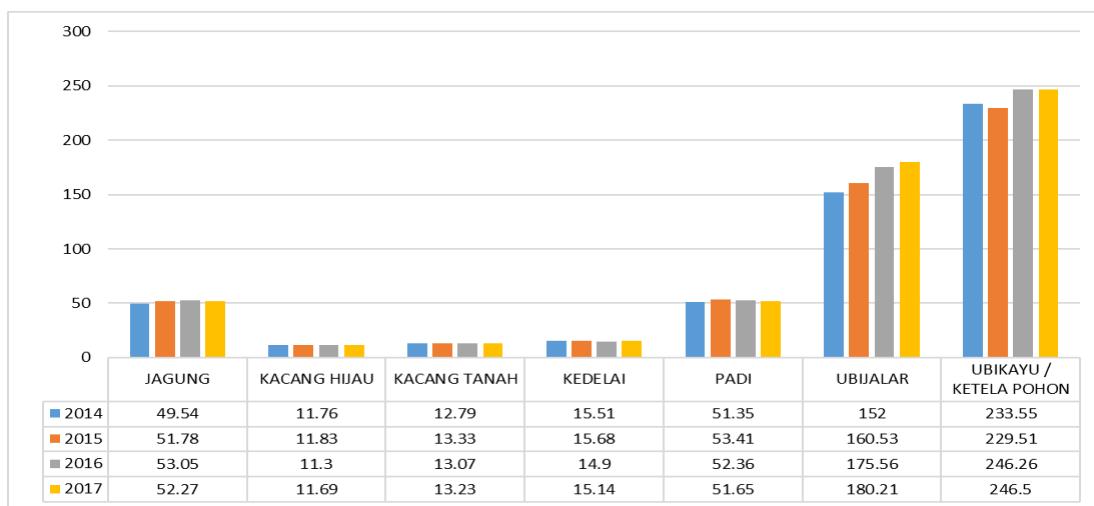
Pada Gambar 7 di atas, terlihat bahwa tren harga gabah sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2019 selalu turun pada triwulan pertama, padahal triwulan pertama tersebut merupakan masa panen raya. Saat ini petani cenderung lebih suka menjual gabah kering panen, karena langsung mendapatkan hasilnya sehingga dapat segera mengembalikan modal sendiri atau modal hasil dari pinjaman. Namun, pada musim panen raya harga gabah cenderung anjlok. Anjloknya harga gabah tersebut akan berdampak langsung pada hasil pendapatan yang ikut turun. Sebagai contoh anjloknya harga gabah daerah sentra produksi beras di Indramayu harga gabah kering panen di tingkat petani sudah mencapai Rp3.500 sampai dengan Rp3.800 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi di Kulonprogo. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo disampaikan bahwa harga gabah kering saat ini berkisar Rp3.000 sampai Rp3.200 per kilogram dari harga sebelumnya yang bisa mencapai Rp3.800 per kilogram. Adapun penyebab anjloknya harga tersebut dikarenakan masa panen raya dan Badan Urusan Logistik (Bulog) juga belum melakukan penyerapan yang optimal ke tingkat petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menjaga harga pada saat panen raya masih kurang. Adapun upaya yang perlu dilakukan adalah pemerintah membuat regulasi untuk menjamin harga tetap stabil dengan menyerap hasil produksi petani. Sebagai contoh petani di Jepang yang mendapatkan fasilitas yang memadai dalam melakukan usaha taninya, yaitu sarana *input* produksi

dan diserapnya hasil produksi oleh *Japan Agriculture* atau Koperasi Pertanian Jepang (DetikFinance, 2019). Hasil produksi tersebut juga bukan gabah kering panen, melainkan gabah kering giling. Artinya, hal ini dapat menjadi stimulus untuk petani meningkatkan nilai tambah hasil pertaniannya. Dengan adanya nilai tambah, maka pendapatan petani juga akan semakin besar, karena harga gabah kering giling jauh tinggi dari gabah kering panen. Adapun lembaga yang diamanatkan untuk menyerap hasil produksi tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

4.2. Produktivitas

Perkembangan produktivitas subsektor tanaman pangan diberikan dalam gambar di bawah ini.

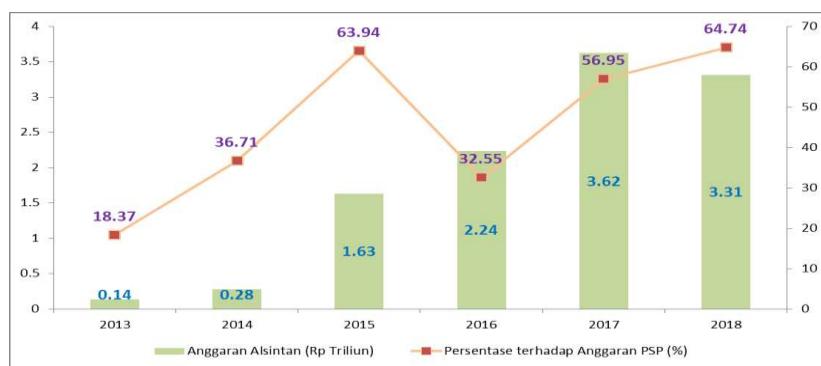
Gambar 8. Perkembangan Produktivitas Subsektor Tanaman Pangan



Sumber: Kementerian Pertanian (2020e), diolah

Dari gambar di atas terlihat bahwa komoditas padi yang terus mengalami penurunan, komoditas jagung, kacang hijau kacang tanah dan kedelai cenderung berfluktuatif, dan komoditas ubi jalar dan ubi kayu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Padi merupakan pangan pokok utama nasional, tetapi produktivitasnya terus mengalami penurunan.

Salah satu faktor determinan produktivitas adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi pertanian merupakan transformasi pengolahan lahan pertanian dari tenaga manusia digantikan dengan alsinan. Penggunaan alsinan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga produksi juga meningkat. Selain peningkatan produksi, penggunaan alsinan juga dapat menurunkan biaya produksi. Dengan meningkatnya produksi dan menurunkan biaya produksi, maka pendapatan petani akan lebih besar. Untuk mempercepat pemanfaatan alsinan tersebut, maka pemerintah setiap tahunnya cenderung meningkatkan anggaran pengadaannya. Proporsi anggaran tersebut juga semakin besar dibandingkan dengan prasarana dan sarana pertanian lainnya (Gambar 9).

Gambar 9. Perkembangan Anggaran Alsintan

Sumber: Kementerian Pertanian (2018), diolah.

Dari Gambar 9 di atas, terlihat bahwa proporsi anggaran untuk alsintan dari tahun 2013 hanya sebesar 18,37 persen dengan anggaran Rp0,14 triliun menjadi 64,74 persen pada tahun 2018 dengan anggaran Rp3,31 triliun. Proporsi hanya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016. Pengadaan alsintan terbesar yaitu traktor roda dua, *rice transplanter*, dan pompa air. Ketiga alsintan ini merupakan alsintan untuk hulu produksi pertanian (pra panen). Penggunaan traktor untuk pengolahan tanah dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani padi. Penggunaan traktor pada pengolahan tanah telah meningkatkan produktivitas sebesar 667 kilogram per hektar. Penggunaan traktor pada pengolahan tanah juga telah meningkatkan pendapatan sebesar Rp2.843.400 per hektar. Selain itu, penggunaan traktor telah mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga dapat mempercepat kegiatan persiapan lahan dan penanaman (Suyatno, et.al; 2018). Selain mesin untuk pengolahan tanah, mesin tanam (*rice transplanter*) juga berperan dalam meningkatkan produksi dan menekan biaya tanam. Biaya tanam menggunakan *rice transplanter* hanya sebesar Rp1.137.500 lebih kecil dari konvensional (tanpa *rice transplanter*) sebesar Rp2.790.000. Kemudian hasil produksi menggunakan *rice transplanter* sebanyak 5,05 ton per hektar lebih besar dari konvensional (tanpa *rice transplanter*) hanya sebanyak 4,84 ton per hektar (Umar dan Pangaribuan, 2017). Berdasarkan beberapa penelitian di atas, telah menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi alsintan dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Dengan demikian pendapatan petani yang menggunakan alsintan akan lebih besar dari petani yang tidak menggunakan alsintan.

Untuk lebih meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, maka penggunaan alsintan tidak sebatas pada hulu produksi pertanian melainkan hilir produksi pertanian (pasca panen) juga perlu penggunaan alsintan. Namun, penggunaan alsintan pada pasca panen masih relatif minim. Padahal alsintan pra panen dan pasca panen harus berjalan bersama-sama sehingga produktivitas dan pendapatan petani yang diinginkan dapat tercapai. Masih minimnya penggunaan alsintan pada pasca panen tercermin dari data Ditjen PSP bahwa mesin traktor roda 2 (dua) untuk pra panen sepanjang tahun 2013-2017 total ada sebanyak 112.395 unit dengan setiap tahun selalu ada

pengadaannya. Sedangkan mesin perontok padi (*power thresser*) untuk pasca panen sepanjang tahun 2013-2017 total hanya ada 1.646 unit dengan pengadaannya hanya ada pada tahun 2015. Oleh karena itu, pemberian bantuan alsintan pasca panen masih memang perlu ditingkatkan. Hal tersebut juga tercermin dari salah satu daerah sentra produksi padi di Kabupaten Sumedang. Para petani sangat berharap pemerintah bisa menambah bantuan alsintan perontok padi, karena alsintan tersebut dapat meningkatkan produktivitas hingga 12 ton per hektar (DetikFinance, 2020). Kekurangan mesin perontok juga terjadi di Desa Melai. Pemerintah telah memberikan mesin perontok kepada kelompok tani beberapa tahun silam, tetapi mesin perontok tersebut dinilai masih kurang. Petani harus antri untuk memakai mesin perontok padi, karena per kelompok hanya ada satu unit dengan per kelompok memiliki anggota hingga belasan orang (Tribunnews Pekanbaru, 2018). Artinya petani masih banyak yang membutuhkan alsintan pasca panen, karena alsintan pasca panen sangat erat juga kaitannya dalam produktivitas, seperti mesin perontok padi tersebut.

Pemanfaatan mesin perontok padi (*power thresher*) mampu menekan hasil yang tercercer, sehingga produksi lebih meningkat. Hasil produksi yang menggunakan *power thresher* sebanyak 5.306 kilogram. Sedangkan hasil produksi yang tidak menggunakan *power thresher* hanya sebanyak 4.464 kilogram (Kurniawan dan Wahyudati, 2015). Adopsi teknologi mekanisasi dalam kegiatan panen lebih efisien baik dari sisi tenaga kerja, biaya maupun waktu, dan mengurangi kehilangan hasil. Biaya panen dengan gebot sebesar Rp4.800.000, *power thresher* sebesar Rp3.000.000-3.400.000, dan biaya panen dengan *combine harvester* sebesar Rp2.100.000. Selain biaya, kehilangan hasil gabah dengan gebot sebesar 14-16 persen, *power thresher* sebesar 10-12,5 persen, dan *combine harvester* sebesar 2-3,5 persen (Purwantini dan Susilowati, 2018).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan alat mesin pertanian secara utuh mulai dari produksi pra panen dan pasca panen dapat meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas tersebut, maka produksi hasil pertanian akan semakin tinggi, sehingga pendapatan petani akan lebih besar. Oleh karena itu, pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) harus secara lengkap yaitu pra panen dan pasca panen.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Determinan produksi sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan produktivitas
2. Upaya untuk meningkatkan produktivitas yaitu pemberian bantuan alsintan harus secara lengkap yaitu pra panen dan pasca panen.

5.2. Saran

Penelitian masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran untuk penelitian berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menganalisis efektivitas UU No. 41 Tahun 2009 Tentang PLP2B dalam menjaga alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2014. Pengantar Ilmu Pertanian (Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroteknologi). Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- BAPPENAS dan JICA. 2013. Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019. Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas.
- BPS. 2020a. PDB Lapangan Usaha 2015-2019. Diambil dari www.bps.go.id, pada tanggal 11 Oktober 2020.
- _____. 2020b. Nilai Produksi dan Biaya Produksi. Diambil dari www.bps.go.id, pada tanggal 5 Oktober 2020.
- _____. 2009-2020. www.bps.go.id
- DetikFinance. 2019. Tinjau Sawah, Mentan Dapat Ilmu dari Petani Jepang, Artikel online. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4546316/tinjau-sawah-mentan-dapat-ilmu-dari-petani-jepang>, pada tanggal 10 Oktober 2020.
- _____. 2020. Punya Mesin Perontok Padi, Panen di Sumedang Capai 12 Ton per Hektar. Artikel online. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4966111/punya-mesin-perontok-padi-panen-di-sumedang-capai-12-tonhektare>, pada tanggal 10 Oktober 2020.
- Fajar, Muhammad, & Alfiyani, Rakhmah. 2018. Kinerja Sektor Pertanian Indonesia Periode 2012 – 2016. Working Paper DOI: 10.13140/RG.2.2.19033.83045
- Kementerian Pertanian. 2018. Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013-2017. Ditjen PSP: Kementerian Pertanian.Jakarta.
- _____. 2020a. Harga Gabah Kering Panen. Diambil dari www.aplikasi2.pertanian.go.id, pada tanggal 2 Oktober 2020.
- _____. 2020b. Data Nilai Tukar Petani. Diambil dari www.pertanian.go.id, pada tanggal 2 Oktober 2020.
- _____. 2020c. Luas Lahan. Diambil dari www.prasarana.pertanian.go.id, pada tanggal 2 Oktober 2020.
- _____. 2020d. Ekpor Impor Komoditi. Diambil dari www.database.pertanian.go.id, pada tanggal 2 Oktober 2020.

- _____. 2020e. <https://aplikasi2.pertanian.go.id/bdsp/>
- Kurniawan, Rahmat dan Wahyudati, Diah. 2015. Analisis Perbandingan Pendapatan Petani Padi yang Menggunakan Mesin Perontok Padi dan yang tidak Menggunakan Mesin Perontok Padi di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang. *Societa, Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, Vol. IV-2, Desember 2015, hal. 77.
- Mulyani, Anny; Kuncoro, Dwi; Nursyamsi, Dedi; dan Agus, Fahmuddin. 2016. Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan. *Jurnal Tanah dan Iklim*, Vol. 40 No. 2, Desember 2016, Hal. 132.
- Purwantini, Tri Bastuti dan Susilowati, Sri Hery. 2018. Dampak Penggunaan Alat Mesin Panen Terhadap Kelembagaan Usaha Tani Padi. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 16 No.1, Juni 2018, hal. 85.
- Saputra, I Nyoman Alit Febri dan Wardana, I Gede. 2018. Pengaruh Langsung Luas Lahan, Alokasi Waktu Terhadap Produksi Petani. *E-Jurnal EP UNUD*, Vol. 7 No 9, September 2018, hal. 2038
- Silamat, Edi,. Yuwana, dan Yuliarso, M. Zulkarnain. 2014. Analisis Produktivitas Usahatani Padi Sawah dengan Menggunakan Traktor Tangan dan Cara Konvensional di Kabupaten Rejang Lebong. *AGRISEP*, Vol. 14 No.2, September 2014, hal. 205.
- Suyatno, Adi; Imelda; Komariyati. 2018. Pengaruh Penggunaan Traktor Terhadap Pendapatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usaha Tani Padi di Kabupaten Samba. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, Vol 4, No. 2, Desember 2018, hal. 92.
- Tribunnews. 2017. Membangunkan Lahan Tidur dan Mencetak Sawah Wujudkan Swasembada. Artikel online. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/08/15/membangunkan-lahan-tidur-dan-mencetak-sawah-wujudkan-swasembada>, pada tanggal 30 September 2020.
- Tribunnews Pekanbaru. 2018. Petani Padi di Desa Melai Butuh Mesin Perontok Gabah. Artikel online. Diakses dari <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/11/22/petani-padi-di-desa-melai-butuh-mesin-perontok-gabah>, pada tanggal 10 Oktober 2020.
- Umar, Sudirman dan Pangaribuan, Sulha. 2017. Evaluasi Penggunaan Mesin Tanam Bibit Padi (*Rice Transplanter*) Sistem Jajar Legowo di Lahan Pasang Surut. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung*, Vol. 6. No. 2, Juli 2017, hal. 110.

MENYELISIK SHADOW ECONOMY DI INDONESIA

Investigating the Shadow Economy in Indonesia

Rastri Paramita

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: rastri.paramita@dpr.go.id

Abstract

The purpose of this study is to know the relationship between economic growth and shadow economy through the transmission of labor conditions as well as knowing the effect of the shadow economy on tax revenue in Indonesia. This study using a qualitative method to find out the issue. The results of this study show that the development of the shadow economy and economic growth in Indonesia in the 2000-2015 period tends to fluctuate and the relationship between economic growth and the shadow economy is not always negative. However, in the last 16 years, the shadow economy's percentage of GDP has decreased. Meanwhile, the connection between the shadow economy and tax revenue in Indonesia, namely simplification of the bureaucracy in starting a business in Indonesia, is expected to have a greater impact on reducing shadow economy growth. To slow down the shadow economy growth caused by bureaucracy, the Directorate General of Taxes (DGT) needs to take tactical steps by making improvements and innovating tax services, from online registration of NPWP to launching a single login with innovation allowing taxpayers to access various tax services at one time log-in, and cooperation in exchanging information to minimize the presence of asymmetrical information between the DGT and taxpayers, accompanied by tax incentives for taxpayers who wish to share information.

Keywords: *Shadow Economy, Economic growth, Tax*

1. Pendahuluan

Shadow economy telah menarik perhatian ekonom dan sosiolog pada paruh kedua tahun 1970an. Fenomena *shadow economy* ini berkembang di tahun 1970an akibat krisis yang terjadi saat itu sehingga mendorong pesatnya perekonomian *unofficially economy* atau *grey economy* atau *underground economy* yang bertujuan salah satunya untuk menghindari pajak. Fenomena *shadow economy* hingga saat ini pun masih terjadi baik di negara berkembang maupun di negara maju (Medina dan Schneider: 2018)

Semakin tingginya *shadow economy* dalam suatu perekonomian akan menimbulkan dampak yang serius. Menurut Tanzi (2002), *shadow economy* mampu menimbulkan beberapa isu kebijakan serius, di antaranya: 1) penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tarif pajak yang tinggi dapat memangkas penerimaan, akibatnya sulit mengenakan tarif pajak dan melakukan *enforcement*. Oleh sebab itu, pilihan kebijakan pajak berkaitan dengan bentuk *enforcement* yang diberlakukan; 2) kegiatan *shadow economy* merepresentasikan bentuk subsidi bagi kegiatan ekonomi tertentu sebab penghindaran pajak sangat mudah dilakukan; 3) menyebabkan hasil statistik resmi yang pemerintah terbitkan mengenai pertumbuhan ekonomi menjadi *unreliable* serta kebijakan ekonomi dapat kurang tepat sebab informasi yang dikumpulkan juga tidak memadai; dan 4) dari sudut pandang mikro, *shadow economy* membangun persaingan tidak sehat di sektor tersebut serta tidak mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah serta tidak membayar pajak.

Telah banyak penelitian empirik terkait penyebab, efek, determinan dari *shadow economy* yang umumnya menggunakan variabel-variabel antara lain pengangguran, pendapatan perkapita, *tax burden*, tingkat keterbukaan perdagangan internasional, *regulatory cost*, dan *government spending*. Cicek dan Elgin (2011) melakukan penelitian yang secara khusus berfokus pada pembahasan efek dari *shadow economy* pada kualitas pengambilan kebijakan di bidang fiskal. Sedangkan Tanzi (2002) meneliti efek *shadow economy* pada basis moneter. Sedangkan determinan *shadow economy* dilakukan oleh De Soto (1989), Dreher dan Schneider (2006), dan Singh et.al (2012).

Penelitian mengenai *shadow economy* yang terjadi di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Chatib Basri (dalam Gunadi: 2004), yang mengestimasikan besaran *shadow economy* Indonesia berkisar 30-40 persen dari PDB yang berasal dari aktivitas usaha yang tidak membayar pajak, korupsi, usaha dengan sembunyi-sembunyi atau hasil dari sektor informal yang tidak terdata sebagai salah satu kontributor PDB. Sedangkan estimasi yang pernah dilakukan Basri (2014) terhadap *underground economy* di Indonesia menggunakan indikator pertumbuhan konsumsi listrik yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri semen, serta tidak terjadinya revolusi sosial meski angka resmi pengangguran mencapai 40 juta orang. Penelitian mengenai ekspektasi potensi *underground economy* di Indonesia secara kualitatif dilakukan oleh Rasbin (2013) yang menghasilkan simpulan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia banyak yang tidak tercatat dalam laporan resmi negara. Kegiatan-kegiatan ini termasuk dalam kategori *underground economy*, sehingga potensi *underground economy* di Indonesia cukup besar. Kegiatan *underground economy* di antaranya kegiatan penyelundupan pasir; BBM, kayu, kekayaan laut, satwa langka, dan sebagainya ke luar negeri. Selain itu, ada juga kegiatan impor khususnya barang-barang elektronik yang dilakukan secara ilegal. Juga ada kegiatan yang dilakukan di sektor informal yang termasuk dalam kategori *underground economy*, di mana dari kegiatan ini berpotensi kehilangan pendapatan dari sektor pajak.

Umumnya penelitian terkait *shadow economy* di Indonesia menggunakan metode kuantitatif untuk melakukan estimasi besarnya *shadow economy*. Pada kajian ini, menyelisik *shadow economy* di Indonesia dengan perspektif berbeda yaitu mengkaji interaksi antara *shadow economy* melalui transmisi kondisi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari kajian ini adalah:

1. Mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi dengan *shadow economy* melalui transmisi kondisi tenaga kerja.
2. Mengetahui pengaruh *shadow economy* terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Namun, sebelum hasil dan pembahasan kajian ini diungkapkan, pada bagian 2 berikut ini membahas tinjauan pustaka yang menjelaskan teori dan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam kajian ini. Bagian ketiga menjelaskan alat analisis, sumber data, dan metode yang digunakan dalam studi ini. Pada bagian keempat merupakan pembahasan kajian ini. Dan bagian kelima berisi kesimpulan dan saran dalam kajian ini.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Definisi *Shadow Economy*

Belum ada konsensus terkait definisi *shadow economy*. IMF (2018) dalam Medina dan Schneider (2018) mendefinisikan *shadow economy* secara umum sebagai situasi di mana bisnis yang beroperasi di luar sistem pajak dan bisnis yang beroperasi dengan menyembunyikan transaksi untuk menghindari pembayaran pajak, biaya jaminan sosial, atau untuk menghindari biaya yang terkait dengan undang-undang tentang kondisi kerja yang aman atau perlindungan hak konsumen. Objek dan pendekatan yang dimanfaatkan untuk menilai serta mengidentifikasi aktivitas ekonomi. Sedangkan definisi *shadow economy* menurut Smith (1994:18) dalam Faal (2003) adalah sebagai “*market-based production of goods and services*” baik legal maupun ilegal, yang tidak tercatat sehingga tidak masuk dalam penghitungan estimasi GDP resmi.

Terdapat beberapa terminologi yang dipersamakan dengan *shadow economy* yaitu *underground economy*, *hidden economy*, *gray economy*, *black economy*, *informal economy*, *cash economy*, atau *unobserved economy* (IMF, 2018). Definisi *shadow economy* sangat bergantung pada metode atau indikator yang digunakan (DDTC News, 2019). OECD menggunakan istilah *non-observe economy* guna menjelaskan fenomena *shadow economy*.

Badan Pusat Statistik/BPS (2014) menggunakan istilah sektor informal, yang dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang teramatid dan yang tidak teramatid, berbeda dari aktivitas ilegal dan/atau tersembunyi/dirahasiakan. Sektor informal juga bukan bagian dari produksi rumah tangga untuk konsumsi akhir (contohnya petani subsisten, imputasi jasa sewa rumah milik sendiri, atau

rumah tangga yang mempekerjakan pekerja domestik rumah tangga seperti pembantu rumahtangga, tukang kebun, sopir, *baby sitter*, dll).

Kegiatan sektor informal menurut BPS (2014) yang merujuk kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th International Conference on Labor Statisticians) tahun 2003, meliputi:

- 1) Unit-unit yang terlibat dalam produksi barang atau jasa dengan tujuan utama menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Unit ini biasanya beroperasi dengan organisasi tingkat rendah atau dalam skala kecil, dengan sedikit atau tanpa pembedaan yang jelas antara tenaga kerja dan modal usaha sebagai faktor produksi. Status tenaga kerja sebagian besar berupa pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga dan hubungan majikan-pekerja lebih kepada hubungan pribadi dan hubungan sosial daripada hubungan ketenagakerjaan dengan perjanjian dan/atau jaminan resmi.
- 2) Unit produksi sektor informal memiliki karakteristik sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*household unincorporated enterprise*). Aset tetap dan aset lainnya yang digunakan untuk usaha bukan milik unit produksi tetapi kepunyaan pemiliknya. Unit seperti ini tidak dapat melakukan transaksi atau terlibat kontrak dengan unit lain, atau mendapatkan pinjaman atas nama mereka sendiri. Pemilik harus mencari sumber dana dengan risikonya sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi, tanpa batas, untuk hutang atau kewajiban yang timbul dalam proses produksi. Pengeluaran produksi sering kali tidak dapat dibedakan dari pengeluaran rumah tangga. Begitu pula dengan barang-barang modal seperti bangunan atau kendaraan tidak dapat dibedakan antara kepemilikan rumah tangga dan kepemilikan usaha.
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit produksi sektor informal tersebut tidak bermaksud secara sengaja menghindar dari kewajiban pajak atau pembayaran jaminan sosial tenaga kerja, atau tidak secara sengaja melanggar peraturan atau ketentuan administratif ketenagakerjaan lainnya. Dengan demikian, konsep kegiatan sektor informal harus dibedakan dari konsep kegiatan ekonomi yang tersembunyi atau ilegal (*hidden/underground economy*).

Sektor informal dapat berupa aktivitas ekonomi yang teramatid dan yang tidak teramatid, berbeda dari aktivitas ilegal dan/atau tersembunyi/dirahasiakan. Sektor informal juga bukan bagian dari produksi rumah tangga untuk konsumsi akhir, contohnya petani subsisten, imputasi jasa sewa rumah milik sendiri, atau rumahtangga yang mempekerjakan pekerja domestik rumah tangga seperti pembantu rumahtangga, tukang kebun, sopir, *baby sitter*, dll (BPS, 2014).

2.2. Klasifikasi Aktivitas *Shadow Economy*

OECD (2002) menggunakan istilah *non observed economy* dan membaginya ke dalam empat jenis aktivitas, yakni:

- a. Produksi bawah tanah (*underground production*), di mana aktivitas produktif yang bersifat legal, namun sengaja disembunyikan dari otoritas publik dengan tujuan mengelak dari pajak dan peraturannya.
- b. Produksi ilegal (*illegal production*): aktivitas produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang dilarang hukum.
- c. Produksi sektor informal (*informal sector production*): aktivitas produktif yang legal yang menghasilkan barang dan jasa dalam skala produksi kecil yang umumnya dilakukan oleh usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum.
- d. Produksi rumah tangga untuk digunakan sendiri (*production of households for own final use*).

Feige (1990) mengelompokkan *underground/shadow economy* ke dalam empat golongan, yakni:

- a. *The illegal economy*, yakni aktivitas ekonomi yang tidak sah dan memasukkan pendapatan dari kegiatan ekonomi yang bertentangan atau melanggar peraturan, misalnya, pembajakan, penyelundupan, dan transaksi narkoba.
- b. *The unreported economy*, yakni pendapatan yang tidak dilaporkan pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari kewajiban membayar pajak.
- c. *The unrecorded economy*, yaitu pendapatan yang seharusnya tercatat dalam statistik pemerintah namun tidak tercatat. Akibatnya terjadi perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sesungguhnya.
- d. *The informal economy*, yaitu pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi secara informal. Para pelaku ekonomi dalam sektor ini kemungkinan tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang, tidak memiliki perjanjian kerja, atau kredit keuangan.

Jika melihat dari tujuan perpajakan, BPS (2014) mengklasifikasikan *shadow economy* menjadi:

- a. Aktivitas ekonomi yang bersifat ilegal, contoh perjudian, prostitusi, penyelundupan, perdagangan narkotika; dan
- b. Aktivitas ekonomi yang dilakukan secara legal, namun tanpa melaporkan penghasilan yang diterima kepada otoritas pajak, sehingga tidak dipungut pajak.

Sedangkan Grubel (1997) dalam The Fraser Institute (1997) menggunakan taksonomi *underground economy* sebagai *shadow economy*, menyusun tabel taksonomi klasifikasi dari aktivitas *underground economy* sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Aktivitas Underground Economy

Aktivitas	Jenis Transaksi			
	Transaksi Moneter		Transaksi Nonmoneter	
Illegal	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan barang-barang hasil curian; - Industri obat-obatan terlarang (narkotika), - Prostitusi, - Perjudian, - Penipuan - Pencucian uang - Penyeludupan - Penggelapan. 		<ul style="list-style-type: none"> - Barter obat-obatan terlarang; - Produksi obat-obatan terlarang untuk konsumsi pribadi; - Pencurian barang-barang untuk konsumsi pribadi; produksi narkoba ilegal untuk konsumsi pribadi, dst. 	
Legal	Tax Evasion Pendapatan yang tidak dilaporkan oleh pekerja, Upah, gaji, dan aset	Tax Avoidance Diskon pekerja, tunjangan (mobil, makanan bersubsidi, dll)	Tax Evasion Barter layanan dan barang legal	Tax Avoidance Pekerjaan yang dilakukan sendiri

Sumber: Grubel (1997) dalam The Fraser Institute (1997), diolah

2.3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan *Shadow Economy*

Schneider, Buehn, and Montenegro (2007) mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya aktivitas *shadow economy*, yaitu

- 1) Beban pajak dan jaminan sosial (*social security*). Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan perkembangan dan peningkatan kegiatan *shadow economy*. Beban pajak yang semakin besar, akan mengurangi pendapatan para pelaku kegiatan ekonomi. Selain itu, apabila perbedaan antara total biaya tenaga kerja dalam ekonomi resmi (*official economy*) dengan pendapatan setelah pajak yang diperoleh dari bekerja semakin besar, semakin besar insentif pekerja untuk bekerja dalam *shadow economy*. Namun demikian, reformasi pajak besar-besaran melalui penurunan tarif pajak, tidak serta merta menyebabkan berkurangnya kegiatan *shadow economy* secara substansial. Reformasi bisa menstabilisasi ukuran *shadow economy* dan mencegah peningkatan lebih lanjut. Akan tetapi, jaringan sosial dan hubungan personal, keuntungan yang tinggi dari kegiatan yang tidak lazim, serta investasi riil dan sumber daya manusia bisa mencegah masyarakat kembali beraktivitas dalam *official economy*.
- 2) Peningkatan intensitas regulasi pemerintah, yang seringkali diukur dengan jumlah undang-undang dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah merupakan faktor penting yang dapat menambah biaya dan mengurangi kebebasan individu untuk terlibat dalam ekonomi formal (*official economy*). Contoh, regulasi pasar tenaga kerja, hambatan perdagangan (*trade barriers*), dan restriksi penggunaan tenaga kerja asing. Banyaknya regulasi akan membuat birokrasi berbelit-belit dan menambah beban pelaku ekonomi. Beban yang besar akan menghasilkan ketidakekonomian, sehingga dapat menjadi penyebab pelaku ekonomi memilih bekerja dalam *underground economy*.

- 3) Pelayanan sektor publik. Peningkatan aktivitas *shadow economy* dapat menyebabkan turunnya penerimaan negara, yang akan mengurangi kualitas dan kuantitas penyediaan barang-barang dan jasa publik. Sehingga menyebabkan meningkatnya tarif pajak untuk perusahaan dan individu di sektor-sektor resmi. Kondisi ini terkadang dibarengi dengan memburuknya kualitas barang-barang publik (seperti infrastruktur) dan administrasi.

Kondisi perekonomian (*official economy*). Kondisi perekonomian juga memainkan peranan penting dalam memengaruhi keputusan pelaku ekonomi untuk bekerja pada *underground economy*. Dalam kondisi perekonomian yang ekspansif, pelaku ekonomi memiliki banyak peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dan uang tambahan lainnya. Sebaliknya dalam kondisi resesi ekonomi, para pelaku ekonomi berusaha memberikan kompensasi kehilangan pendapatan dari kondisi ekonomi dengan melakukan kegiatan tambahan pada *underground economy*.

2.4. Metode Penghitungan *Shadow Economy*

Dalam mengestimasi *shadow economy*, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan menurut Schneider dan Enste (2002), di antaranya:

a. *Pendekatan langsung*

Merupakan pendekatan secara mikro melalui sebuah survei pada sekelompok sampel dengan metode sampel tertentu. Survei digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan yang termasuk ke dalam aktivitas *underground economy*. Kelebihan pendekatan ini adalah informasi yang dikumpulkan dapat lebih detail melalui pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Sedangkan kelemahannya adalah keakuratan data hasil survei sangat dipengaruhi sikap kooperatif dari responden untuk menjawab secara jujur.

b. *Pendekatan tidak langsung*

Disebut juga sebagai pendekatan indikator karena untuk mengestimasi *underground economy* menggunakan berbagai variabel makroekonomi sebagai indikator. Proksi untuk mengukur jumlah serta pertumbuhan *shadow economy* yang merupakan indikator yang sering digunakan, di antaranya:

1. *Statistik Neraca Nasional*.

Pengukuran/besaran *shadow economy* didasari pada diskrepansi antara statistik pendapatan dan pengeluaran pada neraca nasional data individu.

2. *Statistik Ketenagakerjaan*.

Shadow economy diprediksi pertumbuhannya atas dasar penurunan partisipasi angkatan kerja pada perekonomian resmi, dengan anggapan bahwa angkatan kerja mempunyai tingkat partisipasi secara keseluruhan.

3. *Transaksi.*

Pendekatan ini menggunakan data transaksi moneter pada suatu perekonomian untuk menghitung volume keseluruhan GDP resmi dan tidak resmi, kemudian memperkirakan ukuran *shadow economy* dengan mengurangi GDP resmi dari total nominal GDP tersebut.

4. *Permintaan uang.*

Shadow economy diperkirakan besaran/ukurannya menggunakan permintaan uang tunai, dengan menganggap bahwa transaksi terselubung tersebut dilakukan secara tunai dan kenaikan *shadow economy* akan meningkatkan permintaan terhadap uang tunai.

5. *Input Pajak (Konsumsi Energi).*

Shadow economy diprediksi menggunakan besaran konsumsi energi dengan asumsi bahwa konsumsi energi adalah indikator fisik terbaik dari seluruh aktivitas ekonomi. Pengurangan tingkat pertumbuhan GDP resmi dari pertumbuhan total konsumsi energi dan berbagai atribut perbedaan pertumbuhan *shadow economy*. Pendekatan dengan pembentukan model estimasi *shadow economy* didapatkan melalui pendekatan variabel laten. Di mana pembentukan model dengan merepresentasikan satu indikator yang dapat mencakup aktivitas *shadow economy*. Model terbentuk dari faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya aktivitas *underground economy*.

2.5. Dampak *Shadow Economy*

Shadow economy dapat menimbulkan isu kebijakan yang krusial akan memengaruhi perekonomian, antara lain:

1. Penghindaran pajak (*tax evasion*) akibat tarif pajak yang tinggi sehingga menggerus penerimaan, akibatnya sulit mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi.
2. *Underground economy* merepresentasikan suatu bentuk subsidi untuk aktivitas ekonomi tertentu. Subsidi tersebut kemudian membuka peluang melakukan penghindaran pajak.
3. Angka statistik resmi yang dikeluarkan pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi menjadi kurang konsisten (*unreliable*) diakibatkan oleh *underground economy* sehingga berpotensi ketidaktepatan kebijakan ekonomi yang diputuskan.

Dari sudut pandang mikro, akan timbul kondisi persaingan tidak sehat di suatu sektor dan keengganan untuk menaati regulasi yang ditetapkan pemerintah akibat adanya *underground economy*. Contohnya yaitu tidak membayar pajak sebab tingkat harga dapat lebih rendah dibandingkan *official economy* sehingga kemampuan penjualan dan keuntungan dapat meningkat.

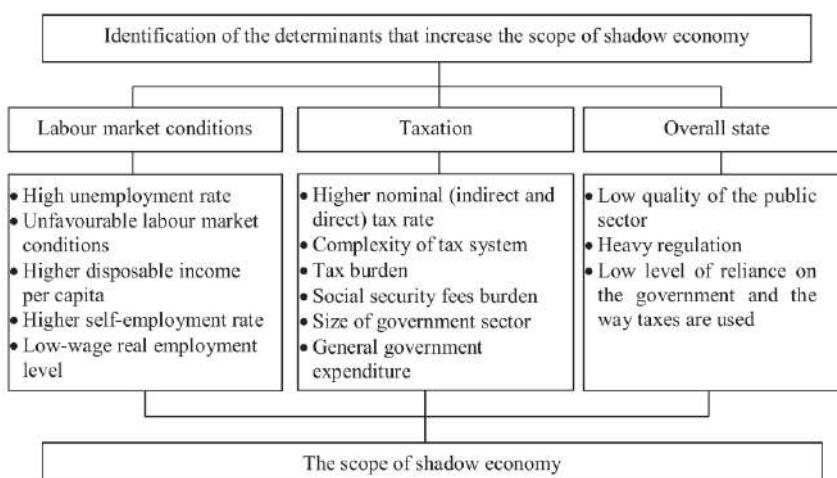
3. Metodologi Penelitian

3.1. Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Moleong (2012) mengutip Jane Richie yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Sumber data penelitian ini, menggunakan studi literatur baik berupa buku maupun hasil penelitian terdahulu terhadap *shadow economy* yang ada di perekonomian secara global maupun di Indonesia. Data disajikan dalam bentuk naratif bukan dalam bentuk angka. Hal ini sejalan dengan pendapat Miles dan Huberman (1992), bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada penyuguhan gambaran secara objektif yang sebenarnya, berkenaan dengan objek penelitian yang didasari pada data yang ada, berwujud rangkaian kata bukan angka-angka.

Gambar 1. Faktor yang Meningkatkan Peningkatan Scope dari Shadow Economy



Sumber: Gaspareniene, Remeikiene, dan Heikkila (2016)

Alat analisis yang digunakan yaitu faktor-faktor yang meningkatkan scope dari *shadow economy* yang dikemukakan oleh Gaspareniene, Remeikiene, dan Heikkila (2016) mengkompilasi beberapa faktor yang dapat meningkatkan scope dari *shadow economy* sebagaimana pada Gambar 1. Gambar tersebut akan menjadi dasar kajian pada sub bagian keempat mengenai pembahasan hasil dan analisis terkait kondisi pasar tenaga kerja dan pajak dengan perkembangan *shadow economy* di Indonesia.

3.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Friedrich Schneider, Andreas Buehn, dan Claudio E. Montenegro (2010)	<i>Shadow Economies All Over The World, New Estimates for 162 Countries From 1999 to 2007</i>	Menggunakan alat analisis <i>Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) Model</i>	Hasil penelitiannya adalah 1) untuk semua negara yang diinvestigasi, <i>shadow economy</i> telah mencapai ukuran yang sangat besar dengan bobot nilai rata-rata 17,2 (33,1 persen) dari PDB resmi; 2) <i>shadow economy</i> adalah fenomena yang kompleks hadir untuk sebagian besar di semua jenis ekonomi dan rakyat terlibat dalam kegiatan <i>shadow economy</i> karena berbagai alasan, terutama perpajakan dan regulasi; 3) disparitas antar daerah pada level informalitas tetap kluster regional.
Rasbin (2013)	Ekspektasi Potensi <i>Underground Economy</i> di Indonesia	Menggunakan alat analisis kualitatif	Kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia banyak yang tidak tercatat dalam laporan resmi negara. Kegiatan-kegiatan ini termasuk dalam kategori <i>underground economy</i> , sehingga potensi <i>underground economy</i> di Indonesia cukup besar. Kegiatan <i>underground economy</i> di antaranya kegiatan penyelundupan pasir; BBM, kayu, kekayaan laut, satwa langka, dan sebagainya ke luar negeri. Selain itu ada juga kegiatan impor khususnya barang-barang elektronik yang dilakukan secara ilegal. Juga ada kegiatan yang dilakukan di sektor informal yang termasuk dalam kategori <i>underground economy</i> , di mana dari kegiatan ini berpotensi kehilangan pendapatan dari sektor pajak.
Ligita Gaspareniene, Rita Remeikiene, Markku Heikkila (2016)	<i>Evaluation of the impact of shadow economy determinants: Ukrainian case</i>	Metode analisis yang digunakan adalah metode <i>Multiple regression</i>	Hasil dari penelitian ini adalah: 1) dampak umum dari determinan <i>shadow economy</i> dapat bersifat <i>multidirectional</i> : positif (pajak tinggi, regulasi pasar tenaga kerja yang ketat, tingkat pengangguran tinggi, tingkat wirausaha tinggi, kualitas buruk dari pekerjaan sektor publik dan lain-lain), negatif (tingkat modal sosial yang lebih tinggi) dan <i>bidirectional</i> (tingkat pengangguran), dampaknya dapat dikurangi/diperkuat mengingat langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah untuk pengurangan <i>shadow economy</i> , dan 2) ruang lingkup <i>shadow economy</i> di Ukraina secara gabungan dipengaruhi

			<p>oleh tarif pajak, tingkat lapangan kerja secara keseluruhan, impor barang dan jasa, PDB per kapita dan partisipasi penduduk usia kerja di pasar tenaga kerja. PDB per kapita, lebih partisipasi aktif orang usia kerja di pasar tenaga kerja dan peningkatan volume impor memiliki dampak negatif, sementara kenaikan tarif pajak dan pertumbuhan angkatan kerja secara keseluruhan berdampak positif pada cakupan <i>shadow economy</i> di negara tersebut. Dampak yang terakhir faktor direkomendasikan untuk dikonfirmasi dengan menerapkan metode penelitian kualitatif.</p>
--	--	--	---

Sumber: Berbagai sumber, diolah

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. *Shadow Economy* dan Pertumbuhan Ekonomi

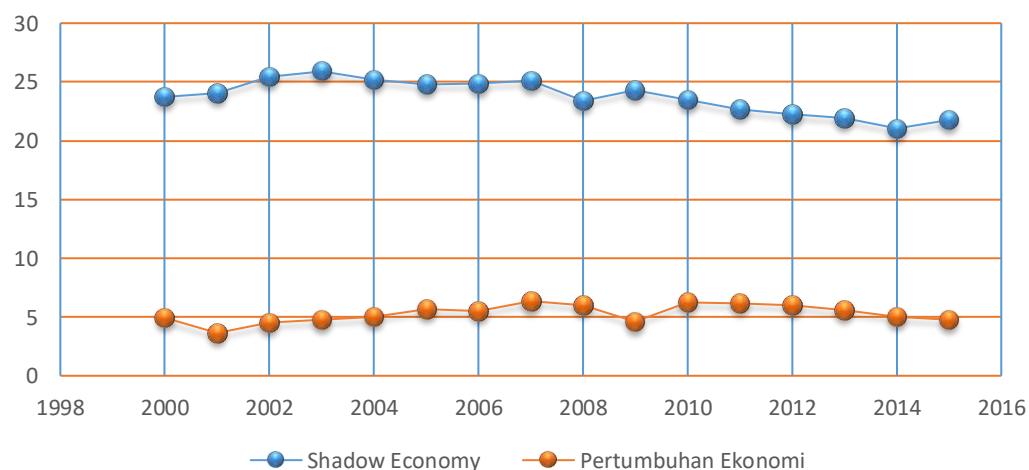
Dalam sub bagian ini akan membahas terkait *shadow economy* melalui transmisi pasar tenaga kerja dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi, kondisi pasar tenaga kerja yang kurang menguntungkan, tingginya *disposable income per capita*, tingginya wirausaha, dan rendahnya pendapatan riil pekerja menjadi faktor yang mendorong meningkatnya *shadow economy*. Determinan tersebut akan mendorong tenaga kerja untuk masuk ke dalam *shadow economy* karena tidak perlu membayar pajak, sehingga pendapatan riil pekerja dapat lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972) yang menyatakan bahwa “*the benefits of tax non-compliance result from an individual's marginal tax rate and true individual income*”.

Jika dilihat dari proporsi lapangan kerja informal di Indonesia sektor nonpertanian menurut daerah tempat tinggal, maka lapangan kerja sektor informal di perkotaan cenderung meningkat dibandingkan di perdesaan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh perubahan *mindset* pekerja milenial yang lebih memilih pekerjaan dengan waktu fleksibel, seperti pekerja *freelance* di bidang informasi dan teknologi atau melakukan wirausaha. Menurut Sribulancer, sebuah *platform* yang menjembatani *freelancer* dengan perusahaan, mengatakan angka *freelancer* di Indonesia tahun 2019 meningkat 16 persen dibandingkan tahun 2018 (Techinasia, 2019).

Sedangkan tenaga kerja informal di sektor pertanian, ternyata memiliki kontribusi lebih besar pada *shadow economy* Indonesia dibandingkan sektor nonpertanian. Rerata persentase tenaga kerja informal sektor pertanian periode 2015-2019 sebesar 88 persen. Terkait besarnya masalah tenaga kerja informal di sektor pertanian di Indonesia disebabkan oleh ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Rendahnya kemampuan sektor

formal menyerap tenaga kerja disebabkan salah satunya oleh tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh pendidikan sekolah dasar atau lebih rendah yang pada tahun 2019 mencapai 40,51 persen. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan itulah yang menyebabkan sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan *low skill* karena karakteristik pertanian di Indonesia masih didominasi pola pertanian yang belum menerapkan teknologi modern atau masih tradisional.

Gambar 2. Perkembangan Shadow Economy dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2000-2015



Sumber: BPS, theglobaleconomy.com, diolah

Menurut Feld dan Schneider (2010) dan Bajada dan Schneider (2009), terdapat peran ekonomi formal dan pengangguran dalam menentukan keputusan masyarakat untuk bekerja di sektor formal atau informal. Apabila pertumbuhan PDB melambat atau tidak meningkat, maka ada kecenderungan pekerja akan mengimbangi hilangnya pendapatan dari ekonomi melalui *shadow economy* menjadi kegiatan tambahan. Sehingga, tingginya angka pengangguran akan menambah keterlibatan orang dalam *shadow economy* yang berdampak pada angkatan kerja informal akan meningkat. Berdasarkan Gambar 2, perkembangan *shadow economy* dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2000-2015, cenderung mengalami fluktuasi dan tidak selamanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan *shadow economy* bertanda negatif. Namun, terdapat kecenderungan dalam 16 tahun terakhir persentase *shadow economy* terhadap GDP mengalami penurunan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febrianto (2020) mengenai hubungan sektor informal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terdapat perbedaan pola hubungan antara proporsi sektor informal dengan pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah di Indonesia. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, maka kebijakan yang diambil tidak bisa disamaratakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kebijakan untuk menurunkan sektor informal mungkin akan berdampak positif kepada

pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian barat. Akan tetapi, kebijakan yang serupa bisa jadi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur. Hal tersebut dapat disebabkan karena masih cukup besarnya proporsi sektor informal, belum siapnya sarana-prasarana, serta faktor institusional yang belum memadai di Indonesia bagian timur.

4.2. Keterkaitan *Shadow Economy* Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia.

Pada sub bagian ini mencoba mengkaji kaitan determinan pajak terhadap meningkatnya *shadow economy* di Indonesia. Sebagaimana hasil penelitian Gaspareniene, Remeikiene, dan Heikkila (2016), menguraikan determinan pajak yang memengaruhi peningkatan *scope* dari *shadow economy*, di antaranya tingginya nilai nominal *tax rate*, sistem pajak yang kompleks, *tax burden*, beban biaya jaminan sosial, dan ukuran sektor pemerintah.

Di sisi lain, *shadow economy* yang tinggi akhirnya juga akan memengaruhi *performance* dari penerimaan pajak. Berdasarkan laporan edisi keenam *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies* OECD yang dikeluarkan pada tahun 2019, menilai bahwa penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia yaitu antara lain besarnya porsi tenaga informal mencapai 57,6 persen dari total tenaga kerja (*shadow economy*), penghindaran pajak, dan sempitnya basis pajak (DDTC News, 2019). *Shadow economy* yang tinggi di Indonesia masih menjadi penghambat dalam mendongkrak penerimaan pajak karena sektor informal sulit dijangkau oleh otoritas pajak.

Katsios (2006) membahas reformasi pajak vs *shadow economy*, terdapat kekeliruan bahwa reformasi pajak secara mayor melalui pengurangan tarif pajak yang besar akan menurunkan substansial *shadow economy*. Kemungkinan satu-satunya dari langkah tersebut yaitu berhasil menstabilkan ukuran *shadow economy* saat ini dan menghindari peningkatan lebih lanjut. Terkait masalah reformasi pajak yang telah dilakukan beberapa kali oleh Indonesia, Rohman dan Nielsen (2017), dibutuhkan reformasi yang lebih besar guna mengurangi biaya dalam menjalankan bisnis di Indonesia (Rohman & Nielsen, 2017).

Penyederhanaan birokrasi dalam memulai bisnis di Indonesia diharapkan akan berdampak lebih besar terhadap pengurangan pertumbuhan *shadow economy*. Karena menurut mereka, biaya masuk yang tinggi untuk berbisnis di Indonesia sangat berkorelasi dengan ukuran *unofficial economy*. Kondisi ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan (Muliawati, 2020) yang mengkaji mengenai *shadow economy*. Keberadaan *shadow economy* atau OECD menyebutnya sebagai *non-observed economy*, menurut Muliawati (2020) dilatarbelakangi oleh tiga motif yang dominan, yaitu motif biaya, motif keuntungan, dan motif kerumitan. Motif biaya dapat berupa dorongan untuk meminimalkan beban pajak atau pun biaya usaha lainnya. Sementara itu, motif keuntungan bermula dari adanya tawaran keuntungan yang luar biasa menggiurkan sehingga mendorong seseorang untuk mendapatkannya walau harus melanggar hukum sekalipun. Yang terakhir, motif kerumitan muncul ketika seseorang enggan untuk menghadapi mekanisme yang dianggapnya rumit, misal adanya pelaku

usaha yang lebih memilih masuk dalam sektor informal karena enggan mengurus perizinan yang dianggap rumit (Muliawati, 2020).

Untuk memperlambat pertumbuhan *shadow economy* yang disebabkan oleh birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah taktis dengan melakukan perbaikan dan inovasi layanan perpajakan, dari mulai pendaftaran NPWP secara daring sampai peluncuran *single login* dengan inovasi memungkinkan wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan pajak dalam satu kali *login*.

Selain strategi di atas, DJP melakukan kerja sama pertukaran informasi untuk meminimalkan adanya informasi asimetris antara DJP dengan wajib pajak. Ada banyak kerja sama pertukaran informasi yang dilakukan DJP, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Salah satu bentuk keseriusan DJP dalam melaksanakan kerja sama pertukaran informasi yaitu dengan terbitnya PER-02/PJ/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Tax Examination Abroad* dalam Rangka Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional. Melalui insentif pajak dan kerja sama pertukaran informasi diharapkan dapat menurunkan informasi asimetris sehingga mampu menekan keberadaan *non-observed economy/shadow economy*. Selain itu, perbaikan layanan perpajakan diperkirakan juga mampu menekan keberadaan *non-observed economy/shadow economy* melalui pemberian stimulus kemudahan administrasi perpajakan (Muliawati, 2020).

5. Penutup

Dengan menggunakan alat analisis yaitu faktor-faktor yang meningkatkan scope dari *shadow economy* yang dikemukakan oleh Gasparyan, Remeikiene, dan Heikkila (2016), maka hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan *shadow economy* melalui transmisi tenaga kerja memengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat pada perkembangan *shadow economy* dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2000-2015 yang cenderung mengalami fluktuasi dan tidak selamanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan *shadow economy* bertanda negatif. Namun, terdapat kecenderungan dalam 16 tahun terakhir persentase *shadow economy* terhadap GDP mengalami penurunan. Menurut penelitian Febrianto (2020) mengenai hubungan sektor informal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terdapat perbedaan pola hubungan antara proporsi sektor informal dengan pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah di Indonesia. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain dalam mengatasi *shadow economy*.

Sedangkan keterkaitan *shadow economy* terhadap penerimaan pajak di Indonesia, yaitu penyederhanaan birokrasi dalam memulai bisnis di Indonesia diharapkan akan berdampak lebih besar terhadap pengurangan pertumbuhan *shadow economy*. Untuk memperlambat pertumbuhan *shadow economy* yang disebabkan oleh birokrasi, DJP mengambil langkah taktis dengan melakukan

perbaikan dan inovasi layanan perpajakan, dari mulai pendaftaran NPWP secara daring sampai peluncuran *single login* dengan inovasi memungkinkan wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan pajak dalam satu kali *log* masuk, dan kerja sama pertukaran informasi untuk meminimalkan adanya informasi asimetris antara DJP dengan wajib pajak yang disertai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang berkenan *sharing* informasi.

Saran terhadap penelitian selanjutnya agar menambahkan lebih banyak variabel makro yang dikaji disertai dengan memadukan penggunaan metodologi analisis kuantitatif dan kualitatif sehingga hasil kajian dapat lebih komprehensif dalam memotret *shadow economy* yang terjadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Allingham, M.G. & Sandmo, A. 1972. *Income tax evasion: a theoretical analysis*. Journal of Public Economics, 1, 3, hlm. 323–338.
- Azwar, & Mulyawan, Andi W. 2017. Analisis *Underground Economy* Indonesia Dan Potensi Penerimaan Pajak. Jurnal Info Artha, Vol.1, No.1.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Survei Sektor Informal Tahun 2014 Pedoman Pencacahan SS-1 dan SS-2. Jakarta.
- Bajada, C. & Schneider, F. 2009. *Unemployment and the shadow economy in the OECD. Review Economique*, 60, 4, hlm. 1011–1033.
- Basri, Faisal. 2014. Potret Ekonomi: Mengarah Pada Krisis Peradaban?. Blog <https://faisalbasri.com/2014/01/02/potret-ekonomi-mengarah-pada-krisis-peradaban/>. Diunduh 10-11-2020.
- Cicek, D., & Elgin, C. 2011. *Cycliclity of Fiscal Policy and The Shadow Economy*. Empirical Economics. No. 41, Vo. 3.
- DDTC News. 2019. Apa Itu Shadow Economy? Diakses dari https://news.ddtc.co.id/apa-itu-shadow-economy-16770?page_y=1400. Diunduh tanggal 17-9-2020.
- De Soto, Hernando. 1989. *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*. Harper and Row. New York.
- Faaf, Ebrima. 2003. Currency Demand, the Underground Economy, and Tax Evasion: The Case of Guyana. IMF Working Paper. WP/03/7. Washington: International Monetary Fund.
- Febrianto, Edvin N. 2020. Hubungan Sektor Informal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 14, No. 1, hlm 151-158.
- Feige, Edgar L. 1990. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach. World Development. Vol. 18, No.7

- Feld, L. P. and F. Schneider. 2010. Survey on the Shadow Economy and Undeclared Earnings in OECD Countries, *German Economic Review* 11 (2), 109–49.
- Gaspareniene, Ligita, Remeikiene, Rita, dan Heikkila, Markku. 2016. *Evaluation of Impact of Shadow Economy Determinants: Ukrainian Case*. *Intellectual Economics* Volume 10, Issue 2, August 2016, Pages 108-113
- Gunadi, 2004. Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan. Disarikan dari Naskah pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanggal 13 Maret 2004 berjudul Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance.
- Indonesia Baik. 2019. Profil Pekerja Indonesia Berdasarkan Pendidikan. Infografis. Diakses dari <http://indonesiabaik.id/infografis/profil-pekerja-indonesia-berdasarkan-pendidikan>. Diunduh tanggal 20-10-2020
- Katsios, S. 2006. *The Shadow Economy and Corruption in Greece*. *South-Eastern Europe Journal of Economics* 1.
- OECD. 2002. *Statistic Measuring the Non-Observed Economy A Handbook*. OECD Publication Service. France.
- _____. 2019. *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019 Paperback*. Diakses dari <http://oe.cd/revenue-statistics-in-asia-and-pacific>
- Medina, L., Schneider, F. 2018. *Shadow Economy Around The World: What Did We Learn Over The Last 20 Years?* International Monetary Fund Working Paper No. 18/17. ISBN/ISSN:9781484338636/1018-5941
- Miles, B. Mathew, dan Huberman, Michael. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Montenegro, Claudio E. 2010. *Shadow Economic All Over The World New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007*. Policy Research Working Paper. The World Bank.
- Muliawati, Nela Gustina. 2020. <https://pajak.go.id/id/artikel/shadow-economy>. Diunduh tanggal 21-10-2020.
- Nizar, Muhammad Afdi, dan Purnomo, Kutarto. 2011. Potensi Penerimaan Pajak Dari *Underground Economy* Di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*. Vol. 12, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.31685/kek.v15i2.93>
- Rasbin. 2013. Ekspektasi Potensi *Underground Economy* Di Indonesia. *Jurnal Kajian*, Vol. 18, Vol. 3. Jakarta. DOI: <https://doi.org/10.22212/kajian.v18i3.493>

- Rohman, Ibrahim Kholilul, & Nielsen, Morten Meyerhoff. 2017. E-Government Can Reduce Indonesia's Shadow Economy And Increase Tax Revenue. Diakses dari <https://theconversation.com/e-government-can-reduce-indonesias-shadow-economy-and-increase-tax-revenue-73861>. Diunduh tanggal 21-10-2020.
- Samuda, S. J. 2016. Underground Economy In Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 19(1), 39-56. <https://doi.org/10.21098/bemp.v19i1.599>
- Schneider, Friedrich & Enste, D.H. 2002. *The Shadow Economy: An International Survey*. Cambridge University Press. Cambridge.
- _____. 2000. Shadow Economies Around the World: Size, Causes, and Consequences. IMF Working Papers February 2000
- _____. & Dreher, Axel. 2006. *Corruption and The Shadow Economy: An Empirical Analysis*. Working Papers. Eidgenossische Technische Hochschule, Zurich.
- _____. Buehn, A., & Montenegro, C. 2007. *Shadow Economies All over the World New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007*. Policy Research Working Paper. 5356.
- Singh, A., Jain-Chandra S., Mohommad, A. 2012. *Inclusive Growth, Institutions and the Underground Economy*. IMF Working Papers 12/47. International Monetary Fund.
- Tanzi, Vito. 2002. *The Shadow Economy, its Causes, And Its Consequences*. International Seminar on Shadow Economy Index in Brazil. Brazilian Institute of Ethics in Competition. Rio de Janeiro.
- Techinasia.com. 2019. Melihat Potensi Pertumbuhan dan Tantangan Pekerja Lepas Indonesia. Industry Insights/Artikel Premium. Diakses dari <https://id.techinasia.com/pekerja-lepas-indonesia-2019>. Diunduh tanggal 19-10-2020.
- The Fraser Institute. 1997. *The Underground Economy: Global Evidence of its Size and Impact*. Vancouver, British Columbia, Canada.
- The Global Economy. 2020. www.theglobaleconomy.com
- Yulianti, Avi. 2018. Penilaian *Underground Economy* Indonesia Dengan Pendekatan Moneter. Universitas Negeri Semarang. Semarang.



Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: @puskajianggaran